

Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII

Cipanas, 12-16 MARET 1996

Jilid 4



Prasasti Huludayeh dan Cirebon, beraksara Jawa Kuno, berbahasa Sunda Kuno, dari kira-kira abad ke-15

**OYEK PENELITIAN ARKEOLOGI JAKARTA
1998 - 1999**

Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII

Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII

Cipanas, 12 - 16 Maret 1996

Jilid 4

**PROYEK PENELITIAN ARKEOLOGI JAKARTA
1998 - 1999**

Copyright
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
1998 - 1999

ISSN 0215 - 1340

Dewan Redaksi

Penanggungjawab : Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary
Ketua : Endang Sri Hardiati
Staf Redaksi : M.Th. Naniek Harkantiningasih
Harry Truman Simanjuntak
Lien Dwiari Ratnawati

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya PIA VII Jilid 4 dapat diterbitkan dalam Tahun Anggaran 1998 - 1999. Tahun ini negara kita terkena krisis ekonomi yang dampaknya sampai ke dunia penerbitan, termasuk penerbitan kami. Anggaran yang telah disediakan tahun ini harus diupayakan agar dapat memenuhi seluruh target, karena itu kami harus mengorbankan kualitas kertas dari penerbitan kami kali ini. Walaupun demikian mudah-mudahan hal ini tidak mengecewakan sidang pembaca.

Buku PIA VII Jilid 4 memuat 12 makalah dalam topik Pengembangan Institusi dan Pemasarakatan Arkeologi. Makalah-makalah tersebut antara lain membicarakan tentang penelitian, pendidikan, pengembangan pariwisata dan manfaat arkeologi untuk masa depan bangsa.

Selain makalah-makalah tersebut, di dalam buku ini dilampirkan juga hasil Kongres IAAI ke-8 yaitu Laporan Sidang Komisi Sumberdaya Manusia dan Komisi Etika, berikut daftar nama anggota Komisi.

Harapan kami hal-hal yang bersifat teknis, seperti kualitas kertas yang kami gunakan ini, tidak mengecewakan pembaca. Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN PEMASYARAKAT- AN ARKEOLOGI

1. Wilayah Kerja Balai Arkeologi Bandung Sebagai Bagian
Kawasan Kebudayaan Nusantara (Suatu Abstraksi Tentang
Proses Budaya)
Anwar Falah 1
2. Pemberitaan Arkeologi di Surat kabar Harian Studi Kasus
pada Berita-berita Harian Umum "Suara Pembaruan"
Selama Tahun 1995
Berthold D.H. Sinaulan 7
3. Peranan Balai Arkeologi Terhadap Penyebaran Informasi
Arkeologi Kepada Masyarakat
Budi Wiyana 24
4. Penelitian Arkeologi dan Perencanaan
Diman Suryanto 35
5. Sumber Daya Arkeologi Sebagai Media Pemantapan Ideo-
logi
I Wayan Suantika 47
6. Manfaat Arkeologi Dalam Pengembangan Pariwisata Buda-
ya di Sulawesi Utara
I.G.N. Adnyana 62
7. Balai Arkeologi Palembang dan Penelitian Naskah Sebuah
Sumbangan Pemikiran
Mujib 72
8. Langkah-langkah Institusional dan Masa Depan Arkeologi
Indonesia
R.P. Soejono 87
9. Pengembangan Museum Dalam Pengadaan dan Pengkajian
Koleksi Arkeologi
Sri Soejatmi Satari 94

10. Arkeologi: Sebagai Pendidikan atau Kesenangan <i>Sri Utami Ferdinandus</i>	102
11. Manfaat Studi Hasil Budaya Materi Masa Kini Bagi Pembangunan di Indonesia <i>Tular Sudarmadi</i>	110
12. Tinjauan Sepintas Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia Sejak Tahun 1960-an Sampai 1995 <i>Uka Tjandrasasmita</i>	124
LAMPIRAN	141
1. Laporan Sidang Komisi Sumberdaya Manusia dan Daftar Nama Anggota Komisi	143
2. Laporan Sidang Komisi Etika dan Daftar Nama Anggota Komisi	147

**PENGEMBANGAN INSTITUSI
DAN PEMASYARAKATAN
ARKEOLOGI**

WILAYAH KERJA BALAI ARKEOLOGI BANDUNG SEBAGAI BAGIAN KAWASAN KEBUDAYAAN NUSANTARA (Suatu Abstraksi Tentang Proses Budaya)

W. Anwar Falah

Pengantar

Balai Arkeologi Bandung memiliki wilayah kerja penelitian yang mencakup empat Propinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Kalimantan Barat. Secara keseluruhan posisi geografis wilayah kerja penelitian tersebut kurang lebih menempati bagian tengah dari belahan barat wilayah Indonesia atau kepulauan Nusantara. Namun demikian dalam kaitan penelitian arkeologi batas wilayah kerja penelitian tersebut sesungguhnya hanyalah bersifat politis administratif, sehingga dalam konteks penelitian arkeologi, wilayah kerja Balai Arkeologi Bandung tersebut tetap harus diperlakukan sebagai bagian-bagian dari kawasan kebudayaan Nusantara. Fakta-fakta arkeologis dan juga etnografis daerah-daerah Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat memperlihatkan adanya fenomena-fenomena bentuk serta akar kebudayaan yang sama, di samping perbedaan-perbedaan spesifik, di antara ketiga daerah itu, serta juga dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara. Fenomena-fenomena itu antara lain tercermin pada bentuk-bentuk kebudayaan materi temuan-temuan arkeologi di ketiga daerah, yang secara tipologis mewakili pembabakan kebudayaan mulai dari jaman prasejarah.

Tinjauan Abstraksi tentang Proses Budaya

Sekalipun hanya berdasar kepada kuantitas data temuan yang masih belum banyak (Lihat, Suyono, 1984) dapat diperkirakan wilayah-wilayah Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat telah dihuni manusia sejak masa kebudayaan paleolitikum. Namun masih sulit untuk ditafsirkan, sekalipun kuat kemungkinannya terjadi, apakah pada suatu masa di masa lampau terjadi kesinambungan, sintesa kebudayaan ataupun simbiosis etnik antara kelompok manusia paleolitik, mesolitik yang telah ada lebih dulu dengan kelompok-kelompok masyarakat migrasi itulah yang dianggap membawa corak kebudayaan agraris animistik, neolitik, paleometalik dari tempat asalnya, yang kemudian mukim secara berlanjut di Sumatera.

Jawa serta Kalimantan. Atas dasar penafsiran itu jelas kiranya dapat dipahami, bahwa jauh sebelum kedatangan orang-orang India dan Cina, baik sebagai pedagang maupun penyebar agama (Hindu-Budha), telah ada komunitas-komunitas lokal (puak-puak) di Sumatra, Jawa dan Kalimantan, yang hidup dengan corak sera pola kebudayaan agraris animistik yang telah mapan. Komunitas-komunitas itu yang meninggalkan jejak-jejaknya dalam wujud artefak-artefak bergerak bercorak neolitik serta situs-situs megalitik.

Di masa-masa selanjutnya, juga berdasarkan fakta-fakta arkeologis serta kesejarahan, diketahui bahwa wilayah bahari di antara Lampung; Sumatera Selatan, Jawa Barat serta Kalimantan Barat sangat berperan penting dalam konteks proses budaya di bagian kawasan ini, maupun di Nusantara secara lebih luas. Setelah bertumbuhnya puak-puak di Sumatra, Jawa dan Kalimantan, perairan dari ketiga pulau tersebut secara berkesinambungan menjadi medan kontak budaya yang intensif antara penduduk lokal dengan bangsa-bangsa pendatang. Pada gilirannya kontak budaya itu berdampak terjadinya akulturasi kebudayaan yang bersifat prosesusual sebagai akibat terjadinya 'difusi kontekstual' kebudayaan dari luar yang datang melalui, serta berlangsung dalam, kegiatan perdagangan, keagamaan, maupun kolonisasi, terutama unsur-unsur kebudayaan yang datang dari India, Cina, Arab, serta kemudian Eropa. Bentangan waktu proses budaya pada babakan ini diketahui sebagai masa sejarah dari bagian kawasan Nusantara itu, yang diperkirakan dimulai di sekitar awal-awal masehi. Awal masa sejarah ini ditandai oleh berdirinya tatanan organisasi sosial politik berbentuk kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan Selatan dan Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Kerajaan-kerajaan tersebut hingga sejauh ini dapat disebut sebagai bentuk negara-negara teokratis Hinduistik yang paling awal di Nusantara. Terwujudnya sistem kerajaan itu, serta upaya-upaya penafsiran terhadap isi prasasti yang ditinggalkannya, acap kali mempengaruhi persepsi mengenai gambaran keseluruhan dari konfigurasi sosial pada masanya. Pencantuman gelar '*maharaja*' serta pernyataan karismatik '*panji segala raja*'; '*senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh*' yang terdapat dalam prasasti Purnawarman (Sumadio, 1984: 37-42) misalnya, dapat membawa kepada suatu persepsi seakan-akan di wilayah Jawa Barat kala itu telah ada kerajaan-kerajaan lain yang kemudian takluk dan berada di bawah 'kemaharajaan' Tarumanagara. Para ahli sejarah kuna jarang yang mempertimbangkan; menegaskan

tentang keberadaan komunitas-komunitas petani, yang bercorak kebudayaan agraris animistik, yang secara politis mandiri sebagai satu komunitas yang terpola sejak masa prasejarah. Komunitas-komunitas semacam itulah kiranya yang ada sebagai penghuni-penghuni tatar Jawa Barat sebelum berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Setelah berdirinya kerajaan itu logis jika komunitas-komunitas itu mendapat tekanan-tekanan secara politis karena potensi ekonominya. Sehingga mungkin pemimpin-pemimpin komunitas petani itulah yang harus ditafsirkan sebagai 'raja-raja' dalam konteks gelar 'maharaja': 'panji segala raja' dari Purnawarman.

Berdasar kepada data-data kontekstual baik temuan arkeologi maupun data empirik etnografis, bersamaan dalam kurun sejarah itu kebudayaan agraris animistik di daerah-daerah, terutama yang secara lokasional jauh dari pusat-pusat politik; pedalaman, tetap berlanjut. Dalam kaitan itu terjadi jarak kultural antara masyarakat di lingkungan elite; pusat kekuasaan politik dan masyarakat petani. dalam satu telaah antropologis terhadap masyarakat petani, Redfield (1982: 59) mengkategorikan elite sebagai masyarakat pendukung kebudayaan tradisi besar dan masyarakat petani sebagai pendukung kebudayaan tradisi kecil. Ciri kebudayaan tradisi besar, berdasarkan konsep Redfield, adalah adanya fenomena enkulturasi melalui belajar formal (*learning by schooling*) yang ditunjang oleh budaya tulisan (*literate society*). Sedangkan ciri-ciri kebudayaan tradisi kecil adalah pola enkulturasi secara praktis tanpa adanya pola belajar secara formal (*learning by doing*) serta tidak mendukung budaya tulisan (*illiterate society*). Pembagian besar totalitas masyarakat kerajaan agraris yang dibuat oleh Redfield itu, pada beberapa fenomena kebudayaan Indonesia kuna hingga ke masa-masa kesultanan, serta pada aspek-aspek sosial budaya serta sistem nilai tertentu yang masih tampak bertahan pada masyarakat-masyarakat di sekitar kesultanan hingga saat ini, memiliki relevansi yang cukup bernilai sebagai model bagi upaya-upaya kajian kebudayaan masa lampau Nusantara.

Konfigurasi sosial di masa kuna, yang pada kenyataannya juga berlanjut serta berkembang sebagai kerangka dasar konfigurasi sosial di masa-masa selanjutnya, dapat diasumsikan antara lain terdiri dari kaum agama dan intelektual, golongan penguasa dan birokrasi, golongan pengusaha, juragan, saudagar, pedagang, golongan pertukangan, juru, serta golongan petani yang merupakan golongan mayoritas. Konfigurasi sosial itu tentu harus menghasilkan, meninggalkan masing-masing

lingkungan domestik dari kehidupan kebudayaannya, yaitu ruang-ruang pemukiman serta ruang-ruang aktifitas kebudayaan lainnya, termasuk jagat benda kebudayaan didalamnya. Masing-masing unsur dari konfigurasi sosial itu tentu juga mendukung menghasilkan sistem budaya materi yang secara tipikal fungsional berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun demikian tetap dalam satu jaringan sistem kebudayaan; kemasyarakatan, di mana satu sama lain unsur saling berhubungan serta saling mempengaruhi.

Dalam konteks proses budaya secara makro ke masa-masa selanjutnya, terwujudnya tatanan organisasi sosial politik berbentuk kerajaan, kiranya dapat dipandang sebagai pemicu perkembangan peradaban, termasuk kebudayaan yang menopangnya, dari kawasan Nusantara umumnya. Perkembangan itu tentu saja tidak berjalan secara bersamaan di masing-masing daerah, akibat faktor-faktor historis dan geografis yang berbeda-beda. Faktor kondusif terjadinya perkembangan itu adalah keterbukaan kawasan Nusantara, yang terutama dimulai di bagian barat yaitu di sekitar pusat-pusat politik, bagi aktifitas-aktifitas ekonomi, politik, dan agama; ideologi dunia. Dalam prosesnya terjadi simbiosis-simbiosa etnik yang diikuti oleh sintesa-sintesa peradaban dan kebudayaan yang semakin rumit (*complicated*). Jarak kultural yang gamblang dalam dunia peradaban; kebudayaan lama, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh redfield, pada umumnya secara evolusi menjadi semakin kabur.

Penutup

Sebagaimana disepakati bersama bahwa arah dan tujuan umum penelitian arkeologi nasional adalah pada upaya-upaya untuk memahami, menjelaskan:

- a. Proses dan aliran migrasi nenek-moyang Bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak;
- b. Proses persentuhan Budaya Nusantara dengan tradisi-tradisi besar (Hindu, Buddha, Islam, dan Eropa);
- c. Adaptasi dan tumbuhnya budaya-budaya lokal yang diperkaya oleh masukan anasir-anasir budaya dari luar (*local genius*);
- d. Proses terjadi dan berlangsungnya diversifikasi kultural;
- e. Proses dan kelangsungan integrasi budaya dalam lingkup dan wawasan nasional.

(cf. Kusumohartono 1994: 40).

Faktor geografis, latar belakang sejarah serta temuan-temuan arkeologis selama ini dari masing-masing daerah wilayah kerja Balai Arkeologi Bandung sangat menentukan tema-tema atau permasalahan penelitian arkeologi masa mendatang, yang relevan, terkait kepada 5 butir tujuan penelitian arkeologi nasional yang terurai di atas. Secara asumsi dapat dikemukakan bahwa dalam konteks proses budaya, daerah Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta, mengalami masa perkembangan yang lebih dahulu (*advance*) di bandingkan dengan daerah Lampung dan Kalimantan Barat. Faktor-faktor apa saja yang membedakan masa perkembangan itu menarik untuk menjadi bahan diskusi serta permasalahan penelitian arkeologi di masa-masa mendatang.

Daftar Pustaka

Ave, Jan B. And Victor T. King, BORNEO

1986 *People of the Weeping Forest: Tradition and Change in Borneo*, National Museum of Ethnology, Leiden, Netherlands.

Daldjoeni, Drs. N.

1984 *Geografi Kesejarahan Indonesia*, Jilid II. Alumni, Bandung.

Falah, W. Anwar

1994 "Pengenalan Geografis Kawasan Lampung", Makalah dalam *Seminar Studi Kawasan*, Balai Arkeologi Yogyakarta.

Harris, Marvin

1983 *Cultural Anthropology*, Harper & Row, New York.

Jacob, Prof. Dr. Teuku

1992 "Manusia Malayu Kuno" dalam *Seminar Sejarah Malayu Kuno*, Pemda Tkt. I Jambi.

Kusumohartono, Bugie

1994 "Penelitian Arkeologi Indonesia Pasca UU Nomor 5 Tahun 1992", *Berkala Arkeologi*, Tahun XIV No. 1 Mei, 1994, Balai Arkeologi Yogyakarta.

Redfield, Robert

1982 *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, (terjemahan Daniel Dhakidae) Jakarta: C.V. Rajawali.

Sumadio, Bambang (ed.)

1984 *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soejono, R.P.

1984 *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.

PEMBERITAAN ARKEOLOGI DI SURATKABAR HARIAN STUDI KASUS PADA BERITA-BERITA HARIAN UMUM "SUARA PEMBARUAN" SELAMA TAHUN 1995

Berthold DH Sinaulan

1. Pendahuluan

1. Berita

Bila dibaca judul makalah ini "Pemberitaan Arkeologi di Surat kabar Harian", maka ada beberapa hal yang perlu didefinisikan. Pemberitaan berasal dari kata 'berita'. Menurut Kurniawan Junaedhie dalam bukunya *Ensiklopedia Pers Indonesia* (1991: 26), berita adalah: "*Laporan pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi (aktual) yang disampaikan oleh wartawan dalam media massa*"

Berkaitan dengan berita itu, ada hal penting yang juga perlu disadari, yaitu pemuatan suatu berita harus mempertimbangkan nilai berita tersebut. Standar nilai berita, tentu saja berbeda antara media massa satu dengan lainnya. Namun secara umum, dapat disebutkan bahwa berita yang layak muat mengandung nilai berita antara lain:

- a. Ketepatan waktu (*timeliness*), aktual. Semakin cepat disiarkan, sebuah berita digolongkan bernilai berita tinggi.
- b. Kedekatan (*proximity*), umpama, berita tentang musibah di tanah air sendiri, niscaya akan bernilai berita tinggi daripada musibah yang terjadi di India. Dalam perkembangannya, unsur ini juga menyangkut emosi, sehingga meski musibah itu terjadi di mancanegara, jika berita itu menggugah emosi pembaca, juga bisa disebut bernilai berita.
- c. Kemasyhuran (*prominence*). Berita-berita yang menyangkut pautkan nama-nama orang masyhur biasanya juga bernilai berita tinggi. Di sini berlaku hukum klasik, *names makes news* atau nama membuat berita.
- d. Akibat (*consequence*). Berita yang diduga berdampak luas, biasanya bernilai berita tinggi.
- e. Manusiawi (*human interest*). Pada akhirnya, berita-berita yang menyentuh unsur-unsur kemanusiaan, galibnya bernilai berita tinggi, berita-berita yang menyentuh unsur-unsur kemanusiaan, galibnya

bernilai berita tinggi, karena diminati banyak orang (Juniaedhi 1991: 175--6).

2. Arkeologi

Mengenai kata 'arkeologi' yang terdapat pada judul makalah ini, tidak akan diidentifikasi secara khusus dan terinci, mengingat forum penyampaian makalah ini adalah forum para ahli arkeologi. Jadi istilah arkeologi, cukup dikutip dari skripsi sarjana penulis, yang menyebutkan, secara singkat arkeologi dapat dijelaskan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari dan berusaha menggambarkan kembali masa lalu manusia, baik sebagai makhluk biologis, sosial, maupun budaya. Usaha untuk mempelajari masa lalu manusia itu terutama dilakukan dengan mempelajari benda-benda yang pernah memainkan peranan dalam kehidupan manusia masa lalu (Sinaulan 1985).

3. Surat kabar Harian

Istilah 'suratkabar harian', sebagaimana didefinisikan Kurniawan Junaedhi (1995: 256) adalah: *"sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa tercetak, berupa lembaran berisi berita-berita, karangan-karangan dan iklan, dan diterbitkan secara berkala, bisa harian, mingguan, bulanan, serta diedarkan secara umum. Isinya pun harus aktual. Juga bersifat universal, maksudnya pemberitaannya harus bersangkut-paut dengan manusia dari berbagai golongan dan kalangan. Menurut jenisnya dibagi, surat kabar harian dan surat kabar berkala*

4. Harian Umum Suara Pembaruan

Istilah 'Harian Umum Secara Pembaruan' sebagaimana tertera pada subjudul makalah ini, adalah nama surat kabar harian yang terbit di Jakarta pertama kali pada tanggal 4 Februari 1987. Surat kabar tersebut diterbitkan oleh PT Media Interaksi Utama dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 224/SK/Menpen/SIUPP/ A.7/1987 tanggal 29 Januari 1987. Suara Pembaruan yang dijadikan bahan studi kasus ini, walaupun tidak bisa digenerasikan kepada semua penerbitan surat kabar harian, namun setidaknya dapat dijadikan gambaran sepintas. Sebagaimana dijelaskan Wakil Pemimpin Redaksi *Suara Pembaruan Herald Tidar*¹⁾, pelanggan harian ini terdapat di Indonesia dan sejumlah

pelanggan lain di luar negeri. Tiras *Suara Pembaruan* berdasarkan perhitungan akhir Desember 1995 adalah sekitar 360.000 eksemplar. Dikatakan lagi oleh Herald Tidar, berdasarkan penelitian Survey Research Indonesia (SRI), sejak tahun 1987, tiras *Suara Pembaruan* terus meningkat. Dari segi tiras, *Suara Pembaruan* termasuk tiga besar surat kabar harian nasional yang beredar luas di seluruh Indonesia. Masih menurut SRI, seperti dikutip Herald Tidar, pembaca *Suara Pembaruan* adalah golongan berpenghasilan menengah ke atas dengan mayoritas pendidikan SLTA ke atas. Pembaca harian ini sebagian besar mempunyai daya beli yang tinggi, dan profesinya terbesar adalah taraf pengambil keputusan di bidang pemerintahan dan swasta, serta kalangan akademis dan mahasiswa. Selebihnya adalah pekerja kerah putih (*white collar*).

Untuk melengkapi gambaran mengenai *Suara Pembaruan*, penulis juga ingin memberikan informasi singkat, bahwa dalam operasional sehari-hari, para wartawan dibagi dalam dua bagian besar. Satu adalah Bidang Perolehan dan satu lagi Bidang Penyuntingan. Bidang Perolehan bertugas mencari dan mengumpulkan berita, sedangkan Bidang Penyuntingan bertugas melakukan penyuntingan terhadap berita-berita yang sudah dihasilkan Bidang Perolehan. Masing-masing bidang juga berhak memberikan masukan bagi bidang lainnya. Selain itu, para wartawan juga dibagi dalam sejumlah *desk*, yang bisa dianggap sebagai spesialisasinya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, seorang wartawan dari *desk* satu ditugaskan atau mengerjakan peliputan bidang *desk* lainnya. *Desk* di *Suara Pembaruan* dibagi menurut perwilayahan (*regional*), yaitu Desk Luar Negeri, Desk Kota dan Desk Daerah. Lalu ada pula pembagian desk berdasarkan profesi atau keahlian tertentu, yaitu Desk Politik, Desk Hukum, Desk Hankam, Desk Kesra dan Iptek, Desk Olahraga, Desk Ekonomi, Desk Budaya dan Pariwisata, serta Desk Opini dan Editorial. Untuk bidang perolehan maupun penyuntingan, ada redaktur masing-masing. Hanya untuk bidang penyuntingan, secara khusus ada penyunting halaman satu atau halaman depan.

2. Metode Pembahasan

Dalam makalah ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai pemberitaan arkeologi yang dimuat di surat kabar harian. Sebagai studi kasus, diambil surat kabar harian *Suara Pembaruan* selama tahun 1995. Cara atau metode pembahasan yang digunakan adalah analisis isi.

Seperti disebutkan dalam buku yang disunting Don Michael Flournoy (1989: 12), analisis berita adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Tidak seperti mengamati secara langsung perilaku orang, atau meminta orang untuk menjawab skala-skala, atau mewawancarai orang, sang peneliti mengambil komunikasi-komunikasi yang telah dihasilkan orang (dalam hal ini sebagaimana yang termuat di surat kabar-penulis) dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi-komunikasi itu. Jadi di sini penulis mencoba mengamati isi berita pada surat kabar harian *Suara Pembaruan* selama tahun 1995. Dalam pengamatan itu, penulis membagi dua bagian isi surat kabar tersebut.

1. Halaman Satu

Pertama, adalah isi halaman satu atau halaman depan, yang menurut Kurniawan Junaedhi (1991: 85) merupakan halaman pertama surat kabar atau setidaknya halaman paling depan pada majalah. Memuat berita-berita utama atau yang dianggap penting. Di sini akan dicoba diamati, apakah berita-berita arkeologi bisa memenuhi syarat masuk ke halaman satu, yang benar-benar diseleksi pemuatannya. Sebagai gambaran, berita halaman satu di *Suara Pembaruan* antara lain ditentukan melalui suatu rapat di pagi hari. Mengingat surat kabar tersebut merupakan penerbitan sore hari, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pemuatan berita, disiapkan sebelum tibanya *dead line*.²⁾ pukul 11.30 WIB. Rapat tersebut berlangsung mulai pukul 07.00 sampai pukul 08.00 WIB. Biasanya disebut Rapat Perencanaan, atau dalam Bahasa Inggris disebut *budget meeting*. Pada rapat itu, tiap-tiap penyunting menyampaikan laporan mengenai berita yang sudah ada di *basket* komputer masing-masing. Terutama mengenai berita yang akan dimuat pada halaman masing-masing.

Selain melaporkan berita-berita yang akan diturunkan di halaman yang 'dijaga' masing-masing, para penyunting juga menawarkan berita yang mereka anggap penting untuk ditempatkan di halaman satu atau halaman depan. Biasanya berita yang ditawarkan itu, dibahas lagi oleh peserta rapat, sebelum disetujui³⁾. Mengenai berita-berita arkeologi, biasanya datang dari Desk Kesra dan Iptek atau dari Desk Daerah. Desk yang disebutkan terakhir, menampung berita dan tulisan dari para koresponden daerah yang terdapat di semua ibu kota provinsi dan

beberapa kota lainnya di Indonesia. Beberapa berita arkeologi lainnya, dapat pula datang dari Desk Kota, yaitu yang menangani berita-berita seputar Jabotabek. Khususnya bila menyangkut pemberitaan arkeologi di wilayah Jabotabek. Desk Luar Negeri dapat juga menyumbang berita-berita arkeologi dari mancanegara, yang diperoleh melalui berita-berita wire dari *Associated Press* (AP), *Agence France Press* (AFP) dan *Reuters* untuk berita berbentuk tulisan maupun foto. Di dalam halaman satu *Suara Pembaruan*, berita yang ada dibagi atas:

a. Berita Utama (*Headlines News*)

Berita utama adalah berita yang dianggap sangat layak dipasang di halaman depan, dengan judul yang merangsang perhatian dan menggunakan tipe huruf relatif lebih besar. Pendeknya, berita istimewa (Junaedhi 1991). Secara lebih sederhana, berita utama adalah berita yang dianggap paling tinggi nilai beritanya dibandingkan berita-berita lain yang disetujui untuk dimuat di halaman satu.

b. Berita Lain

Berita lain adalah sebutan penulis untuk mendefinisikan berita-berita yang dimuat di halaman satu, selain dari berita utama. Berita lain ini ada yang terdiri dari berita 4 kolom atau lebih, 3 kolom, 2 kolom, dan walaupun jarang berita 1 kolom. Terkadang ada pula analisis berita, yaitu tulisan mendalam dari seorang penulis, baik wartawan sendiri maupun dari penulis luar yang diminta khusus oleh pihak redaksi, untuk menanggapi isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat.

c. Kaki Halaman Satu

Kaki Halaman Satu adalah istilah untuk menunjukkan berita yang diletakkan di bagian bawah halaman satu, biasanya di bagian tengah bawah yaitu di kolom 3 sampai kolom 7. *Suara Pembaruan* membagi halamannya dalam 9 kolom dari atas ke bawah, yang tiap kolom besarnya sekitar 4,2 cm⁴). Berita yang dimasukkan di Kaki Halaman Satu adalah berita berupa laporan perjalanan jurnalistik atau laporan investigasi seperti pengungkapan kasus kriminalitas.

d. Boks

Boks adalah istilah untuk menunjukkan berita yang dimuat dalam boks, yaitu berita yang di sekelilingnya diberi garis hitam sehingga seakan-akan berita itu berada di dalam boks. Maksudnya agar berita itu kelihatan lebih menonjol dan mendapat perhatian pembaca. Biasanya berita boks yang dimuat di halaman satu *Suara Pembaruan* adalah yang tinggi nilai berita kemanusiaan (*human interest*)nya. Selain itu, halaman satu *Suara Pembaruan* juga memuat boks berupa 'Titik Pandang' yang dimuat pada setiap edisi hari Senin. Titik Pandang berupa tulisan yang memuat pandangan Pemimpin Umum *Suara Pembaruan* terhadap suatu masalah.

e. Foto

Di surat kabar dan media massa cetak umum lainnya, foto sebenarnya juga merupakan berita. Bahkan dibandingkan berita berbentuk tulisan, foto memiliki kelebihan, karena berbentuk gambar yang dapat langsung dicerna pembaca. Sebagaimana juga berita tulisan, foto yang dimuat di halaman satu adalah yang dianggap paling tinggi nilai beritanya. Foto ini pun besarnya berbeda, ada yang 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom atau foto 1 kolom. Khusus untuk foto yang benar-benar istimewa, dapat pula lebih dari 4 kolom besarnya.

2. Halaman Lain

Selain halaman satu, yang juga akan diamati penulis adalah halaman lainnya di *Suara Pembaruan*. Di sini akan dibatasi berupa berita (termasuk foto berita), tajuk rencana dan surat pembaca. Dalam metode analisis berita, berita dianggap mewakili baik pihak surat kabar maupun pembaca. Sedangkan tajuk rencana yang berisi visi atau opini suatu penerbitan pers bersangkutan, dianggap mewakili pandangan pihak surat kabar⁵⁾. Sementara surat pembaca yang di *Suara Pembaruan* disebut 'Suara Pembaca', dianggap mewakili pandangan pembaca. Seperti diketahui, surat pembaca adalah rubrik yang disediakan pihak penerbitan pers bagi pembacanya, untuk mengeluarkan pendapat, komentar, protes, pujian maupun simpati, bahkan pertanyaan, tentang suatu hal.

Memang surat pembaca yang dimuat terlebih dulu diseleksi pihak redaksi, sehingga sedikit banyak sejalan dengan gaya penerbitan pers

bersangkutan. Tetapi biar begitu, surat pembaca tetap mewakili pembaca dengan segala permasalahannya.

3. Pemilahan dan Analisis

Dari pengamatan terhadap penerbitan Suara Pembaca selama tahun 1995, penulis akan melakukan pemilahan dalam bentuk tabulasi. Kemudian akan dilakukan analisis untuk menjawab beberapa pertanyaan:

- Apakah berita-berita arkeologi cukup sering dimuat di *Suara Pembaruan* selama tahun 1995?
- Apakah garis besar isi berita-berita arkeologi yang dimuat di *Suara Pembaruan* selama tahun 1995?
- Apakah ada berita-berita arkeologi yang dimuat di halaman 1 *Suara Pembaruan* selama tahun 1995?
- Apakah ada tajuk rencana *Suara Pembaruan* selama tahun 1995 yang memuat masalah arkeologi? Kalau ada, secara garis besar isinya menyangkut hal apa?
- Apakah ada surat pembaca di *Suara Pembaruan* selama tahun 1995 yang memuat masalah arkeologi? Kalau ada, secara garis besar isinya menyangkut hal apa?

3. Tabulasi Berita Arkeologi di Suara Pembaruan Selama Tahun 1995

1. Halaman Satu

Bulan	BU	4K >	3 K	2 K	1 K	Boks	Kaki	Foto
Januari	-	-	-	-	-	-	2	-
Februari	-	15	-	-	-	-	-	-
Maret	-	15	-	-	-	1	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	2	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	1	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	1	-	-	-	-	1
September	-	-	-	-	-	1	-	-
Oktober	-	-	-	15	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-



Suasana Pembukaan Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII di Cipanas

Keterangan:

BU = Berita Utama
atau lebih

3 K = Bertia 3 kolom

1 K = Berita 1 kolom

4 K> = Berita 4 kolom

2 K = Berita 2 kolom

2. Halaman Lain

Bulan	4 K >	3 K	2 K	1 K	Srtn	Info	Foto	TR	SP
Januari	5	1	3	-	4	6	8	-	-
Februari	6	3	2	-	1	2	2	-	-
Maret	6	2	2	-	2	3	3	-	-
April	3	1	1	-	1	1	1	-	-
Mei	2	2	-	-	-	1	8	1	-
Juni	1	1	-	1	2	-	1	-	1
Juli	1	1	-	1	2	-	1	-	1
Agustus	2	1	1	-	1	-	2	-	-
September	4	1	2	-	-	1	2	-	-
Oktober	6	3	2	-	-	2	5	-	2
November	1	4	2	2	-	-	1	-	-
Desember	5	1	1	-	-	-	2	-	-

Keterangan:

Srtn = Sorotan, adalah rubrik khas *Suara Pembaruan* yang berada di posisi halaman paling tengah (*center spread*) yang isinya menyoroti hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, atau tema khusus yang dianggap layak disorot oleh pihak redaksi. Sampai dengan tahun 1995, isi halaman sorotan dibagi sesuai topik: Minggu - Olahraga, Selasa - Regional (berita-berita daerah), Rabu - Seni Budaya, Kamis - Bisnis Keuangan, Sabtu - Gaya Wisata/Gaya Hidup.

Khusus dari tanggal 1 Juli sampai dengan 19 Agustus 1995, rubrik Sorotan diganti dengan rubrik 50 Tahun Indonesia Merdeka.

Info = Khusus untuk hari Senin dan Jumat, halaman tengah *Suara Pembaruan* diisi dengan rubrik Info. Untuk Senin - Info Elektronik, yang membahas berbagai hal berkaitan dengan elektronika termasuk komputer, sedangkan Jumat - Info Properti,

yang membahas perumahan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan desain interior serta arsitektur. Sama seperti rubrik Sorotan, dari tanggal 1 Juli sampai dengan 19 Agustus 1995, diganti dengan rubrik 50 Tahun Indonesia Merdeka.

TR = Tajuk Rencana

SP = Suara Pembaca

4. Analisis Hasil Tabulasi

Dari hasil tabulasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa jumlah pemberitaan arkeologi masih sangat kurang. Hal itu dapat dibandingkan dengan jumlah rata-rata berita yang dimuat di *Suara Pembaruan* setiap harinya. Secara singkat dapat dikatakan, di halaman satu *Suara Pembaruan* berita yang dimuat berkisar antara 8 sampai 10 berita, ditambah sekitar 2 foto, sedangkan di halaman lainnya bila dijumlahkan, untuk terbitan 16 halaman berkisar antara 60 - 75 berita ditambah 5 - 10 foto, atau untuk terbitan 20 halaman berkisar antara 75 - 100 berita ditambah sekitar 10 - 15.

Berita-berita arkeologi yang dimuat, dapat dilihat bahwa cakupan berita yang dimuat biasanya berkaitan dengan seni budaya dan pariwisata. Termasuk yang cukup sering diterbitkan adalah mengenai permuseuman dan berbagai aspeknya. Seperti misalnya rubrik Sorotan yang membahas "Perilaku Orang Tengger" (*Pembaruan* 7 Januari 1995). Mengenai rubrik sorotan, pembahasan yang berkaitan dengan arkeologi terdapat di hari Rabu (topik Seni Budaya), dan di hari Sabtu (topik Gaya Hidup/Gaya Wisata). Beberapa di antara judul yang bisa disebutkan antara lain, "Pengkajian Kerajaan Sriwijaya Sangat Kurang" (*Pembaruan* 4 Januari 1995), "Khazanah Budaya Asli Kaltim" (*Pembaruan* 25 Maret 1995), dan "Museum Sebagai Monumen Bangsa Perlu Berbenah Diri" (*Pembaruan* 30 Agustus 1995).

Dari rubrik Info, sebagian besar berita arkeologi yang dimuat selama tahun 1995 di *Suara Pembaruan* adalah dalam rubrik Info Properti. Biasanya, berupa uraian deskriptif mengenai bangunan kuno dan bersejarah, dikaitkan dengan upaya pelestarian bangunan tersebut dan keindahan arsitektural bangunan kuno yang bisa ditiru untuk bangunan-bangunan masa kini. Satu-satunya berita arkeologi yang dimuat di Info Elektronik selama tahun 1995, adalah mengenai "Penggunaan Komputer Untuk Arkeologi" (*Pembaruan* 30 Oktober 1995), yang sayangnya dimuat

dua kali, karena kesalahan teknis⁷⁾. Khusus untuk berita arkeologi dari luar negeri, biasanya menyangkut penemuan dan penjualan benda purbakala, atau penggalian (ekskavasi) situs yang dilakukan di berbagai negara. Lebih khusus lagi, biasanya tersebut berlangsung di kawasan Timur Tengah (Mesir, Israel, Irak dan sekitarnya), Asia Timur (Cina), dan beberapa di daratan Eropa. Sedangkan untuk foto yang dimuat, bisa dibilang hampir semua adalah foto bangunan kuno bersejarah. Sisanya adalah foto artefak atau benda purbakala lainnya.

1. Halaman Satu

Dari tabulasi yang ada, dapat pula dilihat bahwa berita arkeologi di halaman satu masih sangat kurang. Dibandingkan dengan berita politik, ekonomi, dan kriminalitas, berita-berita arkeologi agaknya masih dianggap kurang mempunyai nilai berita untuk 'dijual' di halaman satu.

Bahkan jelas-jelas tak ada berita arkeologi yang menjadi berita utama di halaman satu, sedangkan berita arkeologi 4 kolom atau lebih, hanya dimuat di halaman sambungan dari halaman satu tersebut.

Berdasarkan pengamatan, berita-berita yang dimuat di halaman satu (dan juga halaman lainnya), pada umumnya berita arkeologi yang dianggap mempunyai nilai berita untuk 'dijual' adalah yang menyangkut penemuan kembali suatu situs atau benda purbakala. Di samping itu, berita yang menyangkut kasus (hal negatif yang perlu diperbaiki/diatasi) mengenai situs atau benda purbakala, juga dianggap bernilai berita tinggi. Contoh berita-berita semacam itu, misalnya pada *Suara Pembaruan* tanggal 16 Maret 1995, boks di halaman satu memuat mengenai "Fosil Telur Dinosaurius Ditemukan". Demikian pula ada berita di boks halaman 1 mengenai "Makam Terbesar Firaun Ditemukan di Mesir" (*Pembaruan* 16 Mei 1995), serta "Pistol VOC dan Kerangka Ikan Paus Kini di Museum Siwalima" (*Pembaruan* 19 Mei 1995).

Berita arkeologi dapat pula dimuat di halaman satu, bila kejadiannya dalam kaitan dengan tokoh terkemuka, misalnya, "Lima Jam di Borobudur" (*Pembaruan* 25 Agustus 1995), yang berisikan berita kunjungan Ratu Beatrix dari Belanda ke Candi Borobudur.

Khusus untuk kaki halaman satu, ternyata selama tahun 1995, *Suara Pembaruan* juga sangat kurang memuat mengenai permasalahan arkeologi. Hanya ada tiga kali kaki halaman satu, memuat mengenai arkeologi. Misalnya "Vatikan, Khazanah Seni dan Budaya" (*Pembaruan* 4 Januari 1995), "Peninggalan Purbakala di Kotagede" (*Pembaruan* 13 Januari

1995), dan “Debu Membalut Koleksi Museum Keramik” (*Pembaruan* 7 Juni 1995).

2. Tajuk Rencana

Untuk Tajuk Rencana, dilihat dari jumlah yang masuk tabulasi selama tahun 1995, memang amat sedikit yang berkaitan dengan arkeologi. Padahal kalau dihitung secara rata-rata (tanpa menghitung hari Minggu yang tanpa tajuk rencana dan hari libur), maka selama setahun seharusnya ada sekitar 300 hari kerja dikali dua tajuk rencana⁸⁾. Dari hanya dua tajuk rencana selama setahun, yang berkaitan langsung dengan arkeologi hanya satu, yaitu “Borobudur Warisan Budaya Dunia Terancam?” (*Pembaruan* 24 Mei 1995). Satu lagi, “Minat Baca Ada, Tapi Lemah Daya Beli” (*Pembaruan* 1 Juni 1995), walaupun tidak secara langsung, ada bagiannya yang menyinggung pula arkeologi. Di alinea awal tajuk rencana itu disebutkan: “*Sudah sejak abad ke-8 nenek moyang kita menulis ‘pustaka terbesar di dunia’, yakni Candi Borobudur. Keajaiban dunia itu merupakan comic strip terpanjang di dunia yang mengisahkan kehidupan Buddha Gautama*” Kemudian dalam tajuk rencana itu disinggung pula mengenai sejumlah pustaka yang biasa dipelajari oleh para arkeolog Indonesia, yaitu *Nagarakrtagama*, *Pararaton*, dan *Arjunawiwaha*. Seperti juga di halaman satu, tajuk rencana *Suara Pembaruan* selama tahun 1995, terbanyak mengulas masalah politik dan ekonomi serta aspek-aspeknya.

3. Surat Pembaca

Dari pengamatan, surat pembaca di *Suara Pembaruan* umumnya menyangkut keluhan atau pertanyaan masyarakat mengenai hal-hal yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, misalnya mengenai masalah pangan, perumahan, telepon, listrik, air, transportasi, dan beberapa juga menyangkut masalah politik. Untuk surat pembaca yang berkaitan dengan arkeologi, jumlahnya terbatas sekali. Padahal jumlah surat pembaca di *Suara Pembaruan* cukup banyak. Berkisar antara 4 sampai 5 surat pembaca setiap harinya (termasuk hari Minggu). Surat pembaca yang dimuat di *Suara Pembaruan* dan menyangkut masalah arkeologi, isinya pun beragam. Misalnya, “50 Tahun Negeriku, 468 Tahun Kotaku” (*Pembaruan* 13 Juni 1995), isinya memasalahkan istilah

negeriku, yang menurut si penulis surat pembaca surat ribuan tahun usianya.

Kemudian, berkaitan dengan ramai-ramainya pemberitaan UNESCO akan mencabut Candi Borobudur dari daftar warisan budaya dunia, muncul dua surat pembaca (*Pembaruan* 19 Juni dan 30 Juni 1995). Ada juga surat pembaca yang memasalahkan kondisi museum di Indonesia, lewat judul "Museum Kita Memprihatinkan" (*Pembaruan* 12 Juli 1995). Surat pembaca lainnya mempersoalkan "Gerbagn Penjajah di Jakarta Kota" (*Pembaruan* 7 Oktober 1995), yang menyangkut mengenai bangunan kuno bersejarah dari masa Hindia-Belanda. Ada lagi surat pembaca yang menanyakan mengenai keturunan dan asal-usul nenek moyangnya, yaitu "Informasi Tentang Voigt dan Djinio" (*Pembaruan* 9 Oktober 1995), yang menurut penulisnya datang ke Batavia tahun 1836.

5. Penutup

Hasi tabulasi yang dilakukan, memperlihatkan jelas selama tahun 1995, berita-berita dan tulisan mengenai arkeologi yang dimuat di Suara Pembaruan, sedikit sekali jumlahnya. Kesan sedikitnya pemberitaan arkeologi juga dengan mudah dilihat di surat kabar harian nasional lainnya, walaupun dalam jumlah yang bervariasi antara satu dengan lainnya.

Sedikitnya jumlah pemberitaan arkeologi itu, sebenarnya merupakan refleksi dari kenyataan di masyarakat, bahwa berita-berita arkeologi memang belum terlalu dianggap penting. Oleh karena itu, memang tidak bisa diharapkan akan adanya pemberitaan arkeologi yang luar biasa banyaknya di suatu surat kabar harian nasional.

Namun mungkin bisa diusahakan agar setidaknya sebulan sekali ada satu berita arkeologi yang dimuat di halaman satu, serta beberapa di halaman lainnya surat kabar harian. Ada beberapa saran yang dapat diajukan agar usaha mempebanyak berita-berita arkeologi dapat tercapai:

- a. kalangan arkeologi, termasuk Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), dapat meningkatkan lobi dengan para wartawan yang berlatar belakang pendidikan arkeologi atau mempunyai minat terhadap arkeologi, serta para redaktur dalam suatu surat kabar harian yang menangani bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesra. Caranya dengan memberikan informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan atau hal-hal lain dalam arkeologi yang dianggap penting untuk diberitakan.

- b. dalam kaitan dengan butir a, lembaga-lembaga arkeologi termasuk IAAI, diharapkan dapat lebih sering memberikan informasi mengenai kegiatan atau hal-hal lain dalam arkeologi yang dianggap penting untuk diberitakan, baik melalui siaran pers, pertemuan tatap muka (misalnya mengundang kalangan wartawan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan arkeologi), dan cara lain yang dianggap efektif dan efisien,
- c. memanfaatkan tokoh-tokoh arkeologi yang dikenal masyarakat luas untuk memberikan keterangan pers, misalnya menanggapi kasus arkeologi, lingkungan hidup, kesejarahan dan sejenisnya,
- d. ditunggu usulan terbaik dari Anda, para arkeologi sekalian.

Catatan Kaki

- 1) Wawancara tanggal 14 Februari 1996 di Ruang Redaksi Suara Pembaruan, antara pukul 11.15 - 11.30 wib.
- 2) Dalam Bahasa Indonesia disebut 'batas waktu', berarti batas waktu terakhir naskah berita dapat dipertimbangkan pemuatannya dalam penerbitan pers. Mengenai batas waktu bagi masing-masing penerbitan berbeda-beda, tergantung sifat dan periodisasinya ... Tapi batas waktu ini tidak selalu kaku. Untuk sebuah berita bernilai berita tinggi, batas waktu bisa dikendorkan (Junaedhi 1991: 25).
- 3) Bila sudah disetujui diterima di halaman 1 dan disunting oleh penyunting halaman 1, bisa saja dimuat di halaman 1 atau ditempatkan di halaman sambungan dari berita-berita halaman 1. Yaitu halaman 15 bila terbit 16 halaman, atau halaman 10 bila terbit 20 halaman.
- 4) Mulai 24 Juli 1995, untuk Kaki Halaman Satu, dari jumlah 5 kolom biasa itu (kolom 4 sampai 7), dijadikan 4 kolom dengan jumlah lebar yang sama dengan 5 kolom biasa.
- 5) Lebih lanjut mengenai tajuk rencana, silakan baca pula Siagian 1986.
- 6) Jumlah itu termasuk tulisan opini, tetapi tidak termasuk berita-berita pendek, yang biasanya hanya terdiri dari 5 sampai 7 baris, yang dimuat di rubrik "Singkat Ekonomi", "Lintas Nusantara", "Singkat Luar Negeri", dan "Varia Ibukota".
- 7) Satu lagi dengan judul yang sama dimuat di *Suara Pembaruan* 13 November 1995.
- 8) Setiap hari *Suara Pembaruan* memuat dua tajuk rencana, kecuali hari Minggu yang tanpa tajuk rencana.

Daftar Pustaka

Flournoy, Don Michael

1989 *Analisa Isi Surat kabar-surat kabar Indonesia*. Edisi terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Junaedhi, Kurniawan

1991 *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Siagian, Sabam

1986 "Fungsi Tajuk Surat Kabar", dalam *Persuratkabaran Indonesia Dalam Era Informasi Perkembangan, Permasalahan dan Perspektifnya*. Kumpulan Tulisan Menyambut 25 Tahun Harian Umum Sinar Harapan. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Sinaulan, Derthold Dirk Hendrik

1985 "Nagarakrtagama Sebuah Tinjauan Jurnalistik". Skripsi Sarjana. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Lampiran:

Lima Cara yang Bisa Dilakukan Arkeologi Membantu Memperbanyak Berita Arkeologi di Surat kabar Harian

1. Adakan pendekatan sebaik-baiknya dengan para redaktur di surat-kabar harian, terutama yang mempunyai kewenangan menentukan masuk tidaknya suatu berita, baik di halaman satu maupun halaman lainnya. Pendekatannya jangan dengan 'amplop' (baca: uang), tetapi memberikan kemudahan. Misalnya, jangan pelit memberikan informasi mengenai berbagai kegiatan arkeologi. Dalam memberikan informasi juga sebaiknya jangan menerapkan berita (tulisan) eksklusif, hanya untuk satu surat kabar harian saja. Kalau untuk foto berita, bila menyangkut kegiatan yang sama, memang bisa saja dibedakan antara yang diberikan kepada surat kabar harian satu dengan lainnya. Agar yang termuat tidak semua 'foto seragam'.
2. Lembaga-lembaga arkeologi, termasuk Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, agar lebih sering membuat siaran pers. Kalau perlu, diadakan kursus singkat mengenai tata cara pembuatan siaran pers. Jangan ragu membuat judul dalam siaran pers yang kelihatannya 'bombastis', sebab yang diperlukan adalah judul yang menarik. Perlu diingat, setiap hari siaran pers yang masuk ke redaksi surat kabar harian dapat puluhan jumlahnya. Jadi kalau judulnya sudah tidak menarik, jangan heran bila tempatnya hanya keranjang sampah. Dari pada berjudul "Pertemuan Ilmiah Arkeologi Diselenggarakan lagi", kenapa tidak membuat judul "Ratusan Arkeologi Indonesia Berkumpul".
3. Berkaitan dengan butir 2, usahakan agar setiap kegiatan arkeologi dapat diberitakan atau dikirimkan informasinya ke redaksi surat kabar-surat kabar harian. Carilah hal yang paling menarik dari kegiatan itu. Bayangkan bahwa Anda adalah masyarakat awam yang ingin tahu mengenai arkeologi. Karena itu, usahakan menghindari sedapt mungkin istilah arkeologi yang tak dikenal. Kalau pun terpaksa menggunakan istilah arkeologi, beri pula keterangan dalam bahasa sehari-hari.
4. Gunakan isu-isu nasional yang sedang hangat dibicarakan, untuk memberikan tanggapan yang berkaitan dengan arkeologi. Kalau memungkinkan, yang memberikan tanggapan adalah tokoh-tokoh

arkeologi yang dikenal masyarakat luas. Misalnya, ketika terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi, kenapa tidak mengungkap sejarah bahwa gunung itu juga pernah meletus ratusan tahun silam dan 'mengubur' beberapa bangunan yang kini kita kenal sebagai situs arkeologi.

5. Kalau usaha butir 1 sampai 4 gagal, jangan putus asa. Lakukan lagi, atau siapa tahun Anda mempunyai cara baru yang lebih efektif. Coba saja.

PERANAN BALAI ARKEOLOGI TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI ARKEOLOGI KEPADA MASYARAKAT

Budi Wiyana

1. Pendahuluan

Menurut SK Mendikbud No. 0290/0/1992 pasal (1) disebutkan bahwa Balai Arkeologi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Arkeologi (Balar) mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang arkeologi di wilayah kerjanya (pasal 2).

Disamping itu, Balar mempunyai lima fungsi yaitu: (a) melakukan pengumpulan perawatan dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi, (b) melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi, (c) memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi, (d) melakukan bimbingan edukatif kultural masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi, dan (e) melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga balai (pasal 3).

Kelima fungsi Balar tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ke dalam (a, b, dan e) serta fungsi ke luar (c dan d). Fungsi ke luar berhubungan erat dengan penyampaian informasi arkeologi. Informasi arkeologi ini sangat penting sebagai bukti eksistensi dunia arkeologi Indonesia di tengah-tengah ilmu lain dalam perannya terhadap pembangunan bangsa.

Dunia arkeologi Indonesia selama ini lebih banyak menjadi pembicaraan ke dalam antar para arkeolog daripada menjadi pembicaraan masyarakat. Dunia arkeologi Indonesia harus lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat, agar arkeologi dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan bangsa.

2. Informasi Arkeologi

Informasi secara garis besar dapat diartikan sebagai data yang telah diolah dan mempunyai arti. Menurut definisi tersebut, informasi arkeologi

adalah data arkeologi yang telah diolah dan mempunyai arti. Informasi disajikan pada tahap penyajian data, setelah melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Data dan bahan informasi tentang arkeologi diperlukan oleh banyak pihak. Dari data yang dimanfaatkan oleh pihak lain itu dapat menunjukkan betapa arkeologi dapat berperan dalam pembangunan. Peranan atau sumbangan arkeologi dalam pembangunan antara lain tergantung pada keberhasilan para arkeolog dalam mengembangkan ilmu arkeologi sebagai proses dan sejauh mana memperoleh ilmu sebagai produk (Yoesoef 1980). Besarnya sumbangan arkeologi tergantung juga dari keberhasilan penggarapan aspek-aspek arkeologi yang lain, seperti penelitian, perlindungan, pemugaran, pemeliharaan, penginformasian, dll. (Soekatno 1985: 1250).

Penggarapan aspek-aspek arkeologi, terutama aspek penelitian dan hasilnya, merupakan sumber informasi arkeologi yang sangat penting. Dari hasil penelitian dapat terungkap berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau. Kehidupan masyarakat sekarang merupakan cermin dari masyarakat masa lampau. Oleh karena itu pengkajian masa lampau sangat penting, dalam hal inilah arkeologi tampil dengan informasinya berdasarkan data yang ada.

Yang dimaksud dengan informasi arkeologi dalam makalah ini adalah data arkeologi berdasarkan hasil penelitian yang digunakan untuk mengetahui kehidupan masyarakat masa lampau. Informasi ini sangat berguna tidak hanya bagi arkeologi, tetapi juga berguna bagi pihak lain (departemen-departemen tertentu). Terdapat beberapa departemen yang dapat memanfaatkan informasi berupa hasil penelitian arkeologi, antara lain: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Kehutanan; Departemen Pertanian; Departemen Kesehatan; Departemen Dalam Negeri; Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi; dll.

3. Pihak Lain

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran di dalamnya sangat berkepentingan dengan informasi arkeologi, diantaranya Suaka Peninggalan Sejarah dan Perbukala, Muskala/PSK, Museum, Perguruan

Tinggi, dll. Informasi arkeologi sangat diperlukan oleh instansi tersebut dalam membantu kelancaran tugas di bidangnya, sebab instansi tersebut tidak dapat lepas dengan produk arkeologi (informasi arkeologi).

Instansi arkeologi yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai suatu karya yang *masterpiece*. Salah satu hasil yang menonjol dan belum banyak diketahui orang adalah hasil-hasil penelitian arkeologi, yang selama ini memungkinkan untuk merekonstruksi sejarah Indonesia sejak masa paling tua hingga sekarang. Hal ini tertuang dengan terbitnya enam jilid buku *Sejarah Nasional Indonesia*. Dalam buku tersebut, terutama pada jilid 1-3, banyak mengambil data arkeologi sebagai penyusun naskah buku tersebut.

2. Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Pekerjaan Umum beserta jajarannya sebagai pelaksana yang banyak terlibat dalam pembangunan fisik, terkait erat dengan pemanfaatan lahan. Dalam pelaksanaan tugas departemen ini dibatasi oleh beberapa ketentuan, seperti UUD 45 (pasal 33 ayat 3), UU No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Ketentuan tersebut sangat diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek, terutama yang dapat mengganggu baik benda maupun konteks arkeologisnya. Untuk menghindari konflik kepentingan dan tuntutan, kepada pemrakarsa proyek pembangunan, perlu disampaikan informasi tentang potensi arkeologis di area pembangunan dan sekitarnya. Dengan demikian pemrakarsa pembangunan memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek lingkungan yang terkait, sebagai bahan pertimbangan di dalam menetapkan pilihan kegiatan sehubungan dengan proyek yang direncanakan (Bugie Kusumohartono 1986: 771).

Informasi tentang potensi arkeologis disampaikan setelah melalui serangkaian studi kelayakan arkeologi (Mundardjito 1985). Dari studi kelayakan arkeologi tersebut dapat diketahui layak atau tidaknya suatu proyek berdasarkan masukan arkeologi.

3. Departemen Kehutanan

Studi kelayakan arkeologi juga sangat diperlukan oleh Departemen Kehutanan. Studi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi

arkeologis pada lahan transmigrasi. Lahan peruntukan transmigrasi sangat mungkin menyimpan potensi arkeologis, sebab banyak tinggalan arkeologis di luar Jawa (Sumatera dan Kalimantan) tersimpan di kerimbunan hutan.

Dengan adanya studi kelayakan arkeologi sebelum membuka lahan baru untuk transmigrasi, akan dapat diketahui layak atau tidaknya calon lahan transmigrasi. Jika lahan tersebut banyak menyimpan potensi arkeologi dan layak bagi lahan transmigrasi, maka dapat dicari solusi dan alternatif terbaik yang saling menguntungkan.

Dalam hal pemanfaatan hutan, kearifan pemanfaatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari juga telah dipraktekan oleh masyarakat jaman dahulu. Bukti-bukti tersebut didapat dari uraian naskah kesusasteraan dan beberapa prasasti. Masyarakat yang telah memanfaatkan konsep kelestarian lingkungan dapat diketahui dari masyarakat Jawa dan Bali Kuno.

Kegiatan pelestarian hutan dapat dilihat melalui penghijauan hutan, adanya larangan berburu, adanya hutan-hutan yang berstatus alas buruan haji (hutan perburuan raja), dan diangkatnya pejabat-pejabat dengan jabatan atau predikat *hulu kayu* (Kartakusuma 1990: 129-130 dan Suarbhawa 1994/1995: 187-188).

4. Departemen Pertanian

Departemen Pertanian dapat memanfaatkan informasi arkeologi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti arkeologi. Dari hasil penelitian tersebut dapat dirunut jenis-jenis irigasi yang telah dikembangkan, alat-alat pertanian yang digunakan, hasil pertanian, dll.

Berdasarkan data prasasti, kita dapat mengetahui beragamnya irigasi yang dibangun pada masa Jawa Kuno. Jenis irigasi yang telah berkembang waktu itu adalah *dawuhan* (waduk = dam), *wwatan* (tanggul atau jembatan), *tambak* (empang), tawang, taty (tanggul atau empang), *talang* (saluran air yang biasanya terbuat dari pipa), weluran (kanal), arung (pipa air atau gorong-gorong), *tembutu* (pintu air), dan *subati* (Prototipe sistem subak di Bali sekarang) (Meer 1979: 22-32, 151-159; Triwaryani 1994/1995: 7481; dan Sulistiyanto 1990: 361). Dari relief candi dapat diketahui peralatan pertanian pada masa lampau (Subroto 1980: 342-355). Hasil-hasil pertanian zaman dahulu dapat juga diketahui berdasarkan

keterangan prasasti, berupa beras, kapas, jahe, kesumba, dll. (Nastiti 1994/1995: 94-95).

5. Departemen Kesehatan

Keadaan gizi dan pola makanan masyarakat zaman dahulu dapat dirunut berdasarkan informasi hasil penelitian lewat prasasti, naskah, relief, kajian tulang ataupun tradisi megalitik yang masih berlanjut. Masyarakat sekarang merupakan refleksi masyarakat lampau, demikian juga dalam bidang kesehatan.

Sebagai bagian dari kehidupan, makanan dan minuman sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat zaman dahulu dapat diketahui dari kajian prasasti, relief candi, dan naskah. Jenis buah-buahan dan makanan yang biasa dikonsumsi adalah nasi (beras), pisang, rambutan, manggis, jeruk, salak, nangka, cempedak, durian, sukun, dll. Sedangkan minuman yang biasa diminum adalah air putih, arak, tuak, madu, serbat, dll. (Nastiti 1989: 86 dan 1994/1995: 92-95).

Berdasarkan kajian tulang maupun tradisi megalitik yang masih berlanjut dapat diketahui jenis-jenis binatang yang telah dimanfaatkan untuk bahan makanan manusia (Subroto 1986: 496) dan jenis binatang yang telah didomestikasi, seperti kerbau (Sukendar 1990: 217-218).

6. Departemen Dalam Negeri

Peninggalan purbakala (tinggalan arkeologis) adalah salah satu bentuk kekayaan budaya yang dalam kerangka pembangunan daerah dapat digolongkan sebagai *kekayaan wilayah* atau *potensi* daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah atau upaya pengembangan wilayah, segenap kekayaan wilayah harus dapat diolah dan diperhitungkan, untuk ikut mendukung pertimbangan daerah dalam semua aspeknya. Penelitian arkeologi diharapkan dapat ikut membantu menyiapkan kelengkapan masukan perencanaan pembangunan-pembangunan wilayah, berupa rincian karakteristik serta kandungan nilai budaya regional dan lokal. Masukan ini dibutuhkan sesuai dengan tingkatan dan tahapan pembangunan.

Dalam jangka panjang, kehadiran, kedudukan, dan peran serta sumberdaya arkeologi dalam pembangunan daerah akan mengalami perubahan yang amat mendasar: lebih terkait langsung dengan kerangka

pembangunan daerah, dan lebih langsung dalam ikut membentuk kebijaksanaan pembangunan. Kenyataan ini terasa sekali dijumpai pada daerah yang memiliki sumberdaya arkeologi yang besar, seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali (Herwanislamet 1993: 1-8).

Informasi arkeologi dapat bermanfaat sebagai persiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP), Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) atau Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK). Dengan potensi arkeologi yang dimiliki daerah, maka informasi arkeologi sangat diperhatikan dalam penyusunan rencana tersebut.

7. Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi

Tinggalan arkeologis yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ideologik, ekonomik, dan akademik (Kusumohartono 1993: 48-52). Kepentingan ekonomik yang dapat diambil dari tinggalan arkeologis, antara lain dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata sebagai sektor andalan non-migas sedang digalakkan akhir-akhir ini. Dalam pemasukan devisa negara, sektor ini menduduki peringkat atas.

Berbicara pariwisata tidak dapat dilepaskan dengan tinggalan arkeologis. Berdasarkan data, tinggalan arkeologis ternyata merupakan salah satu unsur yang digemari oleh para wisman untuk berkunjung ke Indonesia. Untuk menggalakkan sektor pariwisata, salah satu cara dapat dilakukan dengan membuat brosur wisata. Dalam pembuatan brosur tersebut dapat memanfaatkan informasi arkeologi.

4. Peran Balar

Arkeologi dan warisan budaya sebagai obyeknya merupakan sarana pembinaan, pemantapan serta pembuktian nasional, agar makin dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh segenap bangsa Indonesia.

Untuk pemantapan perlu contoh-contoh dan pembuktian, sedangkan untuk menyebarluaskan perlu media yang menarik dan jangkauan luas. Bila keduanya digabung yakni dengan memperbanyak contoh atau bukti dari arkeologi atau sejarah yang benar, menarik, dan meyakinkan kemudian dengan gencar ditayangkan pada berbagai media komunikasi.

Pemberian contoh atau pembuktian dapat menunjuk obyek arkeologi secara langsung, kumpulan data, hasil analisis, interpretasi, dll. Pemberian

contoh atau pembuktian sebagai cara untuk pemantapan kepribadian nasional ini sangat penting, sebab suatu pernyataan atau *statement* tanpa didukung bukti-bukti nyata akan lemah, kurang diyakini, lebih-lebih oleh orang lain (asing) (Soekarno 1989: 186).

Dengan pemberian contoh, maka nilai-nilai positif yang tersirat dari benda-benda arkeologi, seperti: nilai budaya terbuka selektif, nilai budaya mengutamakan kesempurnaan kerja, nilai budaya gotong-royong (Tanudirja 1984: 22), dan nilai moral (Widodo 1992: 34) semakin mudah difahami orang lain. Dari pemberian contoh-contoh tersebut semakin jelaslah bahwa arkeologi dapat berperan banyak dalam pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan bantuan arkeologi terhadap departemen. Balar sebagai perpanjangan tangan Puslit Arkenas di daerah, mempunyai peran dalam menyebarluaskan informasi arkeologi kepada masyarakat. Informasi arkeologi tersebut berupa *produk* atau keluaran balar; berupa hasil penelitian arkeologi dari wilayah kerjanya masing-masing (beberapa propinsi tertentu). Masing-masing propinsi mempunyai karakteristik potensi daerah yang khas, demikian juga dengan potensi arkeologisnya. Potensi arkeologis inilah yang perlu dikembangkan oleh balar sebagai sumbangsih balar dalam pembangunan di wilayah kerjanya.

Sebagai lembaga penelitian arkeologi, keluaran balar dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga lain dalam melihat keadaan masa lampau atau sekarang berdasarkan kajian arkeologi. Keluaran balar berupa informasi dapat pula dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan acuan untuk bertindak, seperti hasil studi kelayakan arkeologi sebelum pelaksanaan proyek tertentu.

Dalam melaksanakan penyampaian informasi arkeologi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui diskusi, ceramah, seminar, pameran, dll. Kegiatan ini tentunya melibatkan pihak luar yang dapat memanfaatkan keluaran balar berupa informasi arkeologi. Dari kegiatan tersebut dapat terjalin kerjasama yang baik antara Balar dengan instansi terkait lainnya.

Kegiatan penyebaran informasi arkeologi kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi, dan melakukan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.

5. Penutup

Sebagai lembaga penelitian arkeologi di daerah (wilayah), balar dapat berperan dalam penyampaian informasi arkeologi kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan dari hasil penelitian arkeologi, berupa kajian masalampau maupun hasil studi kelayakan arkeologi, kepada pihak-pihak yang dapat dimanfaatkannya. Pihak yang dapat dimanfaatkan informasi arkeologi (keluaran balar) tersebut, antara lain: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri serta Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Penyampaian informasi arkeologi kepada masyarakat (dalam arti luas) dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, ceramah, seminar, pameran, dll. Kegiatan penyampaian informasi arkeologi kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi balar dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi, dan melakukan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.

Daftar Pustaka

Hermanislamet, Bondan

- 1993 "Penelitian Arkeologi dan Pembangunan Daerah, Penelitian Arkeologi Sebagai Bagian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah", dalam *EHPA*, Yogyakarta.

Kartakusuma, Richadiana

- 1990 "Konsepsi dan Kelestarian Hutan Bagi Masyarakat Jawa Kuno", dalam *AHPA III Kajian Agrikultur Berdasarkan Data Arkeologi*, Jakarta: Puslit Arkenas, hal. 123-134.

Kusumohartono, Bugie

- 1986 "Menuju Perumusan Peranserta Arkeologi Dalam Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan alam *Berkala Arkeologi VII* (2), Yogyakarta: Balar Yogyakarta.

- 1993 "Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan Sumberdaya Arkeologi", dalam *Berkala Arkeologi III* (2), Yogyakarta: Balar Yogyakarta, hal. 46-57.

Mundardjito

- 1985 "Studi Kelayakan Arkeologi di Indonesia", dalam *PIA III*, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, hal. 1220-1232.

Nastiti, Titi Surti

- 1989 "Minuman Pada Masyarakat Jawa Kuno", dalam *PIA V Kajian Arkeologi Indonesia*, Jakarta: Puslit Arkenas, hal. 83-98.

- 1994/1995 "Pertanian Masa Jawa Kuno: Usaha Komersial atau Usaha Pelengkap?", dalam *AHPA Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, hal. 91-112.

Suarbhawa, IGM

1994/1995 "Beberapa Aspek Pelestarian Lingkungan Pada Zaman Bali Kuno", dalam *AHPA Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, hal. 183-193.

Subroto

1980 "Kelompok Karya Pandai Besi pada Relief Candi Sukuh", dalam *PIA I*, Jakarta: Puslit Arkenas, hal. 342-355.

1986 "Manfaat Temuan Tulang Binatang Untuk Penelitian Arkeologi", dalam *PIA IV* Konsepsi Metodologi, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, hal. 491-502.

Sulistiyanto, Bambang

1990 "Pembangunan Pertanian Zaman Majapahit", dalam *AHPA III* Kajian Agrikultur Berdasarkan Data Arkeologi, Jakarta: Puslit Arkenas, hal. 351-370.

Sukendar, Haris

1990 "Peternakan Pada Masa Tradisi Megalitik", dalam *AHPA III* Kajian Agrikultur Berdasarkan Data Arkeologi, Jakarta: Puslit Arkenas, hal. 209-220.

Tanudirja, Daud Aris

1984 "Relevansi Studi Arkeologi Di Masa Kini", dalam *Artefak I* (1), Yogyakarta: Jurusan Arkeologi UGM, hal. 16-27.

Triwuryani

1994/1995 "Proses Pembuatan Waduk Pada Masa Jawa Kuno: Berdasarkan Data Prasasti", dalam *AHPA Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, hal. 74-81.

van der Meer, N.C. van Setten

1979 "Sawah Cultivation in Encient Java", *Oriental Monograph Series* no. 22, Canberra. Faculty of asian Studies and Australian National University Press.

- 1992 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0290/0/1992 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Balar*.

Widodo, Sambung

- 1992 "Makna Tinggalan Arkeologi Sebagai Warisan Leluhur", dalam *PIA* III, hal. 32-40. Soekatno

- 1985 "Arkeologi Dalam Komunikasi Massa", dalam *PIA* III, Jakarta Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, hal. 1250-1260.

- 1989 "Sumbangan Arkeologi Pada Pembinaan Kepribadian Nasional Indonesia", dalam *PIA* V Kajian Studi Regional, Jakarta: Puslit Arkenas, hal. 161-172.

Yoesoef, Daoed

- 1980 *Pidato pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi II*.

PENELITIAN ARKEOLOGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Diman Surjanto

1. Pendahuluan

Sesuai dengan judul yang diajukan, makalah ini mencoba melihat penelitian arkeologi dari sudut pandang perencanaan pembangunan di Indonesia. Uraian makalah akan berupa jabatan garis besar secara umum tentang keterkaitan penelitian arkeologi dengan perencanaan pembangunan. Penelitian arkeologi dalam makalah ini adalah upaya pengembangan arkeologi sebagai disiplin.

Ilmu yang merupakan “perangkat lunak” untuk menggali dan mengelola nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa untuk membina kepribadian bangsa sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pembangunan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan manusia untuk selalu mempertahankan atau meningkatkan mutu hidupnya. Pada sisi lain, pembangunan dapat menampilkan wajah pertumbuhan. Pertumbuhan sebagai orientasi utama, terutama dijumpai di negara-negara berkembang yang dihadapkan pada masalah tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja. Situasi ini mendorong perlunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam peningkatan intensitas pembangunan fisik di berbagai jenis kegiatan (Salim 1986: 125).

Dalam kondisi demikian, sumber daya sebagai modal pembangunan cenderung dilupakan kelestariannya demi pembangunan itu sendiri. Dengan demikian pada gilirannya terjadi ketidakseimbangan lingkungan hidup, yang berarti terjadi perubahan dalam keseimbangan ekosistem.

Keterkaitan antara penelitian arkeologi dengan perencanaan pembangunan pada hakekatnya adalah masalah penelitian berwawasan pelestarian, pemanfaatan, dan masalah tanggung jawab arkeologi. Tanggung jawab arkeologi Indonesia adalah melaksanakan kebijaksanaan pembangunan bidang kebudayaan, seperti yang telah dirumuskan dalam GBHN. Hal tersebut untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jatidiri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebangsaan nasional, serta memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya.

Dengan demikian tanggung jawab yang sangat penting dalam penelitian arkeologi adalah mengaplikasikannya untuk pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat.

Landasan penelitian berwawasan pelestarian/pemanfaatan dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi situs yang diteliti sudah saatnya dikembangkan oleh peneliti sendiri. Kedua, secara formal studi tentang permasalahan situs dalam rangka pengelolaan, merupakan tugas dan fungsi Ditlinbinjarah dan UPT-nya di daerah. Namun menjadi kewajiban moral bagi peneliti arkeologi untuk ikut berperan di dalam upaya pelestarian situs yang ditelitinya, tentunya dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan yang ada. Ketiga, hal-hal yang dapat diupayakan oleh peneliti seperti (1) identifikasi dan pengkajian terhadap jenis kerusakan situs, (2) faktor-faktor penyebab kerusakan, dan (3) rekomendasi/alternatif solusinya. Keempat, akan diperoleh manfaat ganda dalam penelitian berwawasan pelestarian, yaitu mendukung kegiatan pelestarian di satu pihak dan adanya kesiapan sumberdaya arkeologi setempat dalam penelitian lanjutan.

Lebih jauh sasaran pelestarian sumberdaya arkeologi dirumuskan sebagai berikut. Pertama, membina hubungan keselarasan antara manusia dengan sumberdaya arkeologi yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan, yaitu membina manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri keselarasan antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungan (termasuk lingkungan budaya) dan manusia dengan Tuhan penciptanya. Kedua, melestarikan sumberdaya arkeologi agar dapat dimanfaatkan terus-menerus oleh generasi demi generasi. Pembangunan berkelanjutan perlu waktu panjang, karena itu pelestarian sumberdaya arkeologi. Pembangunan industri, pertambangan, pertanian, dan kegiatan sektoral lainnya perlu dilaksanakan melalui cara dan sekaligus mengindahkan intensitas dan mutu sumber daya arkeologi. Keempat, membimbing manusia dari posisi "perusak sumberdaya arkeologi" menjadi "pembina sumberdaya arkeologi". Kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan tentang sumber daya tersebut maka manusia menjadi perusak. Keempat sasaran ini kiranya perlu diikhtiarkan terus-menerus agar sasaran pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Dengan demikian penelitian arkeologi sudah saatnya diletakkan pada perspektif yang lebih luas, tidak hanya untuk kepentingan akademik, namun juga untuk kepentingan ekonomik dan idiologi.

Di dalam rangkaian manajemen sumberdaya arkeologi, penelitian arkeologi diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan sekaligus acuan bagi aktivitas pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Arkeologi sebagai salah satu disiplin ilmu dalam melaksanakan "misinya", yaitu menelusuri atau merunut (*trace back*) kebudayaan masa lalu bangsa Indonesia melalui (1) rekonstruksi sejarah kebudayaan, (2) rekonstruksi cara hidup, dan (3) penggambaran proses budaya (Binford 1972). Hasil kajian tersebut diharapkan mampu memberi masukan dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan aktivitas tersebut bidang arkeologi sering menjumpai masalah. Dalam dinamika interaksi antar dan lintas sektoral sering terjadi konflik-konflik kepentingan, bahkan sering kita dengar istilah sektoral individual atau bahkan arogansi sektoral. Dalam proses semacam ini, aktivitas memproduksi barang dan jasa (ekonomi) memiliki posisi unggul dari pada aktivitas penelitian yang memproduksi pengetahuan (*knowledge*). Implikasinya adalah bahwa dalam kebijaksanaan ekonomi misalnya lebih diutamakan, dan aktivitas penelitian sering dikalahkan atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa kelestarian sumber daya arkeologi cenderung dikorbankan di dalam proses pembangunan fisik. Dalam kondisi yang demikian memberdayakan hasil-hasil penelitian dalam proses perencanaan pembangunan merupakan masalah tersendiri. Dengan kata lain bagaimana penelitian arkeologi dapat menjadi bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan.

Untuk menjembatani masalah tersebut diperlukan saling pendekatan antara penelitian arkeologi dengan perencanaan pembangunan. Saling pendekatan tersebut adalah, adanya kesesuaian cara pandang dalam memberdayakan hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil pembangunan yang direncanakan bagi kepentingan masyarakat.

Seperti telah diketahui bersama bahwa sekurangnya sejak dua dekade terakhir telah cukup banyak terjadi persinggungan antara penelitian arkeologi dengan perencanaan pembangunan yang dapat dipandang sebagai titik awal saling mendekat, saling membutuhkan atau saling menunjang. Persinggungan tersebut harus ditingkatkan menjadi keterpaduan. Dengan demikian diharapkan bahwa penelitian arkeologi dapat menjadi bagian integral proses awal perencanaan pembangunan.

2. Keterkaitan dengan Pembangunan Sektoral

Telah disebut di bagian depan bahwa penelitian arkeologi bertujuan untuk memproduksi pengetahuan mengenai masa lampau, sedangkan masa lampau adalah komponen penting dari kehidupan masa kini (Cleere 1989: 5-6). Dengan prinsip tersebut sebagai landasan, maka pada dasarnya penelitian arkeologi dan sumberdaya budaya harus diorientasikan untuk melayani keinginan-keinginan masyarakat masa kini.

Hal tersebut senada dengan kecenderungan pengelolaan sumber daya arkeologi masa kini yang dilandasi oleh prinsip *peddle or perish* (Macleod 1977). Secara sederhana digambarkan bahwa penelitian arkeologi dan pelestariannya dapat diselenggarakan secara optimal apabila sumberdaya arkeologi yang bersangkutan memiliki makna yang signifikan bagi masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat merupakan hal yang utama.

Berdasarkan uraian itu, kiranya dapat dirumuskan secara singkat bahwa penelitian arkeologi dan pengelolaan warisan budaya pada dasarnya ditentukan oleh tiga kepentingan pokok dalam pembangunan (Cleere 1989: 5-10). Pertama, kepentingan ideologi guna memantapkan identitas budaya yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan. Kedua, kepentingan akademik terutama dalam hal pengembangan penelitian arkeologi. Ketiga, kepentingan ekonomi dalam hubungannya dengan pariwisata.

Selanjutnya akan diulas secara singkat keterkaitan penelitian arkeologi dan warisan budaya pada kepentingan pembangunan di atas. Paparan di bawah ini diharapkan dapat menggambarkan seberapa jauh produk penelitian arkeologi untuk menunjang sektor-sektor pembangunan.

Menunjang Kepentingan Ideologi/geopolitik

Kebangkitan nasionalisme yang mengakhiri kolonialisme di bekas negara-negara terjajah (termasuk Indonesia) telah mendorong peran positif penelitian arkeologi dalam menunjang kepentingan ideologi. Hasil-hasil penelitian diarahkan untuk mengatasi diskontinuitas budaya akibat kolonialisme. Pada hasil penelitian arkeologi tersebut diletakkan harapan agar jatidiri budaya bangsa dapat direkonstruksi sebagai landasan persatuan dan kebanggaan nasional.

Pada sisi lain hasil-hasil penelitian arkeologi dan warisan budaya dapat dikaitkan dengan situasi geografis dan politik pemerintah khusus-

nya dalam konsep wawasan Nusantara. Dalam hubungan ini Richard I. Ford menunjukkan bahwa nasionalisme tumbuh bersamaan dengan perhatian studi prasejarah. Bahkan ada satu fase dimana hasil-hasil penelitian arkeologi dimanfaatkan sebagai bahan propaganda politik, sehingga muncul istilah *nationalisme archaeology* atau *political archaeology* (Ford 1973).

Menunjang Kepentingan Akademik

Selanjutnya tuntutan terhadap sumbangan dan peranan warisan budaya dalam pemantapan jatidiri, belakangan ini bermuara pada aktivitas pembangunan kota (*urban development*). Demikian juga sudah muncul pemahaman di antara perencana kota mengenai pentingnya pemanfaatan dan kelestarian warisan budaya.

Dalam kasus-kasus perencanaan kota semacam ini penelitian arkeologi dituntut sumbangannya, mengingat pendekatan terbaru yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan kota didasari oleh studi lingkungan - perilaku (*Environment-Behavior Studies* = EBS). Pemanfaatan studi tersebut didasari oleh studi arkeologi yang berhasil mempelajari keterkaitan lingkungan binaan - budaya bendawi - bentang lahan budaya, untuk memahami perilaku manusia masa lampau. Pengetahuan tersebut kemudian diujikan pada konteks masa kini untuk dimanfaatkan secara aplikatif dalam proses perencanaan kota (Rapoport 1990).

Peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal, mengisyaratkan penelitian arkeologi dan sumberdaya arkeologi harus diberlakukan sebagai aset pembangunan daerah. Apabila diterjemahkan ke dalam langkah-langkah penelitian, maka secara efektif meningkatkan: (1) identifikasi dan pengukuran sumberdaya arkeologi seperti sumberdaya lain (ruang dan lahan pertanian, perkebunan, tambang, air di bawah tanah dan sebagainya), untuk selanjutnya memperlakukan sebagai satu kesatuan terpadu masukkan perencanaan pembangunan; (2) Sumberdaya arkeologi sebagai potensi wilayah perlu diletakkan ke dalam kerangka konseptual maupun kerangka operasional pembangunan daerah, berupa kerangka spasial pembangunan daerah pada tingkat makro regional dan mikro-lokal. Kerangka spasial ini amat berkaitan dan saling bergantung dengan kerangka makro-ekonomi dan strategi sektoral, dengan demikian sumberdaya arkeologi berkaitan dengan sektor-sektor lainnya dalam kerangka spasial pembangunan daerah (Hermanislamet 1993).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam perspektif jangka panjang, kehadiran potensi sumberdaya arkeologi dalam pembangunan daerah akan mengalami perubahan yang mendasar, lebih terkait langsung dengan kerangka pembangunan daerah dan lebih dalam kaitan tersebut dalam membentuk kebijaksanaan pembangunan. Kenyataan ini terlihat jelas dijumpai pada daerah yang memiliki sumberdaya arkeologi yang luas dan besar seperti Jawa, Bali dan Sumatera.

Menunjang Kepentingan Pariwisata

UU Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan pada pasal 11 ayat 1 (b) menyebutkan obyek wisata adalah alam dan hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. Berkaitan dengan hal tersebut obyek warisan budaya kembali berperan dalam kepariwisataan. Di samping berfungsi sebagai sarana peraga guna mengefektifkan proses belajar-mengajar (Macleod 1977). Kunjungan ke situs arkeologi atau museum, juga merupakan upaya pemahaman kesejarahan pada siswa sekolah usia muda (Cleere 1989: 9). Wisata budaya sendiri meliputi museum-museum antropologi dan arkeologi, bagian-bagian kota yang bersejarah, festival-festival kesenian dan upacara tradisional, berbagai kerajinan dan cendera mata yang berbau khas tradisi lokal (De Kadt 1977: 15). Pada akhirnya melalui pengembangan sumber daya budaya akan sangat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi regional (Braden dan Wiener 1980).

Berikut ini akan diuraikan tentang adanya beberapa kecenderungan pariwisata budaya. Mungkin selama ini pembangunan kepariwisataan dalam kaitannya dengan keberadaan warisan budaya nasional lebih dipahami pada sisi dan dampak negatif yang ditimbulkan. Namun di sisi lain, interaksi di antara keduanya dapat menghadirkan kecenderungan yang positif. Kecenderungan pariwisata budaya pada dekade terakhir adalah kualitas sumberdaya (*quality of resources*) yang merupakan tuntutan wisatawan. Kriterianya adalah semakin "asli" dan lestari obyeknya, semakin potensial pula perkembangannya (Collins 1990).

Selanjutnya pariwisata budaya berkembang dalam era pariwisata massal (*mass tourism*), keberhasilannya ditunjukkan pada angka-angka jumlah wisatawan yang datang. Pada era ini menghadirkan "wisata pemburu", mereka tidak puas dengan dokumentasi foto atau kartu pos, arca atau benda purbakala lainnya, namun cenderung "memburu" cendera

mata eksklusif misalnya arca atau kepala arca dari suatu candi, atau jimat pusaka dari masyarakat primitif (Graburn 1989: 32–33).

Sebagai reaksi dari pariwisata masal yang berorientasi pada jumlah wisatawan, muncul era baru yang disebut pariwisata berskala kecil (*small scale tourism*) atau *green tourism*, sebagai alternatif pariwisata tipe baru (Nuryanti 1991: 3). Gagasan tentang pariwisata tipe baru ini dianggap tepat, karena perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya yang ada diutamakan.

Kecenderungan terakhir adalah ekotourism yang merupakan suatu gejala yang menyebar ke seluruh dunia hanya beberapa tahun yang lalu. Akar ekotourism terletak pada wisata alam dan wisata ruang terbuka. Hal tersebut merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari kepribadian lingkungan (termasuk lingkungan budaya/sumberdaya arkeologi), ekonomi, dan sosial. Terdapat komitmen yang kuat pada lingkungan hidup dan rasa tanggung jawab sosial, yang tercermin pada ungkapan “perjalanan yang bertanggung jawab” melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Kreg Limberg dan Hawkins 1993: 11). Dengan demikian ekotourism telah mendorong pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi global. Gejala ini meningkatkan konservasi daerah alami, kebudayaan asli, dan species langka. Ekotourism menjadi suatu gejala yang merupakan ciri akhir abad ke-20. Demikian keterkaitan sumber daya arkeologi dengan perencanaan pembangunan kepari-wisataan.

3. Implikasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa perencanaan pembangunan di setiap sektor penting didekati dengan kerangka yang holistik dan multidisipliner. Layak atau tidaknya suatu rencana pembangunan tidak cukup hanya didekati dengan pertimbangan biaya dan teknologi semata, namun juga pendekatan lingkungan (Soemarwoto 1989). Pendekatan lingkungan mewakili kepentingan berbagai sektor dan sumber daya yang terkait termasuk di dalamnya sektor kebudayaan dan sumber daya arkeologi.

Penapisan terhadap kelayakan proyek dengan pendekatan lingkungan tersebut, secara formal diwadahi oleh ketentuan dalam PP Nomor 29/1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan payungnya adalah UU Nomor 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Ketentuan-ketentuan lainnya adalah UU Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya, UU Nomor 9/1990 tentang Pariwisata, UU Nomor 5/1967 tentang Pelestarian Alam dan lain-lain.

Mekanisme pelaksanaan AMDAL tersebut merupakan harapan terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan yang tidak saling mengorbankan kepentingan sektor/sumber daya. Dengan demikian setiap sektor/sumber daya merupakan potensi dan aset pembangunan yang dengan cara masing-masing bermanfaat bagi masyarakat.

Di lain pihak mekanisme tersebut pada gilirannya menuntut pengembangan penelitian arkeologi Indonesia, tidak hanya secara akademik yang menghasilkan ilmu pengetahuan di bidang arkeologi semata, namun juga non akademik dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian arkeologi harus didasari oleh pendekatan kontekstual pada kepentingan masyarakat lokal, propinsial, dan nasional. Hasil-hasil penelitian yang berupa data dan informasi sumber daya arkeologi diharapkan dapat membantu perencanaan pembangunan kota untuk menggambarkan, menterjemahkan sistem dan kaidah-kaidah pengaturan tata ruang yang sesuai dengan budaya masyarakat yang tinggal di dalamnya.

4. Penutup

Dari waktu ke waktu penelitian arkeologi Indonesia terus dikembangkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Namun seperti telah disebut di atas, pengembangan penelitian arkeologi masih perlu terus disempurnakan, antara lain agar kembali konsep dan kebijakan penelitian arkeologi Indonesia (Mundarjito 1993). Sekurangnya terdapat empat pokok masalah yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijaksanaan penelitian arkeologi Indonesia. Pertama, masalah pencapaian tiga tujuan arkeologi, yaitu: rekonstruksi sejarah kebudayaan, rekonstruksi cara-cara hidup, dan penggambaran proses budaya. Kedua, masalah data arkeologi yang mencakup pengertian sempit, yaitu artefak, ekofak, fitur, dan ipsefak; pengertian luas berupa konteks, yaitu matrik, keletakan dan asosiasi; tingkatan dan satuan data, yaitu semesta, satuan cuplikan, populasi, khasanah. Ketiga, masalah penelitian berwawasan manfaat, pelestarian, dan tanggung jawab penelitian arkeologi Indonesia. Keempat, masalah strategi penelitian arkeologi yang meliputi rancangan

penelitian, satuan penelitian, pendekatan multidisipliner, dan pendekatan kontekstual lokal, propinsial, dan nasional.

Manfaat penelitian arkeologi dan pengelolaan sumber daya arkeologi dalam rangka pembangunan dapat dirinci dalam empat hal, yaitu:

1. Membina keselarasan antara manusia dengan sumberdaya arkeologi dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya (sasaran pembangunan).
2. Melestarikan sumberdaya arkeologi agar dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mencegah kemerosotan dan meningkatkan mutu sumberdaya arkeologi.
4. Membimbing manusia untuk tidak merusak sumberdaya arkeologi.

Sekurangnya terdapat tiga kepentingan pokok penelitian sumberdaya arkeologi dalam pembangunan, yaitu: kepentingan ideologi, kepentingan akademik, dan kepentingan ekonomi. Dalam menunjang tiga kepentingan pokok tersebut hasil-hasil penelitian dan acuan pada tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Implikasi penelitian arkeologi dalam perencanaan pembangunan tampak pada pendekatan/kerangka holistik dalam pembangunan sektoral. Pendekatan lingkungan mewakili kepentingan sektor dan sumberdaya yang terkait, termasuk di dalamnya sektor kebudayaan dan sumberdaya arkeologi. Ketentuan tersebut diatur dalam UULH dan dipertegas lagi dalam ketentuan AMDAL dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait.

Untuk mengantisipasi mekanisme pelaksanaan AMDAL tersebut kiranya perlu menyusun konsep dan kebijaksanaan penelitian arkeologi Indonesia. Kebijaksanaan penelitian seharusnya tidak hanya secara akademik yang menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga non akademik dalam kaitannya dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Binford, L.R.

1972 *An Archaeological Perspective*. New York and London: Academic Press.

Braden, Paul V. dan Louise Wiener

1980 "Bringing Travel, Tourism, and Cultural Resource Activities in Harmony with Regional Economic Develop-

ment", dalam D.E. Hawkins (ed.). *Tourism Marketing and Management Issues*. Washington DC: George Washington University.

Clarke, D.L.

1977 *Spatial Archaeology*. London: Academic Press.

Cleere, H.F. (ed).

1989 *Archaeological Heritage management in The Modern World*. London: Unwin Hyman.

Collins, Robertson E.

1990 *Heritage and Tourism, Archaeology Worldwide Federal Archaeology Report*.

De Kadt, Emanuel

1979 *Tourism Passport to Development?: Perspectives on The Social and Cultural Effects of Tourism in Development Countries*. Oxford: University Press.

Ford, Richard L.

1973 "Archaeology Serving Humanity" dalam C.L. Redman (ed), *Research and Theory in Current Archaeology*. John Willey and Sons.

Graburn, Nelson H.H.

1989 "Tourism: The Secret Journey", dalam V.L. Smith (ed), *Hosts and Guests, The Anthropology of Tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Hermanislamet, Bondan

1990 "Arkeologi Spasial dan Rencana Kota", *Seminar Arkeologi Perkotaan Sebagai Aset Pariwisata Yogyakarta*.

Hodder, Ian and Orton, Clive

1976 *Spatial Analysis in Archaeology*. London: Cambridge University Press.

Kreg Lindberg dan Donald E. Hawkins (ed).

1993 "Ekoturisme: Petunjuk untuk Perencanaan dan Pengelolaan", *The Ecotourism Society*. North Bennington, Vermont.

- Kusumohartono, Buggie
1993 "Penelitian Arkeologi dalam Konteks Pengembangan Sumber Daya Arkeologi", dalam *Berkala Arkeologi*, XIII (2) Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Macleod, Donald G.
1977 "Peddle or Perish: Archaeological Marketing from Concept to Product Delivery", dalam Schiffer M.B. dan G.J. Gumerman (ed), *Conservation Archaeology*. London: Academic Press.
- Mc. Gimsey III, Charles R.
1972 *Public Archaeology*. New York: Seminar Press.
- Mundardjito
1993 "Kecenderungan Penelitian Arkeologi Dunia Mutakhir", *EHPA*. Yogyakarta.
- Nuryani, Wiendu
1991 Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Indonesia, Seminar Sosial Budaya Pengembangan Pariwisata. Yogyakarta: UGM.
- Rapoport, Amos
1982 *The Meaning of The Built Environment*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Salim, Emil
1986 *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Soemarwoto, Otto
1989 *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

SUMBER DAYA ARKEOLOGI SEBAGAI MEDIA PEMANTAPAN IDEOLOGI

I Wayan Suantika

I

Di dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) VII dan Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) ini, telah ditetapkan bahwa tema yang dipilih adalah "Sumbangan Arkeologi Bagi Jatidiri Bangsa". Menurut hemat kami tema tersebut sangatlah tepat, karena sudah sewajarnya arkeologi Indonesia mulai saat ini meluaskan berbagai bidang kajiannya, yang dapat bermanfaat dan dapat memberi arah bagi kepentingan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pembentukan ketahanan budaya bangsa sebagai modal ketahanan nasional secara menyeluruh. Selama ini kalau kita membicarakan soal arkeologi, maka kita akan lebih banyak bergerak dalam ruang profesionalisme yang terbatas.

Dalam era pembangunan sekarang ini, dirasa perlu adanya pengembangan visi bagi dunia arkeologi di Indonesia. Pengembangan visi yang dimaksud itu ialah mencanangkan perspektif yang lebih luas tentang fungsi dan peranan arkeologi dalam pembangunan nasional, agar arkeologi Indonesia lebih bermakna bagi kehidupan masyarakat kita (Soediman 1985), agar arkeologi Indonesia mendapat tempat di masyarakat serta dapat memberikan sumbangan yang lebih nyata bagi pembangunan nasional (Hasan 1989), karena antara arkeologi dan pembangunan bangsa meskipun tampaknya bertolak belakang dalam pengkajiannya, dimana arkeologi mempelajari kebudayaan dan manusia yang lampau, sedangkan pembangunan memikirkan dan merencanakan masa depan manusia yang hidup masa kini. Namun harus diakui bahwa arkeologi dan pembangunan sebenarnya tidak dapat dipisahkan karena identitas suatu bangsa, keagungan, kebanggaan sangat terkait dengan kebudayaan masa lampau suatu bangsa (Bachtiar 1989).

Terkait dengan tema di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa arkeologi Indonesia dalam usianya yang relatif muda, telah terbukti banyak memberikan andil di dalam mengungkapkan berbagai aktivitas manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga bermanfaat bagi pembentukan jatidiri bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh bumi kita memang menyimpan kasanah budaya yang luar biasa kayanya

dan yang apabila diteliti sesuai dengan ilmunya, dapat mengungkapkan bukan hanya sejarah umat manusia melainkan juga sejarah alam semesta itu sendiri (Soebadio 1989). Dengan adanya khasanah budaya yang melimpah tersebut, sudah sepatutnyalah arkeologi Indonesia mengembangkan visi kajiannya, sebagaimana kemajuan arkeologi di negara-negara maju, di mana arkeologi sudah mulai mengadakan pengelolaan sumber daya arkeologi secara lebih profesional, karena mereka memiliki keyakinan bahwa sumber daya arkeologi bila dikelola dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi kepentingan ideologi, akademi dan ekonomi, yang berarti bahwa arkeologi tersebut dengan pengelolaan yang baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi para arkeolog, pemerintah dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sumber daya arkeologi memiliki potensi yang sangat banyak bagi pemantapan dan pengembangan jatidiri bangsa Indonesia, karena jatidiri bangsa ditentukan oleh identitas budaya dan ditunjang oleh kesadaran sejarah. Identitas budaya bangsa ditandai oleh nilai-nilai budaya serta corak berbagai ekspresi budaya yang khas pada bangsa yang bersangkutan (Edi Sedyawati 1993).

Selanjutnya dikatakan bahwa jatidiri bangsa ditunjang pula oleh rasa mandiri dan berakar karena memiliki riwayat masa lalu bersama yang unik, beserta dengan segala permasalahannya yang khas, yang berbeda dengan riwayat bangsa lain. Kesadaran sejarah bangsa secara nasional membawa rasa persatuan yang disebabkan oleh dimilikinya riwayat bersama yang memberikan landasan kepada cita-cita bersama untuk mencapai suatu masa depan yang merupakan kelanjutan dari masa lalu, dan dipersiapkan dimasa kini. Dengan demikian tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa jatidiri atau kepribadian bangsa Indonesia adalah bangsa yang di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa mencerminkan isi dari Ideologi negara yaitu Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diyakini merupakan permata dari peristiwa-peristiwa yang menonjol atau yang disebut dengan tonggak-tonggak sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad lamanya, yakni sejak jaman prasejarah, jaman sejarah dan jaman pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ditegaskan pula bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sejak jaman lampau, dan istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad XIV yaitu terdapat di dalam buku Ngarakertagama karangan Prapanca dan buku Sotasoma karangan Mpu

Tantular (Darmodiharjo 1981; Edi Sedyawati 1992). Dengan demikian ideologi Pancasila adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur sejarah kebudayaan bangsa dimasa lampau yang dapat mempersatukan gerak dan langkah bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Lahirnya Pancasila itu sendiri, telah melewati berbagai proses pengkajian yang sangat mendalam, dan akhirnya sampai kepada suatu ketetapan yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 tercantum kalimat sebagai berikut:

“....., maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya di dalam usaha untuk memahami Pancasila dijelaskan bahwa dasar negara tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Jiwa Bangsa Indonesia
2. Kepribadian Bangsa Indonesia
3. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
4. Dasar Negara Republik Indonesia
5. Sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia
6. Perjanjian luhur Bangsa
7. Cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia
8. Pandangan hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia (Darmodiharjo 1981).

Dengan demikian, berarti bahwa ideologi Pancasila mencakup pula jati diri dan Kepribadian Bangsa, yang dapat dipastikan pula berasal dari nilai-nilai kebudayaan masa lalu. Pendapat ini diyakini karena disebutkan bahwa Kepribadian itu berurat dan berakar dalam masa-masa yang sudah lewat, dan berkembang dari masa ke masa sejalan dengan sikap hidup yang dianut bangsa itu, maka nilai-nilai kehidupan di masa yang lalu harus kita gali untuk menegakkan martabat kita sekarang, demi pembangunan masa depan. Mengingkari prestasi nenek moyang, kita berarti memalsu identitas kita sekarang, dan membangun atas dasar kepalsuan berarti menjerumuskan generasi yang akan datang (Soekmono 1992).

Dengan uraian tersebut di atas, kiranya tepatlah bila dikatakan bahwa Jatidiri atau Kepribadian Bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang juga sebagai ideologi Negara. Memantapkan Jatidiri atau Kepribadian Bangsa juga berarti memantapkan ideologi Pancasila tersebut. Di dalam usaha untuk memantapkan ideologi Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia yang disebut dengan kesadaran sejarah. Tanpa kesadaran sejarah secara nasional, maka cukup sulit untuk memantapkan dan menegakkan jatidiri bangsa dimasa depan. Ilmu arkeologi yang mempelajari sejarah masa lampau, dengan sendirinya juga merupakan ilmu sejarah secara umum dan dapat memberikan gambaran berkenaan dengan kehidupan masa lampau bangsa Indonesia.

Meskipun usia ilmu arkeologi Indonesia masih relatif muda, namun harus diakui bahwa di dalam pengungkapan sejarah masa lampau bangsa Indonesia, banyak hasil-hasil yang dicapai dan sangat bermanfaat bagi pembentukan kepribadian bangsa, sehingga kita bangsa Indonesia dapat berkembang hingga dewasa ini dengan tetap menunjukkan jatidiri bangsa Indonesia yang khas yang berasal dari akar budaya sendiri yang tercermin di dalam Pancasila. Pada masa yang akan datang sudah dapat dipastikan bahwa jatidiri atau kepribadian bangsa Indonesia ini akan selalu mendapat tantangan dan cobaan, karena akan selalu bersentuhan dan berbaur dengan budaya-budaya lainnya dari seluruh penjuru dunia seiring dengan pesatnya era globalisasi yang merambah seluruh jagat raya ini. Dengan proyeksi masa depan seperti itu, maka dunia arkeologi Indonesia dihadapkan kepada permasalahan yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana usaha-usaha para arkeolog Indonesia memanfaatkan sumber daya budaya yang ada, guna memantapkan jatidiri atau kepribadian bangsa sehingga terciptanya ketahanan budaya bangsa.
2. Arkeologi Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sejarah secara nasional dan mampu menampilkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam berbagai bentuk sumber daya budaya yang dapat memantapkan ideologi Pancasila yang diakui sebagai jatidiri atau kepribadian bangsa.

Hal ini tentunya sangat penting, karena sudah merupakan kewajiban dunia arkeologi Indonesia untuk menghargai setinggi mungkin, memelihara sebaik mungkin, dan menjadikan sumber inspirasi dalam usaha kita menggalang dan menegakkan serta memantapkan kepribadian bangsa demi tercapainya cita-cita bersama.

Dengan uraian latar belakang dan permasalahan seperti tersebut di atas, maka pada kesempatan ini akan dicoba untuk mengemukakan berbagai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam berbagai bentuk sumber daya arkeologi yang kita miliki, keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi Negara; Falsafah dan pandangan hidup bangsa; Jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia, adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur sejarah masa lampau bangsa Indonesia yang usianya sangat panjang serta penuh dengan berbagai pengalaman berharga dan telah melalui berbagai tonggak-tonggak sejarah yang sangat penting. Dengan demikian tidaklah mustahil bila di dalam usaha untuk menegakkan dan memantapkannya, kita cari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat pada sumber daya arkeologi sebagai pilar-pilar penyangganya, sehingga dimasa datang akan lebih kokoh dan kuat dan dapat menciptakan ketahanan budaya sebagai dasar terciptanya ketahanan nasional bangsa Indonesia.

II

Arkeologi Indonesia dapat tumbuh dengan baik, karena bumi Indonesia memang menyimpan banyak khasanah budaya, baik yang sudah ditemukan maupun yang masih terpendam di dalam tanah, sehingga merupakan lahan yang sangat ideal untuk diteliti. Khasanah budaya tersebut sering dikenal dengan sumber daya arkeologi atau warisan budaya bahkan sering pula disebut sebagai pusaka budaya bangsa. Mengingat sumber daya arkeologi yang terdapat di bumi Indonesia berasal dari berbagai masa; seperti dari masa prasejarah, Klasik dan Islam yang berarti cakupannya sangat luas, maka pada kesempatan ini hanya akan dicoba untuk menggali dan menampilkan nilai-nilai luhur dari beberapa sumber daya arkeologi yang berasal dari masa klasik saja.

Masa Klasik Indonesia oleh para pakar diperkirakan berkembang sekitar abad IV-XVI Masehi, dengan berbagai bentuk warisan budayanya seperti: bangunan-bangunan pemujaan yang sangat megah terbuat dari batu dan bata, yang memiliki arca-arca dan kaya dengan dekorasi berupa pahatan relief yang berisikan ceritera-ceritera keagamaan. Ratusan buah prasasti baik itu prasasti batu, prasasti tembaga serta naskah-naskah kuna yang ditulis di atas daun lontar dan berbagai bentuk warisan budaya lainnya. Dengan kekayaan sumber daya budaya tersebut, sangatlah bijaksana bila dari sumber tersebut kita gali nilai-nilai luhur yang terkandung di

dalamnya untuk memantapkan ideologi negara, dan tidak bermaksud mengungkapkan puncak-puncak budaya dari kelompok tertentu saja, karena hal ini dirasa sangat tidak baik manfaatnya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian nilai-nilai luhur yang akan dikemukakan adalah yang memiliki relevansi dengan azas persatuan dan kesatuan sesuai dengan yang tertuang di dalam sila-sila dari Pancasila beserta dengan butir-butirnya.

Telah diketahui bersama bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang terdiri dari 5 sila yang merupakan satu kesatuan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan sila yang satu dengan yang lainnya. Di dalam usaha untuk mengemukakan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat memantapkan dan memperkokohnya. akan dicoba untuk mengkaji dari sila yang pertama beserta dengan butir-butirnya hingga sila yang terakhir, serta dicoba pula mengkaitkan nilai-nilai tersebut dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Suatu karunia bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak masa lampau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat taat dan kuat sekali keyakinannya dalam bidang keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya didirikan bangunan-bangunan pemujaan dalam ukuran yang megah dan dengan mempergunakan bahan-bahan yang kuat dan tahan lama, seperti batu dan bata. Bahkan bila diperhatikan dengan seksama akan terlihat bahwa bangunan-bangunan tersebut banyak didirikan di tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota kerajaan. Keadaan ini jelas-jelas membuktikan adanya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang dipenuhi dengan relief-relief yang berhiaskan berbagai ceritera keagamaan, yang menganjurkan kepada umatnya agar selalu berbuat kebajikan dan kebenaran, menjauhi segala larangan, demi tercapainya damai di bumi dan damai di akhirat. Bahkan sebagai gambaran dipahatkan pula berbagai hukuman yang akan diterima di neraka bagi yang berbuat salah dengan hukuman yang sangat mengerikan, juga berbagai ceritera pahlawan pembela kebenaran, sebagai suri tauladan bagi masyarakatnya.

Selain itu masalah kebebasan memeluk agamapun sudah dijamin pada masa itu, terbukti bahwa agama yang berkembang pada masa itu lebih dari satu agama dan kemudian pada masa pemerintahan raja

Kertanegara di Kerajaan Singasari, kedua agama yaitu Hindu dan Buddha berkembang bersama-sama dengan serasi dan selaras yang dibuktikan dengan penghormatan kepada tokoh-tokoh kedua agama yang selalu menjadi penasehat raja. Pentingnya kedudukan tokoh-tokoh agama pada masa lalu terbukti dari suratan yang tertulis di dalam berbagai prasasti (Callenfels 1929; Goris 1954), bahkan tidak jarang di dalam tata cara pemujaannya seorang raja dihormati dalam bentuk 2 orang dewa dari agama yang berbeda, sehingga hal ini memberikan suatu bukti bahwa kehidupan beragama dengan penekanan pada sektor kerukunan dan toleransi antar umat beragama memang sudah mengakar sejak jaman dahulu.

Demikian pula setelah bangsa Indonesia memasuki masa Islam, kita dapat buktikan bahwa kerukunan dan saling menghargai antara agama yang satu dengan yang lainnya masih tetap terjaga, bahkan terlihat adanya perpaduan dan saling menerima dan memberi pengaruh, seperti penampilan arsitektur Masjid Agung Demak yang beratap tumpang; Menara Kudus; serta makam-makam yang terpelihara dengan baik di beberapa situs arkeologi di bekas Keraton Majapahit di daerah Trowulan. Akar-akar budaya yang seperti itu, seyogyanya terus menerus dipupuk dan dipelihara dengan baik, serta perlu disebar luaskan sebagai usaha mempertebal rasa Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk tetap menjaga dan memperkokoh toleransi antara semua umat beragama yang ada di Indonesia. Jika kesadaran sejarah nasional telah mantap dan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan seperti yang telah diuraikan di atas akan dapat dipahami dan dimengerti sehingga kerukunan beragama sebagai salah satu modal pembangunan akan dapat tetap terjaga sepanjang masa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila ini terkandung pengertian yang berupa pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, termasuk pula pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Bila kita perhatikan sumber daya budaya yang kita miliki, maka dapat kita katakan bahwa berbagai peninggalan arkeologi yang kita miliki adalah merupakan suatu hasil cipta, rasa dan

karsa serta keyakinan yang sangat megah, indah dan berteknologi tinggi, seperti yang terlihat dalam bentuk candi-candi, permandian, gapura, mesjid, dan lain sebagainya. Ini memberikan bukti bahwa masyarakat Indonesia masa lalu adalah masyarakat yang beradab, serta martabatnya mendapat perhatian dari pihak penguasa sehingga mereka dapat melahirkan ide-ide dan gagasan mereka ke dalam berbagai bentuk seni budaya yang kita warisi dewasa ini.

Agar manusia di dalam hidupnya tidak merasa tertekan oleh kekuatan tertentu atau tertekan oleh pihak penguasa, tetapi mereka dapat mengadili dirinya sendiri dapat kita lihat dari beberapa buah prasasti yang dikeluarkan oleh raja, selalu disertai dengan beberap *sapatha* atau kutukan, sehingga bagi yang melanggar pusan raja akan mendapatkan hukuman dari alam semesta ini, contoh bagi seorang yang melanggar putusan raja akan diterkam harimau bila pergi ke huta; atau akan disambar petir dan hukuman lainnya (Atmojo 1987).

Candi dengan berbagai ukuran (relief) serta berisikan arca-arca pemujaan atau arca-arca dekoratif memberikan makna bahwa rasa kemanusiaan pada masa yang lalu telah mendapatkan perhatian, sehingga mereka dapat dengan bebas menyalurkan ide-idenya yang terlihat dari berbagai karya arsitektur, seni arca serta aktivitas kemasyarakatannya yang terungkap di dalam beberapa prasasti, sehingga karena kemampuan atau kemahiran seseorang dapat menerima penghargaan. Dari beberapa isi prasasti pula kita dapat mengetahui bahwa sejak masa klasik terlihat adanya keringanan hukuman budak, sehingga mereka tidak lagi bisa diperlakukan semena-mena oleh majikannya.

3. Persatuan Indonesia

Dalam sila ini terkandung pengertian persatuan bangsa yaitu persatuan bangsa yang meliputi seluruh wilayah tanah air Indonesia; Persatuan seluruh suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, serta pengakuan terhadap ke "Bhineka Tunggal Ika" suku bangsa dan kebudayaan bangsa. Akar budaya yang bertalian dengan nilai persatuan juga dapat kita lihat berdasarkan warisan budaya yang sangat monumental tersebut di dalam proses pembuatannya atau pendiriannya sudah dipastikan memerlukan tenaga manusia dalam jumlah yang sangat banyak, hal ini berarti bahwa rasa persatuanlah yang mendasari terselesaikan bangunan-bangunan tersebut.

Bangunan yang megah dan bermanfaat dalam bidang keagamaan dapat memberikan rasa bangga kepada rakyat yang membuatnya, sehingga dapat kita katakan di samping dimilikinya rasa persatuan dan kesatuan, berarti pula masyarakat pada masa itu memiliki rasa rela berkorban demi kepentingan negara. Bila rasa kesetiaan terhadap negara tidak tebal, tentunya yang kita saksikan sekarang adalah berupa peninggalan rumah-rumah permukiman, bukan bangunan-bangunan umum keagamaan.

Disamping warisan budaya yang berupa bangunan-bangunan tersebut, akar persatuan dan kesatuan dapat juga terlihat dari isi beberapa buah prasasti dan naskah-naskah kuna. Prasasti sebagai salah satu sumberdaya arkeologi merupakan sumber penulisan sejarah yang sangat penting, karena prasasti yang biasanya dikeluarkan oleh raja, sering sangat berguna di dalam usaha untuk mengungkapkan serta merekonstruksi kehidupan manusia dan budayanya pada masa lalu. Hal ini disebabkan oleh isi prasasti tersebut berbagai ragam persoalan, mulai nama raja dan tahun pemerintahannya, sistem kepegawaian, masalah kasta, sistem perpajakan, pola perekonomian, perdagangan, agama, kesenian, pertanian dan lain sebagainya (Atmodjo 1980). Juga berkaitan dengan luas suatu wilayah desa, bangunan suci (Ekawana 1985) serta banyak pula yang berisikan perintah raja yang harus ditaati oleh seluruh rakyat, maka sering pula prasasti tersebut dianggap sebagai undang-undang (Goris 1948). Prasasti juga dapat dijadikan sumber data didasarkan atas pertimbangan bahwa prasasti sebagai sumber sejarah kuna mempunyai kualitas yang sangat tinggi, karena dari isinya dapat diperoleh gambaran tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat yang sejaman dengan suatu prasasti (Boechari 1977).

Khusus yang berkaitan dengan nilai-nilai persatuan, seperti bersatunya raja dan rakyat terlihat jelas dalam berbagai kegiatan pembangunan seperti: di dalam membuat saluran air atau saluran irigasi pada masa pemerintahan Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara; serta kegiatan membuat bendungan dan saluran irigasi pada Jaman Majapahit (Subroto 1992). Kemudian di dalam naskah-naskah kuna seperti telah dikemukakan di atas seperti Kitab Nagarakertagama dan Sutasoma juga sudah menampakkan akar budaya persatuan dengan ungkapan Bhineka Tunggal Ika yang meskipun tujuannya pada waktu itu diperuntukkan penyatuan agama Hindu dan Budha, namun makna persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat bagio kemajuan negara. Demikian pula sumpah Palapa dari Mahapatih Gajah Mada, bila kita singkap nilainya juga

berintikan pada persatuan dan kesatuan seluruh wilayah Nusantara. Tanpa persatuan dan kesatuan masyarakat, Nusantara tidak akan pernah mencapai kemajuan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Makna yang terkandung di dalam sila ini adalah: Kedaulatan ada di tangan rakyat; dilandasi kebijaksanaan, serta persatuan hak dan kewajiban, serta musyawarah mencapai mufakat melalui wakil-wakilnya. Untuk sekian kalinya ditampilkan warisan budaya yang berupa bangunan candi, dikaji bertalian dengan nilai tersebut, di mana dapat kita yakini bahwa bangunan yang indah, megah, kuat serta berteknologi tinggi tersebut dapat dipastikan bahwa dibuat berdasarkan pemikiran yang sangat matang dan didasari atas musyawarah mufakat, karena diyakini bangunan yang dibuat tersebut sangat berguna bagi kepentingan orang banyak, sehingga kemungkinan semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sudah diterapkan sejak masa lampau, yang berarti. Kepemimpinan pada masa itu yakni raja telah mengadakan musyawarah dengan para birokrat kerajaan serta pemuka-pemuka desa di dalam usaha untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pembangunan. Proses terjadinya suatu kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat dapat kita lihat di dalam isi sebagian besar prasasti yang dikeluarkan oleh raja. Di dalam sebuah prasasti biasanya menyangkut suatu peristiwa yang terjadi di suatu desa, yang tidak terselesaikan di desa tersebut, dan akhirnya mohon penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi atau raja.

Dalam prasasti disebutkan sebab-musabab diturunkannya prasasti tersebut, dan di dalam penanganannya raja menyelesaikan peristiwa atau sengketa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh para pendeta kerajaan, para pejabat kerajaan; kepala desa yang bersangkutan. Berdasarkan musyawarah tersebut akhirnya raja memberikan keputusan terhadap peristiwa atau permasalahan tersebut. Dalam beberapa prasasti juga disebutkan bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh rakyat atau kepala desa, sering terlebih dahulu raja mengirim penyelidik untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut, sebelum dimusyawarahkan dan diambil keputusannya. Dalam hubungan dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama bagi setiap orang juga sudah terlihat sejak masa lampau, di mana setiap penduduk atau masyarakat bebas melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu, dan

perhatian bagi setiap orang yang mampu dan berjasa kepada negara selalu mendapatkan penghargaan rakyat tidak perlu takut untuk melaporkan kepada raja apabila ternyata pejabat yang bertugas di desanya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian jelas kita dapat diketahui bahwa azas musyawarah mufakat pada dasarnya juga telah kita kenal sejak ratusan tahun yang lalu.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dari sila kelima ini jelas terlihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dengan usaha untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, material spiritual yang memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban serta saling menghormati hak orang lain. Konsep ini sebenarnya telah dikenal sejak jaman dahulu dan dapat kita lihat dari berbagai peristiwa sejarah, seperti yang terekam dalam prasasti Yupa di kerajaan Kutai (Kalimantan) dengan dianugerahkannya beratus-ratus ekor lembu kepada masyarakat sekitar bangunan suci. Pembagian air dalam ukuran yang sesuai dengan luas sawah, seperti yang terlihat pada pembagian air dalam sistem subak di Bali, dan ada pula kerelaan dari pihak kerajaan yang memberikan hutan tempat keluarga raja berburu, kepada penduduk sekitarnya untuk dijadikan sawah. Sikap-sikap seperti tersebut di atas jelas menunjukkan sikap toleran dan sikap saling tolong menolong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bahkan sering pula termuat di dalam prasasti adanya pembebasan pajak yang sifatnya sementara, karena daerah tersebut tertimpa bencana. Di mana masyarakat yang terkena bencana tersebut dibebaskan dari pajak selama lima tahun, dan setelah itu mereka harus membayar pajak kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Jelas hal ini dapat memberikan rangsangan dan semangat untuk segera membangun perekonomian mereka, sehingga mereka dapat sejajar dengan keadaan perekonomian masyarakat sekitarnya. Di dalam rasa keadilan akan tempat berusaha juga terlihat adanya pembatasan daerah pemasaran bagi suatu hasil karya (komoditi), sehingga terlihat adanya persamaan kesempatan berusaha.

Dengan contoh-contoh yang telah diuraikan tersebut, jelaslah sudah bahwa pada dasarnya apa yang termuat di dalam sila-sila Pancasila sebagai ideologi negara, kesemuanya telah ada dan berkembang sejak manusia Indonesia ada dan berkembang di bumi Indonesia, dan telah mengalami berbagai peristiwa serta melalui berbagai puncak-puncak

kebudayaan yang dijadikan inspirasi oleh para pemimpin bangsa untuk menciptakan ideologi negara. Mengingat khasanah budaya yang kita miliki jumlahnya sangat banyak dan terdiri dari berbagai jenis, maka dapat dipastikan bahwa apa yang telah termuat dalam tulisan ini hanyalah merupakan sebagian kecil dari nilai-nilai luhur yang kita miliki dan belum terungkap, sehingga kesempatan untuk mengungkapkannya masih terbuka lebar dimasa-masa yang akan datang.

III

Dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat kiranya disimpulkan beberapa hal yang bertalian dengan keberadaan sumber daya arkeologi di dalam usaha untuk memantapkan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

- a) Melihat proses terciptanya ideologi negara Pancasila, maka dapatlah diyakini bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah merupakan mutiara-mutiara yang terkumpul dari akumulasi ide-ide dan gagasan asli budaya Indonesia yang telah berkembang berabad-abad lamanya, sehingga untuk meningkatkan, memantapkan, serta memperkokohnya dimasa depan, potensi sumber daya arkeologi Indonesia dapat sangat berperan di dalamnya, karena dengan kajian yang tepat sumberdaya arkeologi tersebut dapat menjaga kelangsungannya.
- b) Di beberapa negara maju, pengelolaan sumber daya budaya dikaitkan dengan ideologi negara telah dikembangkan. Hal ini bagi dunia arkeologi Indonesia tentunya perlu segera diantisipasi dengan memperluas visi arkeologi Indonesia, sehingga arkeologi Indonesia tidak hanya terbelenggu oleh lingkaran profesionalisme belaka, sehingga arkeologi Indonesia kurang mendapat tempat di hati masyarakat, karena tidak dapat memberikan sentuhan nyata.
- c) Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah salah satu program pembangunan Indonesia. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional ini, kiranya arkeologi Indonesia dapat lebih berperan dengan kajian-kajian yang selaras dengan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut, dengan mengusahakan berbagai kegiatan arkeologi nyata seperti dalam penerbitan dan pameran-pameran dan mensosialisasikan Undang-Undang Cagar Budaya sebagai usaha peningkatan kesadaran sejarah nasional.

- d) Kiranya tidaklah berlebihan bila dengan keterkaitan yang lekat antara arkeologi dan ideologi, arkeologi Indonesia dapat meyakinkan diri dengan berbagai kajiannya mengacu kepada sila-sila Pancasila dalam perkembangannya di masa depan, karena dalam Pancasila terkandung berbagai aspek kehidupan manusia, sesuai dengan tujuan umum ilmu arkeologi. Dengan demikian tidaklah berlebihan bila arkeologi Indonesia di masa depan dapat disebut dengan arkeologi Pancasila.

Daftar Pustaka

Atmodjo, M.M. Soekarto. K.

1980 "Struktur Pemerintahan Jaman Raja Jayasakti", *PIA I*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

1987 "Siksa Nekara Menurut Kitab Kunjarakarna", *AHPA*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Bachtiar, Harsja

1989 "Arkeologi dan Pembangunan Budaya", *PIA IV*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Boechari

1977 "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", *Majalah Arkeologi* Th. I No. 2. Jakarta: Lembaga Arkeologi Faksas. UI.

Callenfels, P.V. Stein

1981 *Epigraphia Balica*. Batavia: Kolff & Co.

Darmodiharjo, Darji

1981 *Orientasi Singkat Pancasila Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Ekawana, I Gusti Putu

1985 "Pemuka Desa dalam Jaman Bali Kuna". *REHPA II*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Goris, R.

1954 *Prasasti Bali I*. Lembaga Bahasa dan Budaya Universitas Indonesia. Bandung: NV. Masa Baru.

Hasan, Fuad

1989 "Arkeologi, Citra dan Wawasannya", *PIA IV* Yogyakarta. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Sedyawati, Edi & Subroto

1981 "Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrva", 700 Tahun Majapahit. Suatu Bungarampai. Surabaya: CV. Wisnu Murti.

Subroto, Ph.

1992

"Sektor Pertanian Sebagai Penyangga Kehidupan
Perekonomian Majapahit", *700 Tahun Majapahit. Suatu
Bunga Rampai*. Surabaya: CV. Wisnu Murti.

Soediman

1985

"Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Nasional", *PIA
III*, Ciloto. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Soekmono, R.

1982

"Mewariskan Warisan Sebagai Wajib", *Laporan Seminar
Pemugaran dan Perlindungan Bangunan Sejarah dan
Purbakala Nasional*. Depdikbud.

MANFAAT ARKEOLOGI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DI SULAWESI UTARA

I.G.N. Adnyana

1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan tentang masalah dunia kepariwisataan, dimana orang mempunyai pandangan berbeda-beda dan banyak yang bertentangan satu sama lain, lebih-lebih yang menyangkut adat istiadat budaya dan lingkungan hidup kelompok masyarakat yang langsung terlibat pariwisata.

Ditinjau dari segi sejarah pertumbuhan dunia pariwisata dua puluh lima tahun yang lalu dan perkembangan di masa-masa mendatang industri pariwisata di tanah air kita ini, tadinya hanya baru merupakan kemungkinan belaka dan saat sekarang sudah merupakan kehadiran nyata.

Sebelum sampai pada pembahasan akan diketengahkan secara sepintas tujuan arkeologi, yaitu untuk merekonstruksi kebudayaan manusia di masa lampau berdasarkan peninggalan yang merupakan bekas aktivitas manusia di dalam masyarakatnya. Telah disepakati oleh para ahli ada tiga jenis kebudayaan yang meliputi wujud ide, wujud aktivitas, wujud hasil karya (Koentjaraningrat 1977: 200-201). Maka di sini arkeologi berusaha merekonstruksi wujud-wujud hasil karya.

Pemanfaatan peninggalan purbakala dalam pembangunan pariwisata budaya perlu ditafsirkan secara historis arkeologis, agar peninggalan purbakala tersebut tidak kehilangan nilai keasliannya. Pengembangan pariwisata bertujuan:

1. Menggali sumber dana pembangunan dari luar negeri dalam bentuk devisa atau mata uang asing.
2. Menggali sumber dana pembangunan dari dalam negeri dalam bentuk meningkatkan pajak.
3. Meningkatkan kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat menghasilkan devisa, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Peninggalan purbakala adalah modal dasar yang tidak ternilai artinya dalam pariwisata budaya. Di sini arkeologi sangat bermanfaat untuk pengembangan nilai-nilai budaya bangsa dengan cara melakukan survei,

ekskavasi, dokumentasi, konservasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan sendiri mempunyai kepentingan dalam menyelamatkan, melestarikan warisan budaya. Tahun 1979 Direktorat Jendral Kebudayaan dan Direktorat Jendral Pariwisata menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan dan pengembangan warisan budaya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa, dan memperluas lapangan kerja, serta memperkenalkan budaya bangsa.

Potensi daerah ini harus segera digali untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang merupakan andil yang sangat penting dalam pengembangan budaya nasional dan pemantapan jatidiri bangsa dalam pengembangan lebih lanjut dari daerah ini untuk menjadikannya sebagai suatu obyek wisata budaya atau sejarah di masa datang, sehingga masyarakat luas akan semakin mengenal potensi sejarah yang telah dikandungnya.

2. Peranan Arkeologi Dalam Pembangunan Pariwisata Budaya

Di dalam kebijaksanaan pembangunan nasioanal pemerintah telah merumuskan arah kebijaksanaan pembangunan pariwisata pada Pelita VI sebagai berikut:

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional.

Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga ketat terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lain yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling menunjang dan saling menguntungkan, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Pengembangan kepariwisataan Nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Terutama dalam bentuk penggalakkan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata manca negara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan

benda dan khasanah bersejarah yang menggam-barkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa, serta didukung dengan promosi yang memikat.

Upaya mengembangkan obyek dan daya tarik wisata perlu kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pendidikan dan pelatihan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasaranan yang makin baik dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.

Kesadaran dan peranan aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan. Upaya lain untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan Indonesia dengan tetap menjaga nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa. Dalam upaya mengembangkan usaha kepariwisataan harus dicegah hal-hal yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya bangsa. Dalam pembangunan kawasan pariwisata, keikutsertaan masyarakat setempat terus ditingkatkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa obyek pariwisata yang ada di Sulawesi Utara antara lain:

- a) Wisata Budaya: Watu Pinawetengan (Minahasa), Makam waruga Sawangan (Minahasa), Makam Pahlawan Iman Bonjol (Minahasa), kerajinan kerawang sulaman (Gorontalo dan Sangir Talaud), Benteng Otanaha, Otahiya, Ulupahu (Kodya Gorontalo), Kuburan perang dunia II (Sangir Talaud), Bendungan Kesinggolan (Bolaang Mongondow), Lobang gua bekas pertapaan Jepang (Minahasa), Benteng-benteng Portugis (Minahasa).
- b) Wisata Bahari: Taman laut Bunaken (Minahasa), Tasik Ria (Minahasa), Pantai Dumbo (Gorontalo), Air Anjing (Bolmong), Batu Pinogut (Bolmong), Taman laut Soronde (Gorontalo), Pulau Kumeke (Bolmong), Btu Buaya (Bolmong).
- c) Wisata Alam Flora dan Fauna: cagar alam Tangkoko (Bitung), cagar alam Bone (Bolmong), Pemandian air panas (Minahasa), Sumaru Endo (Minahasa), pemandian potanga (Gorontalo), Pantai indah Dumboria (Gorontalo), pantai pemandian kolongan (Satal), Danau Moat (Bolmong), bukit Kasenggolan (Bolmong), Temboan Rurukan

- (Minahasa), Pulau Malosing (Bolmong), cagar alam Tangale (Gorontalo).
- d) Wisata Berburu: binatang langka seperti Anoa, burung Maleo dan Babi rusa di cagar alam Bone (Bolmong).
 - e) Wisata Olah raga: Pacuan kuda Ranomut (Manado), Pacuan kuda Maesa Tompasso (Minahasa), Pacuan kuda Kota Mobagu (Bolmong), Selam di Taman laut Bunaken (Minahasa).
 - f) Wisata Kesenian: Tari-tarian Cakalele (Minahasa), Tari Maengket (Minahasa), Tari Kabelana (Bolmong), Tari Gunde (Sangir Talaud), Tari Alabadiri (Satal), Tari Saronde (Gorontalo), Tari Pajongge (Gorontalo).

3. Manfaat Arkeologi Terhadap Pariwisata Budaya

Kalau kita lihat manfaatnya melalui pariwisata dapat memperkenalkan kebudayaan bangsa, kekayaan dan keindahan alam, keanekaragaman seni, budaya, sejarah dan peninggalan purbakala yang nantinya akan dapat memperkokoh wawasan Nusantara, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan stabilitas nasional.

Keberhasilan pengembangan pariwisata, perlu ditunjang oleh sektor-sektor lain yang terkait dan juga peran serta masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung.

Kalau kita lihat salah satu contoh bentuk peran serta masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan tersebut misalnya pembinaan seni budaya yang bermutu, pembinaan kepribadian, pembinaan keindahan, keramah tamahan dan sikap untuk senantiasa siap memberikan bantuan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para wisatawan.

Hal ini dapat kita manfaatkan untuk mendorong pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, menghidupkan kembali seni tradisional yang hampir punah serta meningkatkan mutu seni, baik seni tari, seni ukir, seni lukis maupun seni budaya lainnya. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat dikembangkannya pengenalan terhadap kekayaan budaya bangsa dan tanah air, meningkatkan rasa penghargaan terhadap seni budaya sendiri. Kontak-kontak langsung yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat yang dikunjunginya, sedikit banyak akan mengembuskan nilai hidup baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai kehidupan lain.

Selain nilai-nilai yang dimilikinya, manusia akan belajar menghargai nilai-nilai orang lain. Dalam hubungan dengan kegiatan wisatawan Nusantara maka masyarakat lebih mengenal bangsa dan tanah airnya sendiri, hal ini akan mendorong sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan sarana kuat dalam pembangunan bangsa. Melalui pariwisata ini akan dapat memperluas nilai-nilai pribadi, karena nilai pribadi asli yang ramah akan merupakan daya tarik bagi wisatawan. Pariwisata dapat mendorong terciptanya lingkungan hidup yang serasi dan harmonis yang merupakan salah satu tujuan wisatawan yaitu menginginkan suasana baru dari kejenuhan kehidupan sehari-hari mereka. Daerah yang diinginkan wisatawan adalah daerah yang tenang, panorama alam yang indah dan masih menonjol sifat-sifat aslinya dengan suasana lingkungan yang nyaman untuk beristirahat, oleh karena itu pembinaan pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan harus seiring dengan perkembangan pariwisata sebab lingkungan yang terpelihara merupakan salah satu komponen citra produk pariwisata.

4. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Arkeologi Untuk Pengembangan Pariwisata Budaya Di Sulawesi Utara

Melakukan inventarisasi terhadap semua peninggalan kepurbakalaan yang ada di Sulawesi Utara dan disertai dengan dokumentasi yang lengkap baik berupa gambar, foto slide dan film. Tujuannya inventarisasi mencari data sebanyak-banyaknya, baik itu berupa data penunjang lain yang dianggap perlu misalnya data lingkungan, informasi tentang kepurbakalaan yang mungkin masih diketahui oleh penduduk setempat. Berdasarkan hal ini akan dapat memberikan suatu seleksi mengenai peninggalan purbakala yang akan dijadikan pedoman rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Jenis Peninggalan Purbakala Inventaris Bagian Muskala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut: Kabupaten Minahasa:

1. Bekas Benteng di Desa Likupang, Kecamatan Likupang
2. Kubur Tua di Desa Gangga Kecamatan Likupang
3. Waruga di Desa Kokole Kecamatan Likupang 45 buah
4. Waruga di Desa Mangurer Kecamatan Likupang 5 buah
5. Waruga di Desa Batu Kecamatan Likupang 3 buah
6. Waruga di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe 42 buah

7. Waruga di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe 12 buah
8. Waruga di Desa Paniki Atas Kecamatan Dimembe 2 buah
9. Waruga di Desa Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi 210 buah
10. Waruga di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi 185 buah
11. Waruga di Desa Kawangkoan Kecamatan Airmadidi 50 buah
12. Waruga di Desa Kolongan Kecamatan Airmadidi 32 buah
13. Waruga di Desa Kuwil Kecamatan Airmadidi 33 buah
15. Waruga di Desa Kasar Kecamatan Kauditan 5 buah
16. Waruga di Desa Maumbi Kecamatan Airmadidi 21 buah
17. Waruga di Desa Tamuluntung Kecamatan Airmadidi 280 buah
18. Waruga di Desa Kema I Kecamatan Kauditan 11 buah
19. Gereja Tua di Desa Kema II Kecamatan Kauditan 1 buah
20. Mesjid Tua di Desa Kema III Kecamatan Kauditan 1 buah
21. Waruga di Desa Palamba Kecamatan Langowan 3 buah
22. Waruga di Desa Winubetan Kecamatan Langowan 12 buah
23. Waruga di Desa Minawale Kecamatan Langowan 22 buah
24. Waruga di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso 12 buah
25. Goa di Desa Tataran Kecamatan Tondano 1 buah
26. Batu Pinabetengan di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso 1 buah
27. Waruga di Desa Kanorang Kecamatan Kawangkoan 2 buah
28. Waruga di Desa Kayuuni Kecamatan Kawangkoan 2 buah
29. Waruga di Desa Talikurang Kecamatan Kawangkoan 20 buah
30. Waruga di Desa Uner Kecamatan Kawangkoan 1 buah
31. Waruga di Desa Kakaskasen Kecamatan Tomohon 6 buah
32. Waruga di Desa Woloan Kecamatan Tomohon 45 buah
33. Waruga di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon 30 buah
34. Waruga di Desa Kayawu Kecamatan Tomohon 6 buah
35. Waruga di Desa Matani Kecamatan Tomohon 2 buah
36. Waruga di Desa Sarongsong Kecamatan Tomohon 20 buah
37. Waruga di Desa Mimawale Kecamatan Tondano 70 buah
38. Waruga di Desa Koya Kecamatan Tondano 34 buah
39. Mesjid Tua di Desa Jawa Tondano Kecamatan Tondano 1 buah
40. Waruga di Desa Lolah Kecamatan Tombariri 10 buah
41. Waruga di Desa Tenga Kecamatan Tenga 1 buah
42. Waruga di Desa Langsot Kecamatan Tareran 2 buah
43. Gereja Tua di Desa Watumea Kecamatan Eris 1 buah
44. Gereja Tua di Desa Ratahan Kecamatan Ratahan 1 buah
45. Waruga di Desa Kaneyan Kecamatan Tareran 2 buah

46. Batu Bertulis di Desa Kaunaran Kecamatan Sonder 1 buah
47. Batu Tumotoa di Desa Leilem Kecamatan Sonder 1 buah
48. Batu Penjuru Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder 1 buah
49. Benteng Spanyol di Desa Amurang Kecamatan Tombasian 1 buah
50. Gereja Tua di Desa Laikit Matungkas Kecamatan Dimembe 1 buah

Kabupaten Dati II Sangir Talaud:

1. Bekas Kantor Kerajaan Tagulandang di Desa Balehumara Kecamatan Tagulandang 1 buah
2. Gedung Bekas Istana Raja Siau di Desa Tarorane Kecamatan Siau Timur
3. Goa Tangkorang di Desa Arangkaa Kecamatan Essang 1 buah

Kabupaten Bolaang Mangondow:

1. Makam Raja Dotu Manoppo di Desa Matali Kecamatan Bolaang
2. Makam Bogani Talu Pangayow di Desa Passi Kecamatan Passi
3. Batu Bogani di Desa Biga Kecamatan Kotamobagu
4. Makam Raja Bolaang di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang

Dilakukan pelestarian terhadap peninggalan kepurbakalaan yang ada agar selalu menarik bagi wisatawan. Pelaksanaan pelestarian melalui pemeliharaan yang teratur secara terus menerus supaya kekunaan yang telah ada tetap bersih pemeliharaannya, ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan juru pelihara yang ditempatkan oleh instansi yang berwenang atau bisa juga dilakukan oleh penduduk setempat dengan sistem mapalus. Pemugaran terhadap peninggalan-peninggalan purbakala dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis arkeologis yang telah berlaku agar nantinya tidak terjadi pemalsuan bukti sejarah yang dengan mengembalikan kebentuk aslinya. Penataan lingkungan untuk menjaga kelestarian, keindahan peninggalan purbakala dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan perlu diperhitungkan serta direncanakan dengan sebaik-baiknya, karena kawasan sangat tergantung terhadap keadaan setempat. Dalam kawasan ini perlu diperhatikan masalah sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan pariwisata tersebut seperti sarana angkutan yang cukup dan sepadan yang meliputi angkutan jalan raya seperti angkutan bus, taksi, dan angkutan udara, laut dan sungai, penyediaan sarana akomodasi berupa penginapan, losmen, hotel penyediaan restoran, biro perjalanan tempat penukaran mata uang

asing (Money changer), masalah kesehatan terutama di daerah-daerah obyek wisata perlu disediakan tenaga medis dan paramedis yang bertugas di lokasi wisata keamanan agar dapat memberikan kesan rasa aman di tempat-tempat obyek agar tetap terjaga secara baik. Keamanan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan Pasal 13 Inpres Nomor 9 Tahun 1969 sebagai berikut:

1. Tidak merugikan kebudayaan Indonesia
2. Dilakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, serta binatang-binatang (fauna) maupun tumbuh-tumbuhan (flora) yang dilindungi dalam margasatwa terhadap bahaya, kerusakan atau hilang dengan cara antara lain memperkuat atau meningkatkan pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku atau yang sudah ada dilakukan pengamanan terhadap usaha-usaha khas Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun regional yang mungkin terdesak oleh perkembangan industri pariwisata.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapatlah disusun suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat arkeologi dalam pembangunan pariwisata budaya adalah sangat besar dan bahkan merupakan salah satu modal dasar.
2. Dalam bidang sosial budaya pembangunan pariwisata dapat bermanfaat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan pariwisata sangat berkonotasi dalam pembangunan manusia seutuhnya.
3. Pengembangan pariwisata akan mendorong pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, menghidupkan kembali seni budaya tradisional yang hampir punah. Dengan adanya arkeologi akan dapat melestarikan kebudayaan bangsa.
4. Lingkungan yang serasi dan harmonis merupakan dambaan wisatawan, oleh karena itu pengembangan pariwisata akan mendorong pelestarian lingkungan alam Indonesia.
5. Meningkatkan kegiatan pariwisata akan merangsang peningkatan pendidikan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat sehingga wawasan berpikir dari masyarakat kita akan semakin luas seiring dengan gerak langkah pembangunan pariwisata.

6. Pada akhirnya usaha meningkatkan pengembangan pariwisata saja merupakan tanggung jawab dinas pariwisata atau instansi pemerintah yang terkait tetapi disini diharapkan pihak swasta atau serta masyarakat luas agar ikut berpartisipasi melainkan menjadi tujuan dan kepentingan kita semua. Ini berarti tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita bersama.

Daftar Pustaka

Anonim

- 1991 *Inventarisasi Peninggalan Purbakala di Propinsi Sulawesi Utara*, Manado: Kanwil Depdikbud

Koentjaraningrat

- 1976 *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia

Lubis, Mochtar

- 1993 *Budaya Masyarakat Dan Budaya Indonesia*

Pendit, Nyoman S.

- 1990 *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*

Ridjal, Fanzie dkk

- 1991 *Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan*

Wiwoho, B. dkk

- 1990 *Pariwisata Citra dan Manfaatnya*

- 1994 *Garis-Gari Besar Haluan Negara*. Jakarta: Tim Penyusunan Naskah Yayasan Bina Pembangunan BP7 Pusat

BALAI ARKEOLOGI PALEMBANG DAN PENELITIAN NASKAH (SEBUAH SUMBANGAN PEMIKIRAN)

Mujib

1. Pendahuluan

Sebelum membicarakan masalah ini lebih lanjut, saya ingin mengemukakan beberapa batasan pembicaraan agar tidak menimbulkan persepsi yang bercabang mengenai hal-hal berikut.

Yang dimaksudkan dengan Balai Arkeologi Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Palembang dan bertugas melaksanakan penelitian arkeologi di wilayah kerjanya yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (SK Mendikbud No. 0290/0/1992, tanggal 1 Juli 1992).

Dalam pada itu, yang dimaksud dengan naskah di sini adalah segala bentuk dokumen tertulis dan merupakan benda hasil karya manusia antara lain piagam-piagam (pertulisan-pertulisan). Piagam-piagam atau pertulisan-pertulisan itu ada yang ditulis pada batu dan ada pula yang ditulis pada logam (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1989: 54) dan tentunya pada benda-benda lainnya seperti kayu, kulit dan tulang binatang, dll. yang dapat ditemukan di ketiga wilayah kerja Balai Arkeologi Palembang dan merupakan peninggalan masa Klasik, Islam atau Kolonial, baik yang ditulis dengan aksara asli daerah, Arab, ataupun Latin. Ada empat tulisan yang terdapat dari sekian banyak naskah, yaitu tulisan Rencong, Melayu (Jawi, Jawu, Melayu, Arab, Arab gundul) Jawa Kuna dan Latin (Iskandar 1989: 5).

Dijadikannya Balai Arkeologi sebagai pokok bahasan dalam tulisan ini karena instansi ini baru saja berdiri, yaitu tahun 1992 dan para pegawainya pun 83,35% baru. Secara nalar kesempatan pengembangan dan pengaturannya akan lebih baik dibandingkan dengan instansi yang sudah mapan, mengingat segala sesuatu yang dibangun bersama sejak awal berpotensi besar untuk menjadi baik, baik dalam program, administrasi, maupun bentuk pelaksanaannya.

Tulisan ini juga dilatarbelakangi oleh keluhan Buchori yang mengemukakan bahwa masih banyak prasasti dan naskah yang belum

diteliti dan diterbitkan, terutama prasasti-prasasti dari masa Islam yang boleh dikatakan sampai sekarang tidak mendapat perhatian dari para sarjana. Ia berkesimpulan bahwa karena ketidakefektifnya penelitian epigrafi ini maka dampak yang ditimbulkannya adalah hasil usaha penulisan sejarah kuna Indonesia masih penuh dengan masa-masa yang gelap (Boechari 1977: 3). Juga Ayat Rochaeadi yang menyoroti naskah-naskah kuna daerah yang kurang mendapat perhatian dari kalangan peneliti (Ayatrochaedi 1991: 104).

Kedua pakar itu patut mendapat tanggapan dari para sarjana yang menggeluti penelitian naskah, mengingat proses pensejarahan suatu bangsa harus ditulis berdasarkan data dan bukti-bukti yang didapatkan dari setiap masa yang dilaluinya. Data serta bukti-bukti itu dapat diperoleh diantaranya dari naskah-naskah kuna yang terdapat di daerah. Para peneliti hendaknya bersikap obyektif dan tidak memihak terhadap suatu obyek penelitian naskah tertentu. Apalagi jika ini dikaitkan dengan keinginan untuk mengungkap bagaimana jati diri bangsa yang telah mengalami proses dinamika yang begitu panjang. Tentunya penelitian naskah-naskah kuna daerah ini akan sangat membantu.

Masalah benar atau tidaknya dugaan tentang adanya kekurangpedulian para epigraf terhadap penelitian naskah-naskah apa pun di daerah, apakah itu naskah-naskah klasik, Islam, kedaerahan, atau yang lain, bagi saya bukan masalah. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa dugaan adanya naskah-naskah kuna di wilayah kerja Balai Arkeologi Palembang itu patut mendapat perhatian.

Untuk itulah saya ingin menyumbangkan pemikiran yang tertuang melalui kertas kerja ini bagi pengembangan program dan pembinaan penelitian naskah-naskah kuna di wilayah kerja Balai Arkeologi Palembang.

2. Balai Arkeologi Palembang dan Program Penelitian Naskah

Daerah-daerah yang merupakan wilayah kerja Balai Arkeologi Palembang banyak ditemukan bangunan tinggalan purbakala, maka keyakinan akan ditemukannya banyak naskah kuna semakin bertambah kuat mengingat teori yang diungkapkan oleh Vivian T. Sukanda mengatakan: 'dimana terdapat peninggalan purbakala, di situlah juga terdapat ajaran yang berhubungan dengan aliran rahaniah, ilmu-ilmu beladiri (paguron) ilmu seni suara (beluk, tembang sunda) pusat keagamaan

(pesantren). Sebaliknya, dimana terdapat peninggalan naskah-naskah di situlah juga terdapat peninggalan purbakala' (Sukanda-Tessier V. 1982: 119).

Walaupun sejak berdirinya pada 01 Juli 1992, secara instansional Balai Arkeologi Palembang belum pernah memprogramkan dan mengadakan penelitian naskah-naskah kuna yang diyakini banyak terdapat di wilayah kerjanya itu, namun secara perorangan penelitian itu pernah dilakukan. Hal itu terjadi di samping belum tersedianya tenaga peneliti khusus permasyarakatan, juga disebabkan oleh sulitnya mendapatkan informasi tentang di mana saja naskah-naskah itu kini berada. Jika pun ada informasi tentang disimpannya naskah oleh salah seorang penduduk di suatu wilayah, maka ia pun merasa enggan untuk memperlihatkan naskah tersebut kepada orang lain termasuk para peneliti. Padahal semua orang menyadari betapa banyak sumbangan kajian naskah terhadap pengungkapan sejarah dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kandungan naskah lama mencakup semua hal yang berkenaan dengan kebudayaan dalam maknanya yang paling luas (Ayatrochaedi 1987: 103).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari Balai Arkeologi Palembang untuk mengadakan penelitian yang terencana dan sistematis terhadap naskah-naskah kuna yang terdapat di wilayah kerjanya, mengingat bahwa dengan mempelajari bahasa dan kebudayaan, kita akan memperoleh manfaatnya (Ayatrochaedi 1991: 104) bagi arkeologi dan sejarah kebudayaan Indonesia yang bertumpu pada kebudayaan daerah.

Penelitian naskah-naskah kuna terutama naskah-naskah daerah bukan sekedar penelitian terhadap naskah-naskah yang sudah ada dan sudah diinventarisasikan oleh suatu instansi, namun meliputi pra-penelitian (pencarian informasi keberadaan, pendataan, pendokumentasian dan inventarisasi naskah), baru kemudian masuk ke tahap penelitian fisik naskah, tulisan dan analisis isi naskah. Itulah problem yang harus kita pecahkan melalui tulisan ini.

3. Beberapa Masalah Penelitian Naskah

Untuk melakukan penelitian naskah-naskah kuna, Balai Arkeologi Palembang dihadapkan kepada masalah yang beraneka ragam, antara lain:

3.1 Masalah Instansional

3.1.1 Jaringan Kerja

Jaringan kerja adalah suatu tatanan tertentu untuk mengatur dan mengendalikan suatu instansi dan merupakan sistem yang berkaitan dengan beberapa instansi lain dalam menjalankan tugas. Balai Arkeologi Palembang yang statusnya merupakan “Unit Pelaksana Teknis” di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, selama ini tidak mempunyai garis komando kepada instansi yang lebih rendah. Ini menyebabkan Balai Arkeologi Palembang kurang mendapat support dari instansi pengelola kebudayaan terdepan. Contohnya, masalah data dan informasi adanya benda peninggalan purbakala di suatu daerah yang oleh Balai Arkeologi Palembang dianggap penting ternyata tidak dapat diperoleh langsung dari instansi (pelaksana) kebudayaan terdepan, mengingat antara instansi (pelaksana) kebudayaan terdepan dan tidak mempunyai garis komando dan instruksi dengan Balai Arkeologi langsung, maka konsekuensinya adalah ketidaklancaran arus informasi ke Balai Arkeologi Palembang.

Apabila Balai Arkeologi Palembang ingin memperoleh data tentang situs dan benda-benda arkeologis, karena satu-satunya jalan hanyalah melalui kerjasama kepada Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum serta Bidang: Muskala, Musjarla atau PSK pada Kanwil Depdikbud dimana sasaran penelitian berada.

Kedudukan dan status ke-UPT-annya itulah, maka Balai Arkeologi Palembang dalam menjalankan tugas penelitian itu dilakukan. Ini sangat ganjil mengingat kegiatan sendiri dan dilakukan di wilayah kerjanya harus minta izin kepada instansi lain yang induk departemennya sama, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berapa banyak waktu dan hari yang terbuang jika seluruh penelitian harus minta izin kepada pemerintah, juga instansi yang satu departemen, pada hal setiap instansi secara vertikal dari yang paling tinggi sampai pelaksana yang paling rendah harus dilalui. Berapa hari yang terbuang percuma hanya karena perizinan itu harus tetap dilaksanakan?

3.1.2 Kebijakan dan Skala Prioritas

Kebijakan adalah satu keputusan pimpinan Balai Arkeologi yang didapat melalui proses pertimbangan matang, baik dari pimpinan sendiri atau dari berbagai masukan, saran dan usul staffnya untuk dijadikan

program instansi tersebut, sedangkan skala prioritas adalah Pengutamaan pelaksanaan program yang telah disusun berdasar kesepakatan pelaksanaanya di instansi tersebut sesuai dengan kriteria, seperti guna dan manfaat yang akan didapatkannya.

Dalam suatu instansi, kebijakan dan skala prioritas selalu berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh instansi itu. Kebijakan penelitian arkeologi termasuk naskah adalah merupakan kewenangan Kepala Balai. Karena banyaknya program dan berbagai tujuannya, maka skala prioritas pelaksanaan penelitian memegang peranan penting. Sebagai contoh, di instansi itu ada seorang yang tertarik meneliti benda-benda peninggalan lain, namun ada juga orang yang tertarik pada naskah bagian dari artefak arkeologis. Sangat tidak mungkin kedua penelitian itu dapat dilaksanakan dalam satu masa anggaran mengingat keterbatasan dana dll. Untuk itu, dengan memperhatikan kepentingan dan manfaat yang akan didapat, maka salah satunya harus ditunda. Di situlah skala prioritas berperan penting dalam pengambilan keputusan.

3.1.3 Masalah Sumber Daya Manusia

3.1.3.1 Terbatasnya Tenaga Peneliti

Tenaga peneliti khusus purnaskahan yang dimiliki oleh Balai Arkeologi Palembang sampai saat ini baru seorang. Itupun khusus pembantu peneliti naskah-naskah kuna beraksara Jawi (aksara Arab berbahasa Melayu) serta beraksara dan berbahasa Arab, sedang peneliti yang menangani khusus naskah-naskah kuna beraksara dan berbahasa daerah belum dimilikinya. Padahal syarat untuk menjadi seorang peneliti suatu naskah kuna beraksara dan berbahasa apapun ia harus dapat membaca aksara itu dan dapat memahami dengan baik liku-liku kebahasaan yang dipergunakan dalam naskah itu (Subadio 1991: 9). Hal itu sangat menyulitkan instansi ini bila suatu saat dalam penelitian menemukan naskah kuna beraksara dan berbahasa daerah, sedangkan di wilayah kerja Balai Arkeologi terdapat banyak sekali bahasa daerah, seperti Bahasa Komeri, Ogan, Pasemah, dan Sekayu di Sumatera Selatan, Bahasa Kerinci, Melayu Jambi di Jambi, Bahasa Rejang, bahasa Lebong di Bengkulu dll. Adapun peneliti naskah-naskah yang beraksara dan berbahasa Jawa kuna serta Sansekerta, walaupun sampai saat ini tenaga penelitiannya belum dimiliki oleh Balai Arkeologi Palembang, namun ini dapat ditanggulangi oleh peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi

Nasional dan Balai Arkeologi lain mengingat pemerhati naskah beraksara ini cukup banyak.

3.1.3.2 Tidak Memahami Tulisan/Bahasa Setempat (Daerah)

Seperti yang telah disebutkan bahwa di samping jumlah tenaga peneliti naskah kuna yang dimiliki Balai Arkeologi Palembang masih terbatas, dan diantara mereka belum ada yang mampu memahami aksara dan bahasa daerah, maka akibat yang muncul adalah penelitian naskah yang beraksara dan berbahasa daerah belum pernah dilakukan. Jika penelitian naskah kuna daerah itu pernah dilakukan, maka kajian yang dihasilkannya masih sangat jauh dari harapan.

Masalah aksara dan bahasa daerah ini pernah disinggung oleh Ayat Rochaeadi bahwa alasan ketidakmampuan para peneliti untuk dapat memahami bahasa dan aksara tersebut diajukan hanya untuk membela diri mereka terhadap ketidaktahuan tentang khazanah budaya daerah (pribumi). Tidak ketinggalan pula pemerintah disorotinya karena tidak mendukung terhadap pelajaran bahasa dan kebudayaan daerah (Ayat Rochaeadi 1991: 104). Juga diutarakan oleh Iskandar bahwa generasi muda suatu daerah pun banyak yang tidak mampu untuk membaca aksara daerahnya sendiri dan tidak pula memahami bahasanya (Iskandar 1989: 3).

Menanggapi hal di atas, sebenarnya jika kita dapat memahami aksara dan serta bahasa daerah itu sangat mengasikan. Sebab dengan itu kita dapat mengungkap lebih banyak mengenai kebudayaan dan adat istiadat penduduk suatu daerah. Sayangnya Balai Arkeologi Palembang belum memiliki tenaga peneliti yang mampu membaca aksara dan bahasa daerah di wilayah kerjanya.

3.1.3.3 Kesempatan

Kesempatan adalah kesempatan peneliti untuk meneliti naskah-naskah kuna di wilayah kerja Balai Arkeologi Palembang. Walaupun kesempatan itu mungkin ada, namun tidak selamanya tenaga peneliti yang mengkhususkan diri dalam penelitian naskah kuna itu berkesempatan meneliti naskah kuna karena kebijakan dan prioritas yang diterapkan oleh Balai Arkeologi Palembang mengingat saran dan usulan dan usulannyapun selama ini belum ada dan belum pernah diajukan. Penelitian arkeologis yang selama ini dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Palembang baru sebatas pada tinggalan-tinggalan lain yang diprioritaskan, itu pun masih

banyak yang belum terjangkau. Oleh karena itu, jika hendak mengadakan penelitian naskah kuna maka tentu akan dipertimbangkannya secermat mungkin.

3.2 Masalah Lapangan dan Teknis

3.2.1 Informasi

Yang dimaksud dengan informasi di sini data tentang benda-benda tinggalan arkeologis yang didapat oleh perorangan atau instansi dan telah diolah serta mempunyai arti.

Balai Arkeologi Palembang merasa kesulitan untuk mendapat informasi tentang benda-benda arkeologis termasuk naskah-naskah kuna dari suatu daerah yang menjadi wilayah kerjanya. Hal ini disebabkan jalinan kerjasama antar instansi pelaksana kebudayaan secara rinci belum terjalin. Masing-masing instansi saling menunggu dari yang lain untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya.

Oleh sebab itu masalah yang timbul dalam penelitian naskah kuna bukan saja terletak pada bagaimana cara peneliti itu dapat membaca dan memahami suatu aksara dan bahasa yang terdapat dalam naskah itu, namun juga terletak pada pra-penelitian, yaitu bagaimana cara mereka mendapatkan data dan informasi tentang dimana naskah itu berada, bagaimana cara menelusurinya, serta bagaimana cara agar ia dapat melihat naskah itu dan menelitinya lebih lanjut.

3.2.2 Pembuktian

Pembuktian adalah pembuktian terhadap informasi tentang adanya naskah kuna yang disimpan oleh seorang penduduk. Untuk membuktikan ada atau tidaknya naskah yang disimpan oleh penduduk kadang sangat sulit, karena mereka menganggap bahwa naskah itu merupakan benda pusaka warisan leluhur yang harus dihormati, tidak boleh sembarang orang melihat tanpa terlebih dahulu mengadakan upacara adat. Hal itu tentu menyulitkan peneliti untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya naskah itu, belum lagi jika naskah itu telah berpindah tangan karena hak waris atau sebab lain seperti karena dijual, tentu itu akan menambah kesulitan tersendiri. Perbuatan semacam itu dapat dianggap sebagai penelantaran naskah.

Penelantaran naskah-naskah kuna oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat telah lama terjadi di Indonesia seiring dengan buaian mimpi-mimpi yang menjerumuskan mereka ke dalam pemikiran hayali: “Apabila seseorang berhasil mendapatkan dan menguasai benda-benda kuna tertentu, maka ia akan mendapat keberuntungan yang luar biasa”. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kesengajaan dan upaya mereka untuk memiliki benda-benda tersebut dengan berbagai dalih sehingga mereka mengenyampingkan dan tidak ambil peduli terhadap manfaat yang dapat diambil dari naskah-naskah kuna bagi kepentingan kemajuan sejarah bangsa dan ilmu pengetahuan.

Penelantaran itu semakin komplrit sewaktu mereka tidak lagi memanfaatkan koleksi-koleksi naskahnya itu demi apapun. Hal itu lantaran mereka semakin terpuruk dalam pemikiran: “Inilah warisan nenek moyang kita yang perlu dilestarikan (Jawa, diuri-uri)” tanpa sedikitpun ingin mengetahui mengapa para leluhurnya mewariskan naskah-naskah tersebut. Apalagi terbersit untuk mengetahui isi dan kandungan maknanya serta kegunaannya dalam proses pensejarahan di Indonesia, ditambah pula dengan keterbatasan minat para peneliti permasyarakatan terhadap naskah-naskah tertentu.

Oleh karena itu tidak heran, jika banyak naskah-naskah kuna yang terbungkalai, tidak terjangkau oleh pikiran-pikiran mereka lantaran mereka tidak lagi dapat memahami bahasanya, apalagi isi, makna dan kegunaannya.

Penelantaran terhadap naskah-naskah kuna itu bukan hanya terjadi lantaran adanya pencurian-pencurian/pemindahan, penghancuran, perjualbelian dan penyelundupan terhadap benda-benda itu, namun juga dapat terjadi lantaran seseorang tidak lagi dapat memanfaatkannya secara wajar.

3.2.3 Kondisi Naskah

Kondisi naskah adalah keadaan baik atau rusaknya naskah yang tersimpan oleh perorangan atau kelompok tertentu.

Naskah-naskah yang tersimpan itu ada yang masih baik dan ada yang sudah rusak. Kerusakan itu boleh jadi lantaran kertas dan bahan penulisannya telah lapuk, atau tinta dan goresannya tidak nyata lagi. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan lain bagi peneliti naskah karena ia tidak lagi dapat membacanya dengan baik dan benar dan akhirnya akan menimbulkan masalah baru, yaitu masalah-masalah di atas, kemungkinan lain yang akan kita temui adalah aksara dan bahasa yang dipergunakan

dalam naskah itu belum tentu dapat kita pahami, mengingat aksara dan bahasa berupa aksara dan bahasa daerah setempat, seperti tulisan Rencong (Encong) dll., dalam ragam bahasa daerah dan gaya dialeknya yang tidak semua orang dapat memahaminya kecuali orang-orang tertentu.

4. Upaya Pemecahan Masalah

Begitu kompleknya masalah yang dihadapi Balai Arkeologi Palembang dalam penelitian naskah-naskah kuna di wilayah kerjanya, menuntut kita untuk dapat memikirkan jalan keluarnya sehingga di masa-masa selanjutnya diharapkan naskah benar-benar dapat menyumbangkan maknanya bagi arkeologi dan penulisan sejarah kebudayaan.

4.1 Masalah Instansional

4.1.1 Jaringan Kerja

Kerjasama antar instansi yang sama-sama berkecimpung dalam kebudayaan adalah salah satu bentuk pemecahan yang sangat tepat. Sebab kita tahu bahwa tidaklah mungkin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan akan membentuk instansi baru sebagai jaringan struktural dan segaris dalam komando di bawah Balai Arkeologi. Oleh karena itu saling pengertian dan kerjasama yang lebih rinci antar instansi terkait itulah yang mungkin dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian arkeologi masalah perizinan kepada induk instansi wilayah dan pemerintahan setempat, di samping berbelit-belit juga sangat menyita waktu. Untuk itu perizinan tersebut hendaklah ditiadakan dan diganti cukup dengan pemberitahuan. Untuk dapat menghapuskan perizinan itu dibutuhkan kearifan dari semua pihak instansi yang terkait demi terciptanya efesiensi waktu dan efektifitas kegiatan penelitian yang dapat memberikan hasil yang maksimal.

4.1.2 Kebijakan dan Skala Prioritas

Jika kebijaksanaan dan prioritas penelitian arkeologi pada Balai Arkeologi Palembang hanya kepada obyek-obyek artefaktual dan situs-nya, maka naskah-naskah yang ada di wilayahnya tidak mungkin dapat tertangani. Oleh karena itu, dalam setiap kali penelitian disamping bertujuan untuk mencapai tujuan utama seperti termaktub dalam *research design*, maka program penelitian naskah itu hendaknya diimplementasi-

kan. Artinya, tim juga memperhatikan keberadaan naskah kuna di lokasi penelitian itu. Jika perlu tim dapat menggandakan naskah tersebut. Ini dimaksudkan untuk menekan biaya penelitian yang sangat terbatas. Jika ini dapat diterima, maka akan mengurangi beban biaya penelitian seperti jika penelitian naskah itu dilaksanakan tersendiri.

4.1.3 Sumber Daya Manusia

Jika tenaga peneliti naskah terutama naskah-naskah kuna kedaerah-an secara khusus belum tersedia maka tenaga yang ada dapat diberikan pengarahan dan bimbingan agar diantara mereka ada yang peduli dan bersedia menjadi peneliti naskah-naskah itu, walaupun termasuk pekerjaan sulit untuk diterima. Sebab tidak semua peneliti tertarik untuk meneliti naskah-naskah kuna itu, namun paling tifak ini dapat memberikan image bahwa naskah-naskah itu mendapat perhatian. Jika pengarahan itu tidak berhasil, maka perlu adanya penambahan tenaga peneliti khusus pernaskahan, dengan catatan agar mereka menekankan tugasnya di bidang penelitian naskah-naskah kuna daerah itu. Siapa lagi yang hendak memperlihatkan kebudayaan daerah melalui penelitian naskah ini jika bukan pemerintah?

Lain lagi jika masalahnya adalah tenaga peneliti yang dimiliki Balai Arkeologi Palembang tidak memahami aksara/bahasa naskah daerah, maka pemecahannya adalah dengan mengkhususkan peneliti tersebut untuk menggeluti naskah-naskah yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, tetapi tetap memperhatikan naskah-naskah daerah. Ini bisa dicapai dengan cara mengkursuskannya untuk mempelajari dan memperdalam aksara dan bahasa daerah itu.

Di samping itu, melindungi orang yang bisa membaca aksara dan menguasai bahasa daerah tertentu juga perlu dilakukan dan memintanya agar ia mau mengajarkan pengetahuan tulis baca aksara daerah itu kepada peneliti yang telah dimiliki oleh Balai Arkeologi Palembang atau kepada generasi muda diaerahnya agar mereka dapat melestarikan aksara dan bahasa daerah itu. Aksi ini, di samping bermanfaat agar aksara dan bahasa daerah tersebut tidak punah dan menjamin kelangsungan kebudayaan daerah itu. Ini dapat dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, baik pembiayaannya atau pelaksanaannya.

Kesempatan meneliti naskah-naskah daerah secara terpisah dan tersendiri mungkin saja dapat dilakukan, namun tetap harus memper-

hitungan secermat mungkin manfaat dan hasil penelitiannya itu, mengingat penelitian itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kadang membosankan. Oleh karena itu, jika kita hendak mengadakan penelitian naskah daerah maka harus memikirkan program jangka pendek yang berguna untuk dapat mengumpulkan data-data dan informasi naskah yang ada di wilayah kerja Balai Arkeologi Palembang sebanyak mungkin serta menginventarisasikannya. Selanjutnya membuat program jangka panjang untuk meneliti naskah-naskah yang telah diinventarisasikan itu sesuai dengan tema, maksud dan tujuan penelitian.

Jika tidak mungkin mendapat kesempatan untuk memprogramkan penelitian naskah-naskah kuna daerah itu secara tersendiri, maka dapat mengimplementasikannya dalam penelitian arkeologi, dalam kesempatan itu juga hendaknya tim penelitian juga mencari informasi tentang ada tidaknya naskah-naskah kuna di lokasi penelitian itu. Ini bukan berarti tim harus meneliti naskah-naskah itu sendiri, tetapi naskah-naskah itu dapat digandakan atau disalinnya, dan pada kesempatan lain naskah-naskah itu dapat diteliti oleh peneliti yang berminat.

4.2 Kondisi dan Situasi Lapangan

4.2.1 Informasi

Kelambatan ataupun ketiadaan informasi yang berkaitan dengan penemuan naskah kuna dirasakan sekali oleh Balai Arkeologi Palembang sehingga sampai sekarang belum memiliki data mengenai daerah mana sajakah yang berpotensi menyimpan naskah-naskah kuna itu. Ini disebabkan inventarisasi benda-benda peninggalan purbakala yang berupa naskah itu belum dapat diperoleh dari instansi yang berwenang. Untuk menanggulangi masalah itu hendaknya Balai Arkeologi Palembang bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi itu. Ada baiknya jika pelaksana kebudayaan terdepan, seperti pemilik kebudayaan diefektifkan dengan terlebih dahulu membekali mereka melalui penataran dengan materi tentang manfaat dan pentingnya benda-benda peninggalan purbakala termasuk naskah bagi kepentingan arkeologi, sejarah dan kebudayaan nasional. Akhirnya mereka dapat membuat laporan dan informasi tentang kegiatan dan hasil yang telah mereka capai, karena pendataan benda-benda peninggalan purbakala termasuk benda-benda yang bergerak, seperti naskah itu selalu mereka lakukan.

Di samping itu alangkah baiknya jika instansi yang bertugas menangani kebudayaan (Bidang Muskala, Musjarla, PSK, dan Jarahnitra) mengadakan tukar menukar informasi, seperti saling kirim laporan bulanan dll. Dengan demikian informasi kegiatan instansi pengelola kebudayaan tidak terabaikan.

4.2.2 Pembuktian

Untuk membuktikan informasi ada tidaknya, naskah yang disimpan oleh salah seorang penduduk di suatu daerah seperti yang mungkin telah diinformasikan orang atau instansi lain adalah dengan cara mendekati masyarakat, baik perorangan atau kelompok. Pendekatan melalui perorangan, artinya pendekatan terhadap penyimpan naskah, sedangkan pendekatan melalui kelompok maksudnya adalah pendekatan terhadap kerabat (kaum, pesirah, suku) penyimpan itu agar mereka dapat merelakan naskahnya untuk diperiksa dan diteliti oleh peneliti. Tetap biasanya mereka tidak begitu saja bisa memberikan izin, kecuali dengan syarat-syarat tertentu misalnya harus diadakan upacara atau syarat lain. Jika demikian halnya maka kita harus menuruti dan mengabdikan syarat-syarat yang mereka ajukan itu, termasuk membiayai upacaranya.

Yang menjadi masalah, jika upacara itu harus dilaksanakan di lain waktu, maka otomatis kita tidak akan dapat melihat naskah waktu itu. Kita harus menunggu datangnya waktu yang telah mereka tentukan itu.

Jika demikian, maka kita dapat memecahkannya dengan cara menyesuaikan jadwal penelitian kita dengan waktu diadakannya upacara kenduri adat atau upacara penurunan pusaka itu.

4.3 Kondisi Naskah

Pada waktu mengadakan penelitian naskah-naskah kuna yang ada kemungkinan kita akan menemukan naskah yang telah rusak. Artinya naskah itu tidak mungkin lagi dapat diteliti sama sekali, kecuali hanya dapat diinventarisasikan, dan dilaporkan sebagaimana keadaannya. Namun kemungkinan lain kita akan menemukan naskah yang hampir rusak. Bagaimanapun caranya maka kita harus menyelamatkannya seperti memberi bahan pengawet, atau menyalinnya agar naskah itu tetap lestari. Sebab mungkin naskah itu masih bisa dibaca walaupun tidak bisa difoto copy. Karena itu alangkah baiknya seandainya naskah itu dapat disalinnya.

Lain lagi masalahnya bila naskah-naskah itu ternyata bertuliskan aksara dan berbahasa daerah, sedang kita tidak mungkin dapat membaca aksaranya dan tidak pula memahami bahasanya. Maka solusinya, peneliti harus belajar membaca dan mengerti aksara dan peneliti naskah harus mampu membaca dan memahami aksara dan liku-liku kebahasaannya yang terdapat pada naskah itu (Subadio 1991: 9).

5. Penutup

Balai Arkeologi Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, berkedudukan di Palembang dan bertugas mengadakan penelitian arkeologi di wilayahnya yang meliputi provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Palembang selalu didasarkan atas program yang telah dibuat dan ditetapkan oleh instansi itu. Namun program penelitian naskah sampai sekarang belum pernah dibuat, mengingat kebijakan dan skala prioritas yang telah sampai sekarang belum pernah dibuat, mengingat kebijakan dan skala prioritas yang telah disepakati bersama antara Kepala Balai dengan para penelitiannya adalah penelitian obyek-obyek peninggalan purbakala yang tidak bergerak dahulu. Tetapi, masa-masa mendatang penelitian naskah juga akan diprogramkan, mengingat naskah sebagai artefak juga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penelitian arkeologi dan penulisan sejarah kebudayaan Indonesia.

Untuk mengadakan penelitian naskah, Balai Arkeologi Palembang dihadapkan kepada dua masalah: (1) masalah yang bersifat instansional, seperti masalah jaringan kerja, kebijakan dan skala prioritas, kelancaran informasi dan Sumber Daya Manusia; (2) masalah lapangan dan lokasi penelitian, seperti masalah informasi keberadaan naskah, adat-istiadat setempat yang berkaitan dengan naskah, pembuktian ada tidaknya naskah di suatu tempat, dan keadaan naskah itu sendiri, serta kesempatan untuk meneliti naskah itu.

Masalah-masalah tersebut, dapat dicarikan solusinya, yaitu: masalah-masalah instansional, yang berkaitan dengan jaringan kerja, dapat dipecahkan melalui kerja sama kongkrit dan konstruktif antar instansi yang mengurus kebudayaan dan saling tukar-menukar informasi perizinan sebaiknya ditiadakan dan cukup diganti dengan pemberitahuan, sedangkan

masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian di lapangan, dapat diselesaikan melalui pendekatan masyarakat secara baik dan mengikuti saran mereka serta perlindungan terhadap benda-benda yang ditelitinya.

Daftar Pustaka

Ayatrochaedi

- 1991 "Naskah: Sumber Ilmu yang Terlupakan", dalam *Naskah dan Kita*. Jakarta: FSUI.

Boechari

- 1977 "Manfaat Studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuna Ditinjau dari Segi Sejarah dan Arkeologi", dalam *Majalah Arkeologi*, No. 1 Oktober 1977. Jakarta: FSUI.
- 1977 "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", dalam *Majalah Arkeologi*, Th. I No. 2 Desember 1977. Jakarta: FSUI.

Direktorat Jenderal Kebudayaan

- 1989 *Himpunan Perlindungan Benda Cagar Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 1993 *Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Iskandar, et. al.

- 1989 *Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuna Daerah Jambi II*. Jakarta: Ditlinbinjarah.

SK Mendikbud Nomor 0290/0/1992, Tanggal 1 Juli 1992. Tentang Pendirian Balai Arkeologi.

Sukanda - Tessier, V.

- 1982 "Laporan Penelitian Purbakala Dalam Rangka Inventarisasi Naskah di Jawa Barat dan Penelitian Purbakala", dalam *10 Tahun Kerjasama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan EFFEO*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

LANGKAH-LANGKAH INSTITUSIONAL DAN MASA DEPAN ARKEOLOGI INDONESIA

R.P. Soejono

1. Suatu Bentuk Awal

Perhatian kepada benda-benda purbakala, dalam hal ini khususnya bangunan-bangunan kuno pernah diberikan oleh Kertanegara pada akhir abad ke-13; dalam salah satu prasastinya dikatakan bahwa ia tekun dalam usaha perbaikan bangunan-bangunan kuno. Usaha untuk memberi penjelasan tentang sejarah bangunan-bangunan kuno, yang sebagian diperbaiki atas perintah Hayam Wuruk, untuk pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Mpu Prapanca yang dituliskannya dalam buku karangannya Nagarakertagama pada tahun 1365. Usaha memperbaiki bangunan-bangunan/peninggalan-peninggalan kuno pada masa-masa itu dilakukan semata-mata demi kepentingan dinasti raja yang memerintah untuk memperingati leluhur raja-raja yang pernah mendirikan bangunan-bangunan itu. Malahan pada abad-abad sebelumnya dapat dijumpai usaha-usaha untuk memperingati kebesaran raja yang mendirikan bangunan itu atau keagungan dewa yang dipuja, seperti terjadi dengan usaha perbaikan, pembaharuan atau pemekaran pada candi-candi Mendut, Borobudur, Kalasan dan Badut. Dalam hal ini institusi kerajaan yang bergerak memberikan perhatian kepada benda-benda/peninggalan-peninggalan kuno, tetapi dalam batas-batas kepentingan raja-raja, tercapuk didalamnya bagi kepentingan keluarga dan leluhurnya.

Itu semua adalah contoh bahwa di Indonesia perhatian terhadap benda/peninggalan kuno, baik dalam bentuk perbaikan maupun penulisan tentang sejarahnya, yang kini menjadi bagian dari pada kegiatan arkeologi, telah diterapkan oleh individu-individu atau kelompok individu yang tergabung dalam suatu bentuk organisasi yang memiliki kepentingan dalam melestarikan peninggalan-peninggalan kuno. Dapatlah dikatakan bahwa institusi kerajaanlah yang memelopori kepedulian terhadap peninggalan kuno yang merupakan kepentingan raja dan rakyatnya. Hal semacam inipun akan dapat dijumpai tidak hanya pada lingkungan kerajaan-kerajaan di Nusantara, tetapi juga pada kelompok-kelompok suku bangsa Nusantara yang tetap melestarikan peninggalan-peninggalan kuno yang diwariskan leluhurnya. Adanya individu yang bergerak dalam

perbaikan terhadap ataupun penulisan tentang peninggalan-peninggalan kuno, ia adalah pelaksana dari institusi yang memiliki peraturan, hukum dan tujuan tertentu.

2. Peran Individu

Perhatian terhadap benda-benda purbakala yang kemudian ditulis, timbul beberapa abad setelah berakhirnya masa perkembangan kerajaan-kerajaan, di kalangan orang Barat yang datang dengan tujuan memperoleh serta menguasai hasil bumi di Indonesia. Gubernur-jenderal Rijcklof van Goens mengunjungi Kraton Mataram pada tahun 1656 serta menceritakan tentang makam-makam kuno yang mengandung sangat banyak emasnya dan dijarah pada waktu itu. Penulisan-penulisan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang dari berbagai profesi mengisi periode perhatian individu (*individual interest*) dimulai pada abad ke-17 dan ke-18 dengan perhatian individu yang memuncak pada abad ke-19 dalam berbagai bidang kepurbakalaan meliputi aspek-aspek penelitian serta pemugaran peninggalan/monumen purbakala.

Dalam abad ke-17 tercatat kegiatan yang telah dilakukan oleh Scippio yang pada tahun 1687 memberi keterangan-keterangan tentang peninggalan megalitik di sekitar Bogor. Abad ke-18 mencatat peristiwa kegiatan kepurbakalaan oleh beberapa individu yang merupakan awal dari pelaksanaan kerja-dasar arkeologi di Indonesia. G.F. Rumphius, seorang naturalis, mengumpulkan kapak-kapak batu neolitik dan kapak-kapak perunggu yang diuraikannya bersama-sama dengan nekara perunggu dalam bukunya berjudul *D'Amboinsche Rariteitkamer* pada tahun 1705. Ia berusaha memberikan interpretasi tentang benda-benda kuno yang dikumpulkan dan dijumpainya dalam perjalanan, dalam batas pengetahuan yang dikuasainya pada waktu itu. C.A. Alons membuat laporan atau deskripsi tertulis yang pertama tentang kompleks Percandian Prambanan pada tahun 1733, sedangkan François van Boekholtz melakukan pengukuran untuk pertama kalinya di kompleks Prambanan tersebut. Gubernur-Jenderal VOC, Van Imhoff, memberikan interpretasi pada tahun 1746 bahwa candi-candi di Jawa didukung oleh aliran Brahmin (Hinduistik), termasuk Candi Borobudur. Abad ke-19 merupakan puncak kegiatan individu yang berhubungan dengan penanganan peninggalan purbakala dalam bermacam-macam aspeknya. Aspek-aspek tersebut meliputi penelitian, inventarisasi, penggambaran, pemotretan, pengukuran,

pemugaran, pembuatan laporan, perlindungan dll. Kalau pada masa-masa sebelumnya berlangsung kegiatan-kegiatan pribadi oleh orang secara sporadik tanpa adanya hubungan yang dapat saling menunjang hasilnya, maka pada abad ke-19 terjadi kegiatan-kegiatan dari perorangan yang melebarkan perhatiannya terhadap jenis obyek dan cara penangannya. Pihak penguasa kolonial beberapa kali telah memberikan bantuan/perhatian untuk melancarkan kegiatan-kegiatan perorangan sehubungan dengan pelestarian dan keamanan benda-benda purbakala. Dari sederetan nama orang yang dapat dianggap sebagai perintis pembentukan suatu organ yang akan memangku tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan semua jenis kepurbakalaan, beberapa diantaranya dapat dikemukakan di sini secara singkat.

Di antara mereka yang ditonjolkan di sini adalah pribadi-pribadi yang dikenal di dunia arkeologi di Indonesia seperti misalnya Thomas Stamford Raffles (1812) menulis buku tentang kepurbakalaan dan adat-istiadat di Jawa; J.E.G. Brumund (1814) yang membuat deskripsi keku-noan di Jawa; H.C. Cornelius (1805), H.N. Sieburgh (1840) dan F.C. Wilson (1849) yang membuat gambar-gambar dan lukisan candi-candi seperti candi Sari, Kalasan Sewu dsb.; Isodore van Kinsbergen (1873) yang memotret candi, di antaranya candi Borobudur; C. Leemans (1873) yang menyusun monografi Borobudur dan R.D.M. Verbeek (1891) yang menulis tentang kekunoan di Jawa meliputi a.l. 671 bangunan kuno/ candi; C.G.C. Reinwardt (1816) pendiri Kebun Raya Bogor yang bergiat dalam aspek perlindungan peninggalan purbakala, dan Eugène Dubois (1891) yang meneliti dan menemukan *Pithecanthropus* di Kedungbrubus dan Trinil. Keaneka ragaman sasaran perhatian pribadi-pribadi pada abad ke-19 ini meliputi obyek-obyek prasejarah, candi dan prasasti; dengan menggunakan teknik-teknik kerja yang lazim pada waktu itu, yakni survei, deskripsi, penggambaran, pemotretan, penggalian dan pemugaran. Kegiatan-kegiatan arkeologis ini terus ditingkatkan dan disempurnakan pada tahap awal abad ke-20 yang merupakan masa koordinasi dan konsolidasi kegiatan kepurbakala-an di Indonesia.

3. Awal dan Pengembangan Wadah Institusi Arkeologi

Kegiatan-kegiatan arkeologi yang didasari perhatian pribadi-pribadi pada saat-saat tertentu memerlukan penampungan untuk menyalurkan serta mengatur usaha-usaha ke arah pencapaian hasil kegiatan secara

maksimal. Dalam periode kepedulian dan perhatian kepada peninggalan-peninggalan kuno seperti tergambar di atas tadi, terjadi beberapa kali usaha untuk mengadakan penanganan yang lebih mantap dan terarah dalam penentuan arti serta latar belakang, pelestarian dan perlindungan sasaran. Usaha ini berupa pembentukan wadah yang memiliki kemampuan dalam ketenagaan, fasilitas dan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Pada tahun 1778 didirikanlah sebuah lembaga yang antara lain mendorong untuk penelitian di bidang sejarah, kepurbakalaan dan adat istiadat Indonesia, bernama: **"Bataviaaschs Genootschap van Kunsten en Wetenschappen"**. Hingga sekarang lembaga ilmiah ini melanjutkan kegiatan sebagai lembaga pemerintah dengan nama **"Museum Nasional"**. Kira-kira setengah abad kemudian, yaitu pada tahun 1822, muncul suatu bentuk panitia dengan maksud melakukan pencarian, pengumpulan dan penyimpanan benda-benda purbakala di bawah nama **"Commissie tot het Opsporen, Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen"**. Ternyata panitia ini tidak berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pada tahun 1875 atas prakarsa J.W. Ijzerman didirikan sebuah perkumpulan peminat kepurbakalaan yaitu **"Oudheidkundige Vereeniging"** yang berusaha dalam penelitian, pengumpulan dan pemeliharaan benda-benda purbakala, terutama kompleks percandian besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa bagian penting lain dalam abad ke-19 ini yang perlu dikemukakan di sini adalah penggalian kepurbakalaan pertama di kompleks Candi Dieng di Jawa Tengah, usaha mentranskripsi prasasti-prasasti dan naskah-naskah Hindu-Jawa. Yang dapat dianggap sebagai pendiri-pendiri pertama arkeologi di Indonesia ialah a.l. Th. S. Raffles, R.M. Friederich dan J.W. Ijzerman yang telah meletakkan dasar-dasar arkeologi pada abad ke-19. Usaha pembentukan wadah untuk melaksanakan dan menyempurnakan kegiatan kepurbakalaan ditambah dengan kegiatan-kegiatan individu yang memuncak pada abad ke-19, telah meletakkan dasar untuk pengembangan arkeologi pada tahapan-tahapan berikutnya. Indonesia sebagai salah satu koloni negeri-negeri Barat di Asia Timur telah menerima dampak pertumbuhan *scientific archaeology* Eropa Barat pada abad ke-19 ini.

Dalam tahap awal abad ke-20 hingga pecahnya Perang Dunia II kegiatan-kegiatan arkeologi makin meningkat. Hal ini karena adanya campur tangan penguasa/pemerintah secara resmi dalam usaha membentuk wadah yang semi resmi menuju ke sebuah bentuk wadah resmi yang dikendalikan dan diawasi oleh penguasa/pemerintah Hindia Belanda.

Organisasi kepurbakalaan disempurnakan atas dorongan a.l. H. Kern, L. Serrurier, W. Ijzerman, W.P. Groeneveldt dan G.P. Rouffaer dengan mengambil Vietnam dan India sebagai contoh dan terbentuklah pada tahun 1901 sebuah komisi, yaitu **"Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera"** yang diketuai oleh J.H. Brandes. Pada tahun itu juga dibentuk sebuah komisi yang mendampingi komisi tadi dengan nama **"Commissie van Bijstand voor het Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera."** dipimpin oleh H. Kern. Sekretaris dari komisi belakangan ini adalah Rouffaer. Dasar-dasar kegiatan arkeologi yang diletakkan pada abad ke-19 dikembangkan lebih lanjut pada abad ke-20 dengan organisasi purbakala sebagai pusat dan penyelenggara kegiatan. Dalam periode kerja komisi ini dimulai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dengan supervisi pemerintah secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan survei dan dokumentasi peninggalan arkeologis, meskipun terbatas di Jawa dan Madura. Meskipun banyak menghasilkan inventaris dan penjelasan-penjelasan tentang peninggalan arkeologis, dalam Laporan-laporan Tahunan (*ROC*), komisi ini dipandang kurang efektif, karena perhatian dan bantuan pemerintah tidak selalu tercurah serta tidak berlangsung konsisten. Setelah Brandes meninggal pada tahun 1905, komisi menjadi lumpuh, juga karena sifatnya sebagai badan non-formal hanya menggantungkan diri pada kekuatan seorang individu saja. Untuk menghindari kesenjangan-kesenjangan selanjutnya, sedangkan perhatian terhadap peninggalan kepurbakalaan makin meningkat, maka komisi ini dilikwidir dan dibentuklah pada tahun 1913 sebuah badan pemerintah yang bernama **"Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch Indie"** yang terkenal dengan sebutan **"Dinas Purbakala"**. Yang ditunjuk untuk pertama kali memimpin **"Oudheidkundige Dienst"** (*OD*) ini adalah N.J. Krom. Dengan penanganan langsung oleh pemerintah Hindia Belanda, kegiatan kepurbakalaan yang dilakukan oleh *OD* makin luas, tidak terbatas pada beberapa wilayah tertentu saja, tetapi meliputi seluruh wilayah Indonesia (dahulu Hindia Belanda). Di samping meneruskan penanganan aspek-aspek arkeologi seperti yang telah dilakukan sebelum ini, maka setiap kekunoan dari setiap periode, dari berbagai bentuk dan ciri (Hindu-Buddha, Islam, Eropa, Cina dll.), bidang epigrafi, perencanaan program kegiatan secara cermat serta penerbitan/publikasi hasil kegiatan secara teratur merupakan tugas yang dibebankan pada *OD* dalam melanjutkan kegiatan arkeologi dari abad-abad sebelumnya di Indonesia. Obyek-obyek

sasaran arkeologi secara resmi dilindungi secara hukum dengan dikeluarkannya “*Monumenten Ordonantie*” pada tahun 1931. Dalam waktu kegiatan abad ke-20 sampai saat pecahnya Perang Dunia II telah sangat banyak hasil kegiatan mengenai problem semua aspek arkeologi yang pada periode itu merupakan topik-topik penting dalam pengembangan arkeologi dapat dicapai, berkat terciptanya suatu wadah institusi resmi untuk menampung kegiatan-kegiatan arkeologi. Hal yang menentukan pula dalam berhasilnya *OD* melaksanakan tugas-tugasnya sampai pecahnya Perang Dunia II adalah ketekunan dan kesungguhan pelaksana-pelaksana Belanda, baik pimpinannya maupun para ahli dan teknisi yang memikul beban tugasnya masing-masing. Hasil kerja dan landasan yang telah ditinggalkan/diwariskan *OD* kepada kita sekarang ini patut dipelajari dan diteladani, bila kita ingin melanjutkan tugas-tugas kepurbakalaan yang seimbang dengan kemajuan perkembangan arkeologi pada dewasa ini.

4. Masa Depan Arkeologi Indonesia

Setelah melalui phase “*ups-and downs*” dalam meneruskan serta memikul tugas arkeologi yang diwariskan *OD* kepada kita, pada waktu ini setelah 50 tahun merdeka, perlu kita perhitungkan apakah kita telah mampu dan berhasil mengembangkan arkeologi sesuai dengan derap langkah *OD* selama 30 tahun eksistensinya di Indonesia dan pengalaman arkeologi selama kurang lebih 2 abad pengembangan Institusi Arkeologi dalam bentuk *OD* tercapai setelah lebih dari satu abad bergulat dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam memecahkan arti dan makna benda-benda/peninggalan kuno yang ditemukan tersebar dan tercecer di seluruh kawasan Nusantara. Kemampuan dan ketekunan pribadi pada mulanya memegang peranan, tetapi pada akhirnya hanya kemampuan dan ketekunan terpadu dalam bentuk institusi yang berhasil dan harus digunakan sebagai sarana untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan benda kepurbakalaan.

OD yang dilanjutkan oleh Dinas Purbakala kini sejak tahun 1975, yaitu selama 21 tahun, telah dipisah menjadi dua bentuk wadah yang masing-masing memikul tugas-tugas khusus, yakni tugas penelitian yang dibebankan kepada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan tugas pemeliharaan dan perlindungan yang diselenggarakan oleh Ditlinbinjarah. Kedua institusi ini masing-masing telah berusaha melakukan tugasnya

secara maksimal, meskipun kendala-kendala yang dihadapi itu cukup banyak. Beberapa hal yang dapat diupayakan agar kedua institusi itu berhasil perlu dinyatakan di sini yaitu:

1. Masing-masing institusi bekerja maksimal dan perlu mengadakan koordinasi yang lebih terencana.
2. Masing-masing institusi berusaha secara maksimal bergerak mandiri, tanpa bergantung pada institusi arkeologi dari luar Indonesia, baik dalam hal sarana maupun prasarana.
3. Mengimbangi situasi dan kondisi kerja dengan peningkatan kemampuan tenaga-tenaga pelaksana arkeologi. Perencanaan *training programs* untuk tenaga-tenaga pelaksana bersama-sama institusi lain yang berkaitan dengan arkeologi (Universitas, Museum, Laboratorium dsb.).
4. Menciptakan fasilitas-fasilitas untuk analisis dan dating data arkeologi di lingkungan institusi arkeologi di Indonesia secara sadar dan terencana, supaya hasil-hasil penelitian dapat secepatnya diperoleh dan dapat pula melepaskan diri dari ketergantungan dari luar Indonesia.
5. Meningkatkan dan menyempurnakan sifat-sifat dan spirit kerja tenaga pelaksana arkeologi agar penuh dedikasi dan mampu bekerja tanpa pamrih.

Pada akhirnya cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat terkemuka dalam bidang arkeologi harus terus dipupuk, mengingat kekayaan kepurbakalaan Indonesia, dari sejak adanya manusia pertama hingga hasil prestasi pada periode-periode selanjutnya, sangat banyak dan melimpah.

PENGEMBANGAN MUSEUM DALAM PENGADAAN DAN PENGKAJIAN KOLEKSI ARKEOLOGI

Sri Soejatmi Satari

Pendahuluan.

Museum menurut definisi ICOM merupakan lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, bukti material manusia dan lingkungannya. Yang termasuk dalamnya adalah:

1. Lembaga-lembaga konservasi, ruangan pameran atau galeri yang secara tetap diadakan oleh perpustakaan dan pusat-pusat kearsipan.
2. Cagar alam, situs arkeologi dan etnografi, peninggalan dan situs sejarah, yang mempunyai sifat museum karena kegiatannya dalam mengumpulkan, merawat dan mengkomunikasikannya (kepada masyarakat).
3. Lembaga-lembaga yang memamerkan spesimen-spesimen hidup seperti kebun-kebun botani dan binatang, akuarium dan sebagainya.
4. Suaka alam.
5. Pusat-pusat pengetahuan, dan planetarium.

Kelima hal tersebut di atas diberlakukan di Indonesia, benda-benda yang dipamerkan terbatas pada artefak yang dipamerkan dalam ruangan, flora dan fauna yang diawetkan atau replikanya, bagian dari benda-benda alam seperti meteor. Ada beberapa perkecualian yang kita temukan, ialah adanya beberapa museum yang memamerkan benda-bendanya di tempat terbuka (*open-air museum*), misalnya museum prasasti di Tanah Abang, DKI. Pembatasan jenis koleksi museum termaktub dalam UU no. 5 th 1992, yang dijabarkan dalam PP no. 19 th 1995 mengenai Penyimpanan, Perawatan dan Pemanfaatan BCB di museum.

Menurut jenis koleksinya, museum terbagi atas dua jenis:

- a. Museum umum, yang koleksinya terdiri dari berbagai jenis obyek ilmu pengetahuan dan kesenian.

- b. Museum khusus yang mempunyai koleksi satu jenis obyek ilmu pengetahuan atau satu jenis obyek ~~kesenian~~, misalnya museum seni lukis.

Yang termasuk museum umum di Indonesia adalah Museum Nasional dan museum-museum negeripropinsi. Kedua jenis museum ini menganut sistem klasifikasi masing-masing. Koleksi di Museum Nasional dibagi atas koleksi-koleksi:

1. Prasejarah
2. Arkeologi
3. Relik Sejarah
4. Naskah
5. Numismatik
6. Etnografi
7. Seni Rupa
8. Geografi
9. Keramik Asing.

Koleksi di museum Negeri Propinsi terdiri dari 10 jenis:

1. Geologika
2. Biologika
3. Etnografika
4. Arkeologika
5. Historika
6. Numismatika/Heraldika
7. Filologika
8. Keramologika
9. Koleksi Seni Rupa
10. Teknologika.

Dapat kita lihat di sini bahwa di Museum Nasional dibedakan antara Prasejarah dan Arkeologi; yang terakhir ini meliputi artefak Hindu-Buddha, artefak dari masa Islam dan sesudahnya termasuk relik sejarah, museum-museum propinsi dalam hal koleksi Arkeologi mengikuti Puslit Arkenas.

Mengenai struktur organisasi museum, pada umumnya terdiri dari Kepala dan Bagian/subbag. Tata Usaha, Kelompok Kurator yang menangani koleksi kelompok Edukator yang memberikan bimbingan edukatif kepada pengunjung, kelompok Preparator yang mempersiapkan pameran, kelompok Konservator yang bertugas merawat benda-benda koleksi,

ditambah dengan perpustakaan yang merupakan sarana penunjang yang penting.

Dengan dasar adanya klasifikasi 10 jenis koleksi, maka baik untuk kurator maupun edukator akan sangat ideal, bahwa tenaga yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu yang mendasari koleksi tersebut, dengan catatan bahwa untuk Geologi dimaksudkan juga Geografi, sedang bentuk Biologiika termasuk pula manusia, flora dan fauna.

Jarang ada museum yang mempunyai 10 jenis koleksi tersebut. Koleksi yang dihimpun, sesuai dengan kebijakan pemerintah terutama berupa peninggalan manusia, alam dan lingkungannya dari bumi Indonesia, agar dikenal oleh bangsa sendiri dan menimbulkan kebanggaan akan prestasi bangsa dan juga meningkatkan wawasan nusantara. Bila ada koleksi yang berasal dari luar maka fungsinya adalah sebagai perbandingan dan pengenalan budaya asing.

Dari sepuluh jenis koleksi akan kita fokuskan perhatian kita pada koleksi Arkeologi.

Koleksi Arkeologi di museum.

Koleksi Arkeologi di museum didapatkan dengan berbagai cara:

1. Hasil pembelian, sebagai akibat dari aktivitas pengadaan koleksi. Dapat pula dilaksanakan ganti rugi, bila koleksi tersebut berupa temuan penduduk di lapangan. Umumnya ganti rugi dilaksanakan oleh Ditlinbinjarah, yang kemudian diserahkan ke museum
2. Hasil hibah dari seorang kolektor atau pemilik benda.
3. Pinjaman, baik dari museum lain ataupun pemilik yang didasarkan atas perjanjian.
4. Hasil penelitian baik survei ataupun ekskavasi yang dilakukan oleh Puslit Arkenas dan instansi lain yang diberi wewenang.
5. Hasil sitaan polisi, lewat Ditlinbinjarah. Biasanya benda-benda ini ditemukan ketika akan diselundupkan ke luar daerah atau ke luar negeri. Benda-benda tersebut baru diterima oleh museum bila proses peradilannya telah

Yang harus dihindari oleh tim pengadaan koleksi adalah membeli barang curian, barang yang masih dalam sengketa ataupun faksifikat.

Di dalam museologi dikenal berbagai bentuk koleksi,

1. Benda realia, ialah benda asli.
2. Replika, tiruan/tuangan dari aslinya hingga bagiannya yang rinci, misalnya replika Arca Manjusri dan Prajnaparamita

3. Miniatur, ialah ukuran mini dari benda aslinya. Masih ada perdebatan mengenai dimasukkannya miniatur sebagai koleksi. Bila miniatur tersebut dibuat pada masa sekarang dan dibuat dari bahan lain serta merupakan miniatur dari benda tak bergerak, misalnya miniatur Candi Borobudur dari kayu sawo, maka miniatur tersebut tidak dimasukkan sebagai koleksi melainkan sebagai penunjang pameran. Bila miniatur tersebut dibuat dari masa lampau, terutama berupa barang bergerak, maka miniatur tersebut dapat dianggap sebagai koleksi, misalnya miniatur kapak perunggu. Yang tidak termasuk di sini adalah miniatur dengan tujuan komersial atau sebagai cendera mata.

Satu hal yang dikenal di dunia Arkeologi tetapi belum disebarluaskan di kalangan permuseuman adalah falsifikat atau benda palsu. Falsifikat ini ada dua jenis, ialah bila tiruan benda mirip benda asli dan oleh pedagang antik dilakukan sebagai benda kuno. Pemalsuan jenis kedua berupa barang baru, umumnya dibuat dari perunggu yang bentuknya melenceng dari aselinya karena bentuk dan atributnya rekaan sendiri, atau terjadi karena ketidaktahuan si pembuat, misalnya Arca Brahma yang berkepala tiga karena ia meniru dari foto saja. Bantuan seorang pakar dalam menentukan keaslian sebuah benda sangat diperlukan. Hal yang merepotkan muncul bila koleksi falsifikat ini dihibahkan oleh seorang pemilik dermawan yang tidak mengetahui bahwa benda-benda tersebut tidak asli.

Falsifikat tidak hanya ditemukan pada benda-benda perunggu saja, tetapi juga pada emas. Penelitian atas komposisi emas diperlukan. Tidak semua benda falsifikat harus dibuang. Beberapa diantaranya dapat disimpan di gudang (*storage*) untuk dipelajari lebih lanjut, misalnya kandungan apa saja yang dipunyai oleh sebuah arca palsu, ciri-ciri mana yang menandai arca palsu?

Seperti sudah disebutkan di atas, tugas sebuah museum adalah mengumpulkan, mencatat, merawat, dan memanfaatkan benda-benda warisan, yang di sini berupa benda arkeologi. Acapkali karena keharusan menghabiskan dana dan kekurangan pengetahuan mengenai arkeologi, maka terjadi kesalahan dalam membeli. Kesalahan ini mungkin juga bukan dari pihak museum, tetapi kesalahan dalam penunjukan anggota tim, dan masih adanya anggapan bahwa pengadaan benda-benda arkeologi sama dengan pengadaan inventaris kantor. Persiapan yang matang harus dilakukan oleh tim, antara lain membuat peta temuan arkeologi serta mengacu kepada daftar benda-benda cagar budaya yang telah dibuat,

meskipun ada kemungkinan bahwa benda-benda tersebut tidak dapat dibeli. Yang kedua dibuat proposal lengkap tentang tujuan mengadakan koleksi. Apakah menambah data yang sudah ada tentang warisan budaya dari masyarakat tertentu, apakah untuk mengumpulkan benda yang langka dan unik tanpa memperhatikan konteksnya, apakah membuat suatu penjaminan benda yang dibuat dari bahan yang sama sehingga tampak perubahannya dari masa ke masa, apakah melengkapi mandala arca yang sudah ada, meneliti masyarakat pembuatnya dan sebagainya. Untuk itu tim perlu melengkapi diri dengan berbagai alat dan sarana tertentu. Kendalanya adalah bahwa tim pengadaan koleksi ini harus bersaing dengan pemburu barang antik yang berkeliaran. Biasanya tim ini diikuti oleh seorang kurator, yang sebaiknya seorang arkeolog. Adakalanya diminta bantuan atau nasehat dari seorang arkeolog dari perguruan tinggi bila di tempat tersebut kebetulan ada. Di dalam pencatatan oleh seorang registrar diperlukan informasi yang akurat tentang koleksi baru tersebut. Dari sini menjadi tugas seorang kurator untuk mengidentifikasi kemudian menganalisa benda tersebut. Informasi kepustakaan dan pengetahuan yang mendalam diperlukan di sini. Tak kurang pentingnya peranan seorang pemandu/edukator yang harus menyampaikan kepada pengunjung.

Untuk ini diperlukan pengetahuan yang luas yang berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya dan kemampuan untuk menyampaikan secara menarik. Hingga saat ini jumlah arkeolog yang bekerja di museum masih kurang, ruangan dan kesempatan untuk mengadakan penelitian masih perlu digalakkan. Jabatan fungsional bagi para petugas museum akan memacu penelitian dan penulisan tentang koleksi Arkeologi.

Pemakaian komputer untuk mencatat data koleksi, asal perolehannya, jenisnya dan jumlahnya, tetapi belum diadakan komputer untuk misalnya menggambarkan bentuk artefak, ukuran, bahan dan sebagainya. Hal ini telah ada di negara lain.

Untuk penajaman analisis seorang arkeolog yang bekerja di museum ada baiknya ia diikutsertakan dalam penelitian, terlebih ekskavasi yang dilakukan instansi yang berwenang. Dengan demikian ia akan mempunyai catatan lengkap mengenai benda tersebut, cara menemukan latar belakang sejarah dan masyarakat pendukungnya sehingga dengan demikian ia akan dapat memberikan *story-line* yang lengkap. Kegiatan pengadaan koleksi dan penelitian akademis saling berkaitan. Penelitian tidak akan dapat dilaksanakan tanpa artefak, dan artefak ini sudah tertata sebagai koleksi

museum, museum merupakan tempat terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadakan penelitian. Seperti kata Nicholas Thomas, Presiden Dewan Arkeologi Inggris:

Kurator yang berorientasi kepada penelitian yang berada dengan satu bangunan dengan sampel-sampel; dan koleksi yang berkaitan. Bagi saya sangat masuk akal. Sudah waktunya peranan kurator ditingkatkan peranannya yang pasif sebagai “penjaga koleksi” menjadi aktif dalam memberikan sumbangan untuk penelitian. Sangat menarik kata-kata Eames (1969), bahwa: Perbedaan antara satu museum dengan museum lainnya sangat menarik, tetapi perbedaan/keanekaragaman ini akan membahayakan bila ukuran kepakaran (*standard of scholarship*) yang dianggap memadai di museum propinsi dan museum lokal berbeda dari ukuran kepakaran di pusat, karena setidaknya-tidaknnya dari segi arkeologi, koleksi di daerah sama pentingnya”.

Penelitian merupakan salah satu cara pemanfaatan museum. Pemanfaatan lain adalah untuk pameran. Ada tiga jenis pameran yang dapat dilakukan sebuah museum:

1. Pameran tetap, yang berlangsung antara 5-10 tahun. Sebagian besar koleksi masih disimpan di ruang penyimpanan (*storage*).
2. Pameran temporer, mengenai salah satu topik yang berlangsung dari 7 hari hingga 3 bulan. Biasanya topiknya disesuaikan dengan peringatan hari bersejarah, misalnya Peringatan Tahun Emas R.I.
3. Pameran keliling yang termasuk *oureach programme*, ialah pameran di luar dari lokasi museum, misalnya di salah satu pulau, di kabupaten dan sebagainya. Tujuannya adalah memperkenalkan koleksi museum, budaya setempat/koleksi yang berasal dari daerah tersebut atau memperkenalkan budaya daerah lain. Dalam mengadakan pameran ini para penyelenggara, terutama preparator dan edukator harus mempersiapkan satu paket baik koleksi benda, replikanya, foto dan lain-lain. Penyebarluasan publisitas melalui berbagai media perlu diadakan. Di samping mempersiapkan pameran, para pengelola museum juga harus mengikutsertakan masyarakat yang datang berkunjung, dengan mengadakan survei, pameran jenis manakah yang paling digemari pengunjung dan kegiatan sampingan mana yang menarik, misalnya dalam mengadakan kuis, lomba dan lain-lain.

Menurut pengamatan Pott ada tiga jenis motivasi yang mendorong masyarakat berkunjung ke museum;

1. Faktor artistik. Pengunjung menikmati keindahan benda-benda yang dipamerkan.
2. Faktor intelektual atau edukatif, dimana pengunjung menginginkan melihat tidak hanya benda yang dipamerkan, tetapi juga proses pembuatannya, fungsinya, penggunaannya, dan sebagainya.
3. Faktor romantik atau evokatif, dimana pengunjung membayangkan keadaan benda dalam lingkungannya yang aneh, misalnya bila ada pameran tentang stupika dari Pejeng, pengunjung membayangkan tentang kehidupan di asrama pendeta pada masa dibuatnya stupika tersebut

Untuk memenuhi keinginan-keinginan pengunjung tersebut maka ditampilkanlah beberapa metode penyajian yang sesuai:

1. Metode penyajian artistik
2. Metode penyajian intelektual atau edukatif
3. Metode penyajian romantis atau evokatif

Pada umumnya museum mempergunakan metode pertama dan kedua, atau gabungan keduanya. Metode ketiga memerlukan persiapan penelitian lebih mendalam tentang artefak dan lingkungannya. Pameran semacam ini pernah diadakan bekerja sama dengan Puslit Arkenas, misalnya pameran tentang Manusia Purba.

Sudah saatnya bahwa inisiatif dan perencanaan pameran evokatif lebih sering diajukan oleh pihak museum. Di atas sudah disebutkan bahwa museum bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan nasional dan menyebarkan pengertian Wawasan Nusantara.

Pameran dengan tema Wawasan Nusantara merupakan ciri khas Indonesia. Sampai saat ini pameran Wawasan Nusantara menampilkan benda-benda etnografika. Sudah saatnya bahwa benda-benda arkeologis juga dijadikan tema. Pameran Wawasan Nusantara ini penting karena menampakkan kebhinnekatunggalikaan, tetapi juga persamaan-persamaan dalam budaya Indonesia.

Pameran di museum juga dimanfaatkan untuk pariwisata. Untuk ini diperlukan kerja sama erat lintas sektoral. Wisatawan dalam dan luar negeri memerlukan sesuatu sebagai kenangan atas kunjungannya. Karena itu toko cenderamata merupakan sarana penunjang yang penting.

Disamping museum umum, kita mempunyai museum khusus yang erat hubungannya dengan arkeologi adalah museum situs yang didirikan dekat sebuah situs. Museum khusus tingkat nasional yang menjadi warisan dunia tengah dipersiapkan di Sangiran.

Penutup

Untuk pengembangan sebuah museum, khususnya untuk pengembangan koleksi arkeologi beserta pemanfaatannya, seorang arkeolog dapat berbuat banyak. Untuk hal ini tidak hanya disiplin ilmunya yang penting, tetapi juga imajinasinya yang kuat dan rasa estetis akan dapat menciptakan suasana dan tingkat keilmuwan yang kondusif untuk meningkatkan citra museum.

ARKEOLOGI: SEBAGAI PENDIDIKAN ATAU KESENANGAN

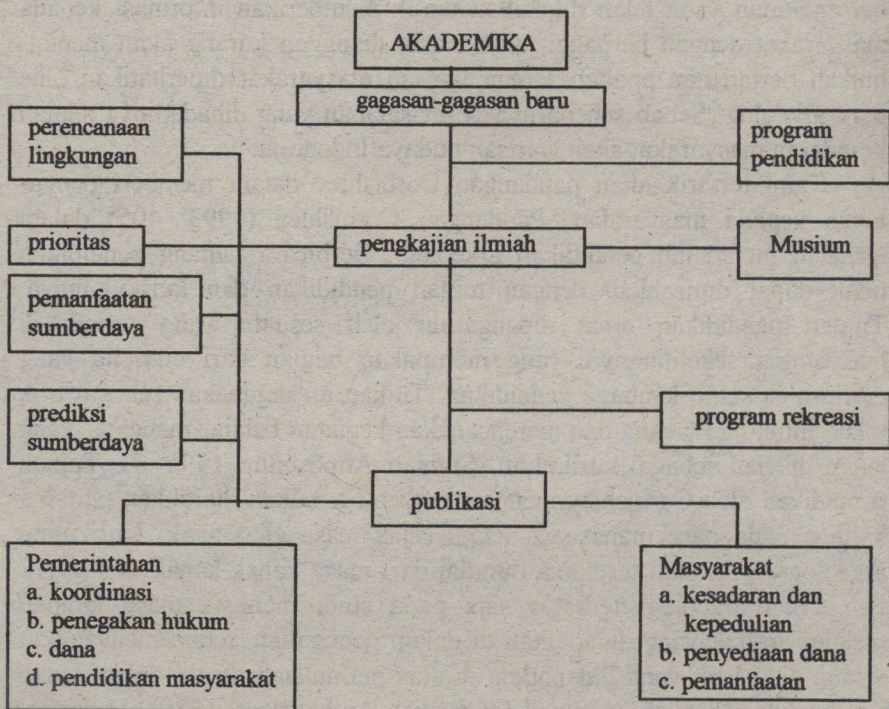
Sri Utami Ferdinandus

Perhatian arkeologi di Indonesia telah lama dikenal dengan istilah *Oudheidkunde* atau Ilmu Purbakala. Para sarjana pada mulanya hanya menitikberatkan penelitian pada pendaftaran, pencatatan dan pemugaran (Soekmono 1977: 1-22). Perhatian mula-mula diberikan kepada sisa-sisa kebudayaan kuna yang sebagian besar berupa hasil-hasil karya seni, seperti candi-candi dan arca-arca pada masa pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan pada umumnya mempersyaratkan pengenalan akan kebudayaan India Kuna yang bersumber terutama pada sumber tertulis. Namun, dalam penelitian masa kini perhatian lebih khusus dipusatkan apa yang terjadi di Indonesia sendiri dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh dan terperinci mengenai ihwal perkembangan dalam ruang lingkup yang lebih sempit dan untuk lebih menyoroti saling berkaitnya faktor-faktor penyebab perkembangan dari pada untuk menjelaskan asal-usul suatu perwujudan unsur kebudayaan tertentu. Selain data artefak yang menjadi pokok penelitian tersebut tidak hanya berdasarkan sumber tertulis saja tetapi juga menganalisa artefak-artefaknya sendiri (Sedyawati 1985: 2-3).

Seperti dikatakan oleh Timbul Haryono (1995: 1) studi arkeologi bukan saja mempelajari masa lampau manusia berdasarkan atas benda-benda yang ditinggalkan, namun dalam pelaksanaannya studi arkeologi tidak dapat dipisahkan dengan konteks ruang baik dalam skala mikro maupun makro. Arkeologi pada masa kini dikenal sebagai ilmu yang meneliti masa lampau berdasarkan benda-benda dengan melakukan metode-metode seperti halnya ilmu lainnya. Seperti dijelaskan oleh Charles R. Mc Gimsey (1978: 417) bahwa arkeologi bukan semata-mata hanya mempelajari masa lampau saja tetapi juga harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masa sekarang dan masa akan datang. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-undang RI no. 4 tahun 1982 mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan dalam warisan budaya adalah suatu unsur lingkungan hidup yang harus dilindungi. Dengan lain kata bahwa warisan budaya juga harus berfungsi untuk masa kini maupun masa akan datang.

Jika diperhatikan para arkeologi di Indonesia memberi penerangan mengenai betapa pentingnya tinggalan budaya kepada masyarakat tetapi penerangan dan kesadaran masyarakat Indonesia pada umumnya belum merata. Meskipun kepariwisataan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang cukup pesat dimana obyek-obyek pariwisata dimanfaatkan situs-situs arkeologi seperti Borobudur, Prambanan, Trowulan, situs-situs prasejarah dan masa Islam. Mereka telah bekerja keras untuk memberi penerangan kepada masyarakat betapa pentingnya warisan budaya tersebut tetapi masih terjadi kerusakan dan lainnya.

Dalam tulisan Timbul Haryono (1995) dan Daud Aris Tanudirjo (1993/1994: 15) menjelaskan bagaimana ketiga kelompok pengelola warisan budaya tersebut satu sama lain seharusnya saling berkait seperti berikut:



Jika diperhatikan sejarah arkeologi di Indonesia sejak masa Belanda hingga masa kini telah dilakukan banyak usaha-usaha para arkeolog menerangkan masyarakat. Meskipun demikian belum mendapat hasil yang

semaksimal mungkin karena masih ada pengerusakan dan belum ada perhatian besar oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia. Banyak masyarakat belum mengenal apa itu arkeologi dan tujuannya. Hal ini menjadi suatu persoalan dan perlu mendapat perhatian para arkeolog. Dalam tulisan ini kami akan menyumbang sebuah pemikiran untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut.

Kami tertarik akan tulisan Mike Corbishley (1993: 405) ia menegaskan *"Various archaeologist, and media presenters, have tried to recreate that excitement-and some have succeeded. But I think that archaeologists and museum people still fail to translate what they do and what they have discovered so that non-specialists can learn and enjoy. Part of the problem is the language used"*.

Kalau diperhatikan usaha-usaha para arkeolog dan instansi yang bersangkutan yang telah dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai jalan masih dianggap kurang akan menimbulkan pertanyaan apakah semua lapisan masyarakat diperhatikan olhe para arkeolog. Sebab sebenarnya permasalahan yang dihadapinya adalah kesadaran masyarakat akan warisan budaya Indonesia.

Kami tertarik akan pandangan Corbishley dalam memberi penyuluhan kepada masyarakat. Pandangan Corbishley (1993: 405) dalam masalah ini adalah pendidikan arkeologi. Berbicara tentang pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pendidikan dan kurikulumnya. Tujuan pendidikan amat dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di masyarakat sekelilingnya, yang merupakan bagian dari cita-cita yang dituju oleh suatu lembaga pendidikan. Tujuan itu digunakan sebagai titik tolak untuk merancang dan merencanakan kegiatan belajar mengajar yang lazim dikenal sebagai kurikulum (Sumiati Atmosudiro 1995: 4). Tujuan pendidikan oleh Corbishley mengenai arkeologi bukan diarahkan pertama kalinya pada para mahasiswa tetapi sejak masa anak-anak. Kurikulum arkeologi di sekolah terutama dimulai dari masa kanak-kanak di Inggris. Pengertian arkeologi terbatas saja pada studi manusia masa lampau melalui artefak yang didapatkan di dalam penggalian, tetapi menyangkut semua data baik yang didapatkan di atas permukaan tanah, dalam tanah maupun di dalam air (Council for British Archaeology 1989). Dasar ini yang menjadi pola berpikir guru-guru di Inggris dan arkeologi merupakan kurikulum nasional yang harus dipelajari di sekolah-sekolah dimulai dari umur 5 tahun. Sebab seperti dijelaskan oleh Sumijati A.S. (1995: 4-5) tujuan pendidikan adalah merumuskan pola perilaku dan pola kemampuan

yang harus dimiliki oleh lulusannya, pendidikan yang mengarah ke kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu pendidikan arkeologi mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan arkeologi.

Para arkeolog hingga saat ini telah banyak memberi penyuluhan kepada masyarakat tetapi hasilnya masih sangat minim. Kesadaran suatu masyarakat sebaiknya diberikan penyuluhan sejak masa kanak-kanak sehingga dapat mendarah daging jika mereka bermasyarakat. Oleh sebab itu dalam kertas kerja ini saya akan memberi bagaimana pendidikan arkeologi sejak masa kanak-kanak dilakukan di Inggris.

Di Inggris arkeologi merupakan bagian dari kurikulum sejarah tetapi juga menjadi aspek disiplin lain seperti Geographi, Ilmu Alam, Matematik dan Seni (Corbishley 1991).

Pemerintah Inggris membentuk sebuah badan yaitu English Heritage dibawah The National Heritage Act. Peranan dari English Heritage merupakan jangka panjang yaitu konservasi kesadaran dan kesukaan akan lingkungan sejarah untuk kepentingan generasi masa kini dan masa akan datang. Tanggung jawab badan tersebut yaitu memberi beasiswa atau dana untuk pemeliharaan dan terutama sekolah-sekolah lebih kurang 350 situs, monument dan bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi unsur kepentingan nasional. Badan tersebut juga memberi bantuan kepada guru-guru dalam pendidikan untuk semua tingkatan dengan memberi informasi penerbitan, booklet dan buku pegangan dan lain informasi untuk membantu para guru dalam menyusun program pendidikan mereka mengenai arkeologi.

Satu hal yang menarik dari Croishley (1993: 407) yaitu bagaimana memberi penjelasan mengenai data arkeologi yang ditemukan dalam penggalian kepada anak-anak sampai dewasa. Ia memberi penyuluhan bagaimana seorang anak dapat melihat artefak seperti mata seorang arkeolog.

Adapun metodenya meliputi antara lain:

- a. pengenalan data;
- b. observasi dengan teliti;
- c. membuat reording jika perlu;
- d. membuat pertanyaan mengenai data-data tersebut;
- e. interpretasi.

Untuk anak-anak pertama-tama diperlukan pengenalan sebuah bangunan yang moderen yang baru dibangun dengan mengunjungi bangunan tersebut.

- a. berjalan mengelilingi bangunan tersebut dan diperhatikan dengan teliti;
- b. buatlah sebuah denah yang sederhana;
- c. perhatian pintu masuk;
- d. masuklah ke dalam ruang-ruangan dan perhatian penggunaannya;

Dengan cara demikian anak-anak dapat bersikap sebagai seorang arkeolog. Jika mereka mengunjungi sebuah bangunan kuno atau runtuhan maka dibuatnya pertanyaan-pertanyaan secara mendetail tentang runtuhan atau bangunan tersebut baik batu, warna dan ciri-ciri pintu, atap, penggunaan ruangan untuk apa. Selain itu Corbishley menerbitkan beberapa artikel dan laporan dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para guru bagaimana mengembangkan idea murid dari 5-18 tahun. Diantaranya permainan dengan bantuan alat video. Misalnya dua detektif muda mengajukan pertanyaan mengenai lonceng dari tiga jenis bangunan yaitu pertama sebuah rumah lengkap dengan perabot rumah tangga; kedua sebuah rumah kosong dan ketiga adalah rumah yang hanya terdapat denahnya saja (Corbishley 1990).

Dengan adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Corbishley kepada masyarakat Inggris yang ditujukan pertama-tama kepada anak-anak hingga dewasa dari hasil pengamatan kami belum pernah dilaksanakan. Meskipun sekarang ada anjuran dari sekolah-sekolah untuk mengunjungi museum-museum tetapi dari hasil pengamatan kami ternyata guru-guru belum dibekali arti arkeologi. Jika sejak anak-anak hingga akhir sekolah menengah diberi pengertian mengenai warisan budaya Indonesia maka dalam beberapa tahun kemungkinan tidak akan mendapat banyak masalah mengenai arkeologi dari masyarakat.

Tulisan ini bukan berarti bahwa kita harus meniru seperti di Inggris, tetapi metode pendidikan yang dilakukan dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian arkeologi bukan saja sebagai ilmu untuk kesenangan atau hoby cukup saya hanya mengenal teori dan metode dan tulisan dikenal tetapi juga adanya upaya yang dilakukan oleh para arkeolog bagaimana mendidik masyarakat. Dengan jalan tersebut masyarakat dapat menikmati dan merasa mempunyai kebanggaan akan warisan budaya Indonesia. Masyarakat dalam arti ini bukan golongan orang dewasa saja, tetapi sejak anak-anak rasa kesadaran akan arti penting warisan budaya Indonesia telah dipupuk dari dini hari. Untuk mencapai sasaran tersebut bukan saja dibantu dengan adanya Undang-Undang RI pasal 15 no. 4 tahun 1992 dan penyuluhan-penyuluhan saja, tetapi arkeologi dimasukkan sebagai kurikulum dalam pendidikan sejak mereka masuk sekolah.

Kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia dari masyarakat dapat membantu pemerintah dengan turut serta dalam usaha peningkatan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya di Indonesia. Sebab penelitian dan pelestarian pada hakekatnya adalah dua hal yang sama penting dan sukar dipisahkan (Mundardjito 1993).

Para arkeolog bukan saja melakukan penelitian dan menerbitkan laporan dan tulisan-tulisan khusus mengenai hasil penelitian, tetapi juga membuat buku pegangan mengenai arkeologi untuk para guru-guru sebagai buku pegangan mendidik murid-muridnya. Seperti halnya Corbishley seorang arkeolog juga memperhatikan bagaimana mendidik anak sampai dewasa mengenai arkeolog.

Daftar Pustaka

Atmosudiro, Sumijati

- 1995 "Pendidikan Dasar Arkeologi di Indonesia" dalam *Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi*. Depok, 23-24 Januari 1995.

Copeland, T

- 1990 *Rochester Castle: A Handbook for Teacher. English Heritage*. London.

Corbishley, M.

- 1986 *Archaeology, Monuments and Education*. "In: Presenting Archaeology to Young People eds Stephen Cracknell-Mike Corbishley; 2-8. Council for British Archaeology Tesearch Report No. 64". London.
- 1993 *Presenting the Past: Education or Enjoyment. Actes du XIIe Congres International Des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques Bratislava*, 1-7 September 1991.

English Heritage/MAFF

- 1991 *Farming Historic Landscapes and People*. English Heritage/Minity of Agriculture, Fisheries and Foo. London.

Haryono, Timbul

- 1995 "Arkeologi Kawasan dan Kawasan Arkeologis: Atas Keseimbangan Dalam Pemanfaatan". *Seminar Manusia dalam Ruang Studi Kawasan dalam Arkeologi*, Yogyakarta, 15-16 Maret 1995.

McGimsey, Charles R.

- 1978 "Cultural resources Management Archaeology Plus", Dalam Charles. L. Redmaan et al (eds), *Social Archaeology Beyond Subsistence and Dating*. New York; Academic Press. Hlm. 63-72.

Mundardjito

- 1993 "Tantangan Arkeologi Indonesia dalam Pembangunan Nasional". *Pidato pada Peringatan Ulang Tahun ke-53*

Fakultas Sastra UI. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Sedyawati, Edi

1985

Pengarcaan Ganesa Masa Kadiri dan Singhasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian. Universitas Indonesia.

Soekmono

1977

"Sedikit Riwayat", dalam 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963. Jakarta: Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tanudirjo, Daud Aris dkk.

1993/1994

"Kualitas Panyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat Studi Kasus Manajemen Sumberdaya Budaya Candi Borobudur". Laporan Penelitian. Yogyakarta: Pau Studi Social UGM.

MANFAAT STUDI HASIL BUDAYA MATERI MASA KINI BAGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Tular Sudarmadi

1. Pendahuluan

Bagi orang awam pengertian arkeologi sering diasosiasikan sebagai sesuatu yang bersifat kuno, dan berdebu. Kehidupan yang penuh petualangan dan berkemah baik di hutan-hutan lebat, maupun bentang alam terbuka yang bersuasana romantis untuk berburu harta karun dan benda-benda antik, sebagaimana sering ditampilkan dalam sinematik Hollywood (trilogi Indiana Jones). Akibat adanya gambaran tersebut terbentuk *stereotype* publik bahwa arkeologi hanya diketahui dan difahami oleh beberapa orang tertentu saja, yaitu para pecinta benda kuno dan orang-orang eksentrik. Anggapan semacam ini menimbulkan kesan bahwa studi arkeologi seolah-olah tidak berperan dalam menunjang program pembangunan negara Indonesia.

Pada dasarnya arkeologi adalah ilmu yang mempelajari artefak (peninggalan hasil budaya materi) manusia di masa lampau untuk menggambarkan kebudayaan masyarakat di masa lampau, merekonstruksi kehidupan manusia di masa lampau, dan juga untuk mengetahui sebab akibat terjadinya proses budaya (Fagan 1975: 8; Martin 1975: 8).

Secara langsung kaitan antara memahami kebudayaan masa lampau dan sumbangannya terhadap pembangunan memang tidak tampak nyata dan jelas. Hal ini disebabkan pemahaman terhadap kebudayaan masa lampau akan memberikan pengayaan terhadap kehidupan yang bersifat spiritual, rohani, atau dengan kata lain akan menyumbang pembentukan jati diri suatu bangsa.

Proses pencapaian jati diri tersebut melalui waktu yang panjang dan bersifat unik bagi masing-masing bangsa. Keseluruhan proses pencapaian tersebut terwujud dalam warisan budaya, yang diciptakan dari generasi ke generasi dan merupakan peninggalan budaya atau artefak dari nenek moyang (Poespowardoyo 1992: 4). Tugas arkeolog adalah merepresentasikan warisan budaya tersebut agar dapat memberikan gambaran gaya hidup, adat-istiadat, kepercayaan dan gagasan nenek moyang bangsa Indonesia. Pengetahuan yang lengkap dan mendalam tentang pembuat warisan budaya akan menumbuhkan rasa bangga generasi muda pada

leluhurnya. Kebanggaan akan kebesaran dan keagungan nilai budaya leluhurnya diharapkan akan menimbulkan jati diri bangsa yang tangguh.

Ilustrasi yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa studi arkeologi berperan dalam pembangunan rohani, khususnya untuk menyatukan ideologi berbagai suku bangsa Indonesia menjadi suatu kesatuan bangsa Indonesia. Suatu hal yang kurang mendapat perhatian dalam studi arkeologi adalah sumbangannya terhadap pembangunan fisik atau jasmani di Indonesia.

Makalah ini berusaha mengemukakan sumbangan penggunaan studi hasil budaya materi masa kini bagi pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan artefak masa kini.

2. Arkeologi dan Studi Hasil Budaya Materi Masa Kini

Khususnya dalam upaya merekonstruksi aspek-aspek kehidupan manusia di masa lampau, yang berhubungan dengan pola tingkah laku manusia pendukung kebudayaan tertentu (atas dasar data artefak), para arkeolog sering mengalami hambatan. Keadaan semacam ini dapat dimengerti mengingat data artefak merupakan hasil aktivitas serta pola tingkah laku manusia pendukung kebudayaan yang telah lama punah. Hal ini berarti aktivitas serta pola tingkah laku tersebut sudah tidak mungkin diamati lagi, dan hanya dapat ditafsirkan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut Kramer mengembangkan studi etnoarkeologi. Tujuan utama studi ini adalah untuk merekonstruksi teknologi tradisional, pola tingkah laku manusia dan proses kebudayaan berdasarkan adanya kesamaan yang dijumpai pada kelompok-kelompok masyarakat tradisional, yang dapat digunakan sebagai analogi atau interpretasi sistem kebudayaan masyarakat masa lampau (Kramer 1979: 1-2; Fagan 1975: 327-334). Menurut Hodder studi ini harus lebih ditekankan pada pengamatan proses tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pola pembuatan, penggunaan, dan pembuangan hasil budaya materi. Berdasarkan analisis mengenai proses tingkah laku manusia yang tercermin dalam pola pembuatan, penggunaan, dan pembuangan artefak masa lampau, maka seorang arkeolog akan dapat menginterpretasikan antara lain, struktur sosial, sistem ekonomi, sistem religi, dan proses perubahan kebudayaan (Clark 1975: 62-77; Binford 1975: 125-132; Orme 1981: 237-253; Hodder 1984: 51-66).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian etnoarkeologi akhirnya muncul gagasan Rathje (1978) untuk meneliti hasil budaya materi (artefak) masa kini guna mengetahui pola tingkah laku manusia masa kini. Gagasan tersebut dilandasi pemahaman bahwa artefak dan tingkah laku manusia di masa lampau. Analog dengan hal tersebut artefak dari masa kini seharusnya dapat digunakan untuk mengungkapkan aspek yang sama pula (Schiffer 1981: 52-55).

Kebenaran gagasan itu dibuktikan oleh Rathje (1981) yang berhasil menggunakan artefak masa kini, yang diperoleh dari proses pembuangan benda (tempat sampah) untuk mengungkap pola tingkah laku manusia yang berkaitan dengan struktur sosial dan sistem ekonomi. Di Indonesia penelitian yang menggunakan artefak masa kini baru dilakukan pada tahun 1990-an. Pada umumnya penelitian yang dilakukan berusaha merekonstruksikan pola tingkah laku manusia masa kini yang berkaitan dengan aspek penggunaan, pembuangan artefak masa kini dan proses perubahan kebudayaan (Atmosudiro dan Sudarmadi 1990; Tanudirjo 1992; Anggraini 1995).

3. Studi Hasil Budaya Materi Masa Kini dan Masalah Lingkungan Hidup

Salah satu topik menarik yang dapat digunakan untuk penerapan studi artefak masa kini guna mengungkap pola tingkah laku manusia masa kini adalah masalah lingkungan hidup. Para pakar ekologi sudah lama menyadari bahwa sumber daya alam yang dipakai untuk pembuatan artefak mengalami keterbatasan. Pemakaian sumber tersebut secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya penyusutan yang tidak mungkin untuk ditambah dan diciptakan lagi (Soemarwoto 1987: 51-52). Kesadaran tersebut memunculkan gagasan perlunya dilakukan guna ulang (*reuse*) terhadap benda-benda (artefak) yang digunakan oleh manusia. Berbagai teknologi telah diciptakan dan dikembangkan untuk mendukung gagasan tersebut (*Ibid* 1987: 244-249). Suatu hal yang tidak diperhatikan oleh kelompok penggagas tersebut adalah pemahaman dan sikap masyarakat luas terhadap proses guna ulang itu sendiri.

Seminar-seminar, pendapat perlunya proses guna ulang di berbagai mass media sudah banyak dilakukan dan dipublikasikan, meskipun demikian hingga kini tampaknya belum pernah diketahui partisipasi masyarakat dalam melakukan program guna ulang artefak. Berdasarkan

hal tersebut studi hasil budaya materi masa kini mencoba untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Selain itu juga akan diteliti aspek-aspek yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan program tersebut.

3.1 Landasan Teori

Artefak masa lampau merupakan hasil proses tingkah laku manusia yang dimulai dari pembuatan, penggunaan, dan akhirnya pembuangan. Berdasarkan analisis mengenai proses tingkah laku manusia yang tercermin dalam pola pembuatan, penggunaan, dan pembuangan artefak, seorang arkeolog mampu menginterpretasikan gejala-gejala sosial dan proses budaya. Analog dengan pengertian tersebut, maka seorang arkeolog seharusnya mampu pula menginterpretasikan gejala-gejala sosial dan proses budaya masa kini melalui analisis terhadap pembuatan, penggunaan, dan pembuangan artefak masa kini.

Pembuatan artefak tentunya memerlukan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus akan mengakibatkan penyusutan yang tidak dapat ditambah lagi atau diciptakan. Salah satu cara penghematan sumber daya alam adalah memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan artefak tersebut. Istilah yang lebih populer pada saat ini adalah guna ulang benda. Kebersihan program guna ulang benda ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya. Pada dasarnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor status sosial, mobilitas, dan ukuran luas tempat tinggal.

3.2 Hipotesis

Semakin tinggi status sosial, semakin luas tempat tinggal, dan semakin tinggi mobilitas akan semakin rendah pula partisipasinya dalam program guna ulang benda.

3.3 Metode

Pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, akan memakai pola penalaran deduktif. Atas dasar hal tersebut data empiris dikumpulkan untuk menguji kebenaran hipotesis. Adapun data empiris yang digunakan berupa artefak peralatan rumah tangga (misalnya, panci, kompor, piring, gelas), artefak kendaraan serta artefak alat-alat elektronik

(misalnya, sepeda, sepeda motor, mobil, TV, radio, komputer) dan masyarakat Kotamadya Yogyakarta sebagai pengguna artefak tersebut.

Pengumpulan data tersebut akan dilakukan di Kotamadya Yogyakarta, hal ini disebabkan kota tersebut merupakan salah satu pusat budaya masyarakat Jawa. Posisi tersebut mengakibatkan proses dinamika budaya di kota tersebut berjalan relatif lambat. Di lain pihak kelambatan tersebut akan mengurangi terjadinya bias terhadap pola tingkah laku masyarakatnya.

Perolehan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara berencana, yang tidak dilakukan sampling. Analisis hasil terhadap data dilakukan secara kuantitatif. Dalam hal ini terlebih dahulu harus ditetapkan definisi operasional yang akan digunakan untuk mengetahui cara mengukur aspek guna ulang benda, status sosial, mobilitas, dan luas tempat tinggal.

Responden dapat dimasukkan dalam kategori memiliki kesadaran guna ulang benda rendah apabila membeli artefak, baik peralatan rumah tangga, kendaraan maupun alat elektronik sesuai dengan mode yang terbaru, sedangkan artefak yang lama masih berfungsi baik. Responden juga tidak pernah meloakan dan tidak pernah membeli artefak loakan, baik yang berupa peralatan rumah tangga, kendaraan maupun alat elektronik. Selain itu juga tidak pernah memfungsikan baik artefak yang rusak untuk keperluan lainnya.

Responden dapat dimasukkan dalam kategori memiliki kesadaran guna ulang benda tinggi, apabila membeli artefak, baik peralatan rumah tangga, kendaraan maupun alat elektronik, karena benar-benar membutuhkannya. Selain itu responden sering meloakan dan membeli artefak loakan, baik yang berupa peralatan rumah tangga, kendaraan maupun alat elektronik. Responden juga memfungsikan artefak, baik peralatan rumah tangga, kendaraan maupun alat elektronik yang rusak untuk keperluan lain.

Responden dapat dimasukkan dalam kategori status sosial tinggi apabila memiliki pendapatan lebih dari Rp. 500.000,00 per bulan, memiliki artefak peralatan rumah tangga yang dibuat oleh industri terkenal (misal piring keramik Delf), memiliki artefak kendaraan dan alat elektronik yang dibuat oleh industri terkenal (misal Mercedes, Volvo, BMW, Sony, JVC, IBM). Selain itu responden memiliki berbagai jenis artefak peralatan rumah tangga, kendaraan, dan alat elektronik.

Responden dapat dimasukkan dalam kategori mobilitas tinggi apabila dalam jangka waktu lima tahun pernah pindah tempat lebih dari satu kali. Sebaliknya responden dapat dimasukkan dalam kategori mobilitas rendah apabila dalam jangka waktu lima tahun lebih tidak pernah berpindah tempat tinggal.

Responden dapat dimasukkan dalam kategori memiliki tempat tinggal yang luas, apabila luas tempat tinggalnya lebih dari 500 m², memiliki tipe rumah yang lebih besar dari T-54, dan memiliki halaman yang luasnya lebih dari 400 m². Responden dapat dimasukkan kategori memiliki tempat tinggal yang sempit, apabila luas tempat tinggalnya kurang dari 500 m², memiliki tipe rumah lebih kecil dari T-54, dan memiliki halaman yang luasnya kurang dari 400 m².

Tahap berikutnya adalah memasukkan data, yang diperoleh dari hasil kategorisasi dalam program komputer SPSS, khususnya program koefisien korelasi. Program ini dimaksudkan untuk mengetahui kedekatan hubungan antara aspek yang satu dengan aspek lainnya. Semakin tinggi nilai yang diperoleh semakin dekat hubungan antara aspek-aspek tersebut, sebaliknya semakin rendah nilai yang diperoleh semakin jauh pula hubungannya (Shennan 1990: 126-131; Walpole 1990). Penolakan (falsifikasi) hipotesis terjadi jika nilai koefisien korelasi antara status sosial tinggi, tempat tinggal luas, mobilitas tinggi, dan kesadaran rendah dalam program guna ulang artefak sama dengan nol. Penerimaan (verifikasi) hipotesis terjadi jika nilai koefisien korelasi antara keempat aspek tersebut mendekati satu atau sama dengan satu.

3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian koefisien korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara guna ulan artefak dengan status sosial adalah -0,460. Nilai koefisien korelasi antara guna ulang artefak dengan mobilitas -0,0614. Nilai koefisien korelasi antara guna ulang artefak dengan luas tempat tinggal -0,0349 (periksa lampiran uji koefisien korelasi).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa hubungan yang paling dekat terdapat pada aspek guna ulang benda dengan aspek status sosial. Nilai koefisien korelasi yang negatif menunjukkan bahwa jika status sosial tinggi, maka guna ulang artefak rendah. Sebaliknya jika status sosial rendah, maka guna ulang artefak tinggi. Hal semacam tersebut juga berlaku untuk aspek guna ulang artefak dengan luas tempat tinggal dan mobilitas. Adapun nilai koefisien korelasi yang

mendekati nol antara guna ulang artefak dengan aspek mobilitas dan tempat tinggal luas menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi hampir tidak ada.

Penelitian dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa responden yang berstatus sosial tinggi (54%) memiliki keanekaragaman artefak peralatan rumah tangga, kendaraan, dan alat elektronik (periksa tabel 1). Pada umumnya artefak-artefak tersebut dibuat oleh industri yang terkenal (periksa tabel 2). Mereka biasanya membeli produk baru yang ditawarkan oleh industri pembuat, meskipun benda tersebut memiliki fungsi yang sama dengan benda yang sudah dibeli lama sebelumnya. Keinginan untuk menyesuaikan artefak mereka dengan mode yang sedang "trend" tampaknya merupakan penyebab terjadinya hal tersebut. Adapun artefak-artefak yang sudah tidak dibutuhkan lagi biasanya disimpan di dalam gudang. Mereka juga jarang menjual artefak-artefak yang dimiliki dan sudah tidak terpakai di tempat loak. Menurut anggapan mereka menjual artefak di tempat loak akan menurunkan gengsi dan kedudukan status sosial. Selain itu menurut mereka artefak-artefak yang dijual di tempat loak, kadang-kadang diperoleh secara tidak sah (hasil pencurian dan perampokan). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang berstatus sosial tinggi memiliki kesadaran yang rendah terhadap program guna ulang artefak.

Sebaliknya responden yang berstatus sosial rendah (46%) memiliki kesadaran yang tinggi terhadap program guna ulang artefak. Bukti tentang hal itu tampak dari kebiasaan mereka yang sering menjual dan membeli artefak-artefak di tempat loak (periksa tabel 3). Mereka biasanya juga memfungsikan artefak yang dimilikinya semaksimal mungkin, atau dengan kata lain mereka tidak akan membeli artefak baru, jika artefak yang lama masih dapat dipergunakan. Selain itu mereka memfungsikan artefak yang sudah tidak berguna untuk keperluan lain. Sebagai salah satu contoh, yaitu pemanfaatan kaleng roti dan ember plastik rusak untuk pot tanaman.

Siklus penggunaan ulang artefak pada responden yang berstatus sosial rendah tampak berfrekuensi tinggi. Pada umumnya mereka membeli benda yang dihasilkan oleh industri rumah tangga (*home industry*) atau oleh pabrik yang tidak terkenal (periksa tabel 2). Sebagai akibatnya kualitas dan mutu artefak yang mereka miliki rendah. Keadaan semacam ini mengakibatkan cepat rusaknya artefak-artefak yang dimiliki. Di lain pihak tidak setiap saat mereka memiliki uang yang berlebih untuk membeli artefak-artefak baru. Satu-satunya alternatif yang dilakukan adalah

menjual dan membeli di tempat loak serta memfungsikan benda yang sudah rusak untuk keperluan lain.

Di lain pihak responden yang berstatus sosial tinggi di daerah Kotamadya Yogyakarta (76%) tidak seluruhnya memiliki tempat tinggal dan halaman yang luas. Di daerah Kotamadya Yogyakarta rata-rata luas tempat tinggal responden yagn berstatus sosial tinggi adalah 250 m² hingga 400 m². Sedangkan ukuran luas tempat tinggal yang lebih dari 400 m² hanya dimiliki oleh 24% responden yang berstatus sosial tinggi. Ukuran luas tempat tinggal berkisar antara 250 m² hingga 400 m² juga dimiliki oleh 68% responden yang berstatus sosial rendah. Adapun luas tempat yang berukuran lebih dari 400 m² dimiliki oleh 14% responden yang berstatus sosial rendah. Pada umumnya pemilihan mereka atas tempat tinggal yang luas berkaitan sosial rendah memiliki luas tempat tinggal yang kurang dari 150 m² (periksa tabel 4).

Berdasarkan tempat tersebut tampak bahwa sebagian besar responden, baik yang berstatus sosial tinggi maupun yang berstatus sosial rendah memiliki luas tempat tinggal yang berukuran antara 250 m² hingga 400 m². Satu-satunya perbedaan yang dapat dipergunakan untuk membedakan antara responden yang berstatus sosial rendah dengan yang berstatus sosial tinggi adalah keindahan bentuk dan kemegahan rumah mereka. Rumah responden yang berstatus sosial rendah memiliki bentuk sederhana, sedang rumah responden yang berstatus sosial tinggi dibangun sangat megah dan indah bentuk arsitekturnya.

Adanya kesamaan ukuran luas tempat tinggal antara responden yang berstatus sosial tinggi dengan responden yang berstatus sosial rendah mengakibatkan koefisien korelasi antara guna ulang artefak dengan luas tempat tinggal mendekati angka nol. Keadaan semacam ini dapat terjadi karena responden yang berstatus sosial rendah memiliki kesadaran guna ulang artefak yang tinggi, sedang responden yang berstatus sosial tinggi memiliki kesadaran guna ulang artefak dengan luas tempat tinggal bernilai negatif. Hal ini disebabkan 18% responden yang berstatus sosial rendah memiliki luas tempat tinggal kurang dari 400 m². Mereka sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya memiliki kesadaran guna ulang artefak yang tinggi. Atas dasar tersebut koefisien korelasi yang bernilai negatif memiliki arti semakin luas tempat tinggal semakin tinggi kesadaran guna ulang artefak.

Koefisien korelasi antara guna ulang artefak dengan mobilitas bernilai negatif dan mendekati nol. Hal ini disebabkan 80% responden

selama lima tahun tidak pernah berpindah tempat tinggal, dan hanya 20% responden selama lima tahun pernah berpindah tempat lebih dari sekali. Ketidakeimbangan data mungkin dapat mengakibatkan terjadinya nilai koefisien korelasi yang mendekati nol. Selain itu data monografi daerah Kotamadya Yogyakarta sangat kecil (periksa tabel 5). Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa 20% responden yang memiliki mobilitas tinggi berkesadaran guna ulang artefak yang rendah. Pada umumnya mereka selalu membeli artefak baru di tempat tinggal mereka yang baru. Adapun artefak yang dimiliki sebelumnya sebagian besar ditinggal atau diberikan kepada tetangga di tempat lama mereka. Satu-satunya artefak yang mereka pertahankan keberadaannya adalah kendaraan. Mereka tidak menjual atau memberikannya kepada seseorang, melainkan memakainya terus di tempat tinggal mereka yang baru.

4 Penutup

Keberhasilan studi hasil budaya materi masa kini untuk menuntaskan masalah lingkungan hidup, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan penghematan sumber daya alam, membuktikan bahwa gagasan studi hasil budaya materi masa kini untuk mengungkapkan pola tingkah laku manusia masa kini, yang sudah dikembangkan di negara barat, dapat pula diterapkan di Indonesia.

Studi hasil budaya materi masa kini tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh para produsen dan industri-industri barang (artefak) untuk menentukan strategi penjualan dan pemasaran produk-produknya, terutama yang berupa peralatan rumah tangga, kendaraan, dan alat elektronik. Pemanfaatan hasil studi ini bagi kalangan produsen dan industri akan membuktikan bahwa studi arkeologi juga memberikan sumbangan bagi pembangunan yang bersifat fisik. Selain itu hasil studi ini dapat digunakan untuk mengharuskan kesan bahwa arkeologi harus digali serta berasal dari masa lampau. Akhirnya studi ini juga membuktikan bahwa studi arkeologi dapat juga digunakan untuk mengetahui aspek-aspek kehidupan di masa kini.

Daftar Pustaka

Anggraeni

1994

"Distribusi Peralatan Tembaga dari Kotagede", *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Atmosudiro dan Tular S.

1990

"Latar Belakang 'Lama' Pemilikan Alat-alat pada Masyarakat Kota dan Desa (Studi Kasus di Yogyakarta dan Benowo)", *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Binford, Lewis R.

1975

"Archaeological Systematics and the Study of Culture Process", dalam Mark P. Leone, ed., *Contemporary Archaeology: A Guide to Theory and Contribution*. Illionis: Southern Illionis University Press. p. 125--132.

Clark, Grahame

1975

"Economic Approach to Archaeology", dalam Mark P. Leone, ed., *Contemporary Archaeology: A Guide to Theory and Contribution*. Illions: Southern Illionis University Press. p. 62--67.

Fagan, Brian M.

1975

In the Beginning an Introduction to Archaeology. Toronto: Little Brown and Company.

Hodder, Ian

1984

"Burials, Houses, Women and Men in the European Neolithic", dalam Danill Miller and Christoper Tilly, ed., *Ideology, Power and Prehistory*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 51--68.

Kramer, Carol

1979

Ethnoarchaeology. New York: Columbia University Press.

Martin, Paul

tt

"The Revolution in Archaeology", dalam Mark P. Leone, ed., *Contemporary Archeology: A Guide to Theory and*

Contribution. Illions: Southern Illionis University Press.
p. 5--13.

Orme, Bryony

1981 *Anthropology for Archaeologists: An Introduction.*
Ithaca, New York: Cornell University Press.

Poespowardoyo, Soejanto

1992 "Arkeologi dan Jatidiri Bangsa", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI*. Malang: Ikatan Ahli Arkeologi.

Rathje, William L.

1978 "Le Projec du Garbage 1975: Historic Trade-Offs",
dalam Charles L. Redman, ed., *Social Archaeology Beyond Subsistence and Dating*. New York: Academic Press. p. 373--379.

1981 "A Manifesto for Modern Material Culture Studies,
dalam Richard A. Gould and Michael B. Schiffer, ed.,
Modern Material Culture the Archaeology of Us. New York: Academic Press. p. 51--56.

Schiffer, Michael B.

1981 "Waste not, want not: An Ethno-archaeological Study of
Reuse in Tucson, Arizona", dalam Richard A. Gould and
M.B. Schiffer, ed., *Modern Material Culture the Archaeology of Us*. New York: Academic Press. p. 67--86.

Shennan, Dtephen

1990 *Quantifying Archaeology*. San Diego, California:
Academic Press. Inc.

Soemarwoto, Otto

1987 *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta:
Penerbit Djambatan.

Tanudirjo, Daud Aris

1993 "Perkembangan Teknologi Gerabah dan Perubahan Sosial
di kasongan Bantul". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta:
Lembaga Penelitian UGM.

Daftar Pustaka

Anggraeni

1994

"Distribusi Peralatan Tembaga dari Kotagede", *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Atmosudiro dan Tular S.

1990

"Latar Belakang Lama Pemilikan Alat-alat pada Masyarakat Kota dan Desa (Studi Kasus di Yogyakarta dan Benowo)", *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Binford, Lewis R.

1975

"Archaeological Systematics and the Study of Culture Process", dalam Mark P. Leone, ed., *Contemporary Archaeology: A Guide to Theory and Contribution*. Illionis: Southern Illionis University Press. p. 125--132.

Clark, Grahame

1975

"Economic Approach to Archaeology", dalam Mark P. Leone, ed., *Contemporary Archaeology: A Guide to Theory and Contribution*. Illions: Southern Illionis University Press. p. 62--67.

Fagan, Brian M.

1975

In the Beginning an Introduction to Archaeology. Toronto: Little Brown and Company.

Hodder, Ian

1984

"Burials, Houses, Women and Men in the European Neolithic", dalam Danill Miller and Christoper Tilly, ed., *Ideology, Power and Prehistory*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 51--68.

Kramer, Carol

1979

Ethnoarchaeology. New York: Columbia University Press.

Martin, Paul

tt

"The Revolution in Archaeology", dalam Mark P. Leone, ed., *Contemporary Archeology: A Guide to Theory and*

Contribution. Illions: Southern Illionis University Press.
p. 5--13.

Orme, Bryony

1981 *Anthropology for Archaeologists: An Introduction.*
Ithaca, New York: Cornell University Press.

Poespowardoyo, Soejanto

1992 "Arkeologi dan Jatidiri Bangsa", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI*. Malang: Ikatan Ahli Arkeologi.

Rathje, William L.

1978 "Le Projec du Garbage 1975: Historic Trade-Offs",
dalam Charles L. Redman, ed., *Social Archaeology Beyond Subsistence and Dating*. New York: Academic Press. p. 373--379.

1981 "A Manifesto for Modern Material Culture Studies,
dalam Richard A. Gould and Michael B. Schiffer, ed.,
Modern Material Culture the Archaeology of Us. New York: Academic Press. p. 51--56.

Schiffer, Michael B.

1981 "Waste not, want not: An Ethno-archaeological Study of Reuse in Tucson, Arizona", dalam Richard A. Gould and M.B. Schiffer, ed., *Modern Material Culture the Archaeology of Us*. New York: Academic Press. p. 67--86.

Shennan, Dtephen

1990 *Quantifying Archaeology*. San Diego, California: Academic Press. Inc.

Soemarwoto, Otto

1987 *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Tanudirjo, Daud Aris

1993 "Perkembangan Teknologi Gerabah dan Perubahan Sosial di kasongan Bantul". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM.

Walpole, Ronald E.

1990

Pengantar Statistika. Jakarta: P.T. Gramedia.

Tabel 1 Tingkat Status Sosial dan Jumlah Jenis Benda-benda yang Dimiliki oleh Masyarakat Kotamadya Yogyakarta

STATUS SOSIAL		
Jumlah Jenis Benda	Tinggi	Rendah
Lebih dari 20 jenis benda	54%	-
Kurang dari 20 jenis benda	-	46%

Tabel 2 Tingkat Status Sosial dan Pemilihan Kualitas Benda yang Dibeli pada Masyarakat Kotamadya Yogyakarta.

STATUS SOSIAL		
Kualitas Benda	Tinggi	Rendah
Benda buatan industri terkenal	51%	3%
Benda buatan industri tidak terkenal/industri rumah tangga	4%	56%

Tabel 3 Tingkat Status Sosial dan Cara Perolehan Benda pada Masyarakat Kotamadya Yogyakarta

STATUS SOSIAL		
Cara Perolehan Benda	Tinggi	Rendah
Beli di Toko	83%	15%
Jual dan beli di loakan	2%	77%
Beli di toko, memesan, jual dan beli di loakan	11%	8%
Beli di toko dan memesan	4%	-



Ibu Tjut Kusmiati memberikan tanggapan dalam salah satu persidangan.

Tabel 4 Tingkat Status Sosial dan Luas Tempat Tinggal pada Masyarakat Kotamadya Yogyakarta

STATUS SOSIAL		
Luas Tempat Tinggal	Tinggi	Rendah
Kurang dari 150 m ²	-	18%
250 m ² hingga 400 m ²	76%	68%
Lebih dari 400 m ²	24%	14%

Tabel 5 Mutasi Penduduk Kotamadya Yogyakarta

MUTASI PENDUDUK		
Nama Kecamatan	Pindah Antar Kecamatan	Datang
Kecamatan Tegalrejo	372	735
Kecamatan Jetis	478	671
Kecamatan Gedongtengen	361	268
Kecamatan Ngampilan	393	762
Kecamatan Pakualaman	173	246
Kecamatan Danurejan	418	465
Kecamatan Gondokusuman	824	1307
Kecamatan Wirobrajan	343	506
Kecamatan Mantriweron	506	640
Kecamatan Kraton	197	233
Kecamatan Gondomanan	117	30
Kecamatan Margangsari	511	940
Kecamatan Umbulharjo	144	1543
Kecamatan Kotagede	40	382

TINJAUAN SEPINTAS PENELITIAN ARKEOLOGI ISLAM DI INDONESIA SEJAK TAHUN 1960-AN SAMPAI 1995

Uka Tjandrasasmita

1. Pendahuluan

Pada PIA-VII yang mulia ini kami ingin menyampaikan sumbangan pemikiran atau mungkin lebih tepat disebut informasi tentang kegiatan-kegiatan penelitian dengan hasil-hasilnya yang dilakukan terhadapinggalan Arkeologi Islam di negeri kita melalui judul makalah "Tinjauan Sepintas Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia Sejak Tahun 1960-an Sampai 1995". Dari judul ini jelas bahwa yang akan ditinjau dan dibahas hanyalah sepintas atau secara garis besar apa yang telah dihasilkan dari kegiatan penelitian, survei Arkeologi Islam itu selama lebih kurang 35 tahun. Mengingat bentang waktu yang lama dan banyaknya sumber yang perlu ditinjau atau dibahas seperti laporan-laporan kegiatan penelitian dan survei, karangan-karangan, makalah-makalah, hasil-hasil diskusi, analisis-analisis hasil penelitian, hasil-hasil rapat evaluasi, laporan kegiatan penelitian arkeologi selama PELITA dan laian sebagainya. Lebih-lebih jika dihimpun dan dikaji hasil-hasil penelitian baik disertasi, tesis dan skripsi yang khusus mengenai kajian Arkeologi Islam yang dilakukan oleh peminat serta ahli-ahli dari lingkungan universitas terutama yang memiliki Fakultas Sastra dengan Jurusan Arkeologi, kesemuanya itu makin banyak sumber yang memerlukan waktu dan konsentrasi pemikiran yang tidak sedikit. Kecuali itu kita maklumi bahwa selama lebih kurang 35 tahun karangan-karangan yang berkaitan dengan Arkeologi Islam di Indonesia yang pernah diterbitkan baik berupa buku maupun dalam majalah-majalah dalam negeri dan luar negeri selama tahun-tahun tersebut di atas rupanya juga tidak sedikit.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka tinjauan atau pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian Arkeologi Islam di Indonesia baik jangkauan waktunya lama maupun banyaknya sumber, maka pada kesempatan ini kami tidak hanya memberikan gambaran sepintas tentang penelitian Arkeologi Islam, tetapi juga lebih dipusatkan kepada hasil-hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga yang ditugasi secara khusus dalam hal ini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil-hasil penelitian, survei, skripsi-skripsi serta tulisan

atau karangan-karangan yang berasal dari kegiatan-kegiatan di luar Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dalam jangkaan waktu sejak tahun 1960-an hanya akan disinggung sedikit.

Mudah-mudahan untuk mengadakan tinjauan atau pembahasan hasil-hasil Arkeologi Islam di Tanah Air kita selama 35 tahun dari tahun 1960-an sampai 1995, secara lebih banyak dan terperinci serta lebih sempurna dapat kami lakukan pada masa mendatang dengan waktu dan perhatian yang cukup. Upaya ini sebenarnya merupakan harapan dapat menyambung tulisan kami tentang "Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam di Indonesia" yang diterbitkan dalam *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913 - 1963* yang baru diterbitkan pada tahun 1977.

2. Pembahasan

Sejak tahun 1960-an sampai tahun 1969 kegiatan-kegiatan penelitian, survei, pencatatan terhadap tinggalan Arkeologi Islam dilaksanakan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), tetapi belum secara khusus oleh suatu bagian atau urusan terstruktur. Meskipun demikian, kebetulan kami sendiri sejak sebelum tahun 1960 sebagai pegawai lembaga tersebut sudah mulai mengadakan penelitian, survei, pencatatan terhadap tinggalan Arkeologi Islam sejalan dengan minat kami dan arahan dari pimpinan LPPN waktu itu Drs. Soekmono, untuk memilih spesialisasi bidang Arkeologi Islam. Hasil penelitian dan survei peninggalan Arkeologi Islam terutama di Pulau Jawa dan lebih khusus lagi di Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, kami jadikan bahan skripsi pada Jurusan Ilmu Purbakala dan Sejarah Kuno, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1960 dengan judul "Kekunoan Islam di Sendangduwur". Skripsi ini telah diterjemahkan oleh Ny. Dra. Satyawati Suleiman dalam bahasa Inggris "Islamic Antiquities of Sendangduwur", yang diterbitkan oleh Archaeological Foundation tahun 1975 dan tahun 1984. Mengingat kekunoan Islam di Sendang-duwur tersebut belum pernah didokumentasikan secara rinci, kecuali penggambaran, maka dalam tulisan itu dilakukan diskripsi yang selanjutnya dianalisis dari segi arsitektur dan seni-pahat atau ukir baik terhadap mesjid dan sisa-sisanya maupun bagian-bagian lain seperti Makam Sunan Sendang, pintu gerbang-pindu gerbang, tembok keliling dan lain sebagainya yang terdapat dalam kompleks itu.

Mesjid kuno serta Makam Sendangduwur dapat ditempatkan dalam rangka sejarahnya yaitu dibuat pada tahun 1561 M dan 1585 M. Dalam kesimpulan tentang arsitektur dan seni pahat atau ukir kekunoan Islam di Sendangduwur mengandung hasil proses akulturasi antara Kebudayaan Indonesia-Hindu dan Kebudayaan Islam, adanya kesinambungan unsur budaya dan dapat dikaitkan dengan pertanda proses Islamisasi yang dilaksanakan dengan damai. Yang menarik perhatian dari kekunoan Islam itu ialah dua buah gerbag bersayap, gapura B dan E, karena bentuk serta hiasannya bukan hanya menggambarkan garuda tetapi amat erat kaitannya dengan lambang pelepasan, lambang kepergian ke alam akhirat. Cerita Garudeya yang dikenal dalam sastra kuno rupanya berpengaruh kepada pembuatan gapura bersayap itu. Gapura bersayap seperti di Sendangduwur itu menurut pendapat kami merupakan bukti pertama dalam perkembangan gerbang-gerbang. Oleh karena itu, menarik perhatian kedua gapura bersayap itu dari segi corak dan arti yang terkandung maka pada tahun 1964 kami angkat menjadi karangan "Tinjauan Tentang Arti Seni Bangunan dan Seni Pahat Dua Buah Gapura Bersayap dari Kepurbakalaan Islam di Desa Sendangduwur", yang dimuat dalam *MISI*.

Sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1963 kami di LPPN mengadakan pencatatan, pengumpulan data-data, mengadakan survei dalam rangka mempersiapkan karangan untuk peringatan 50 tahun LPPN yang hasilnya merupakan tulisan yang berjudul "Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam di Indonesia". Melalui tulisan itulah kami telah mencatat dan meninjau secara garis besar dari hasil-hasil penelitian, pencatatan, pemugaran pemeliharaan peninggalan Arkeologi Islam di Indonesia dari mulai abad ke-19 sampai tahun 1963. Dengan harapan bahwa hasil-hasil dari masa-masa itu yang masih kurang dan terbatas, perlu ditingkatkan upaya penelitiannya baik mengenai obyeknya maupun mengenai cara pandang kajiannya.

Sementara itu, selaku pegawai LPPN dalam beberapa kesempatan kami menulis pula sejarah kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia dengan menggunakan data arkeologi Islam. Di samping itu sejak tahun 1960 kami mendapat kepercayaan dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dengan seijin pimpinan LPPN untuk memberikan kuliah mengenai mata pelajaran arkeologi Islam yang sebelumnya pada kedua jurusan arkeologi di fakultas-fakultas tersebut tidak pernah diberikan. Tujuannya tidak lain untuk kaderisasi pengembangan ilmu arkeologi Islam di Indonesia.

Sejak tahun 1969 dengan terbentuknya Bidang Arkeologi Islam di lingkungan LPPN maka kegiatan-kegiatan penelitian, survei dan lainnya ditangani secara khusus oleh bidang tersebut. dan sementara itu di bidang tersebut kami dibantu oleh Drs. Hasan Muarif Ambary sejak studinya selesai di Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1967. Sejak itu penelitian, survei di berbagai daerah di Jawa, Sumatera dan lainnya dilakukan bersama dengan Drs. Hasan dan hasilnya sebahagian dipergunakan untuk bahan disertasinya "L'Art Funeraire Musulman En Indonesia Des Origines Au XIX Siecle Etude Epigraphique Et Typologique" yang berhasil dipertahankan bulan Juni 1984 di Ecole Hautes Etudes En Sciences Sociales, Paris. Ketika ia melaksanakan studi sampai selesai di Perancis ia sudah menjadi Kepala Bidang Arkeologi Islam di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sejak terpisahnya dari LPPN tahun 1974. Tinjauan sepintas tentang disertasi Dr. Hasan Muarif Ambary akan kami kemukakan nanti.

Sejak dipecahnya LPPN menjadi dua instansi yaitu Direktorat Sejarah dan Purbakala (Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau Ditlinbinjarah dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) tahun 1974/1975 dan kebetulan sudah menginjak PELITA II perhatian akan kegiatan penelitian, pemugaran dan pemeliharaan serta perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala semakin meningkat. Meskipun Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas bukan penelitian murni di bidang arkeologi namun sejak tahun 1974 sampai tahun 1995 telah melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dokumentasi, pemugaran serta perlindungan terhadap tinggalan di tanah air, termasuk tinggalan arkeologi Islam. Bahkan untuk melaksanakan pemugaran biasanya dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan dan studi kelayakan dan studi teknis lebih menitik beratkan pada kerusakan-kerusakannya namun latar belakang sejarah obyek-obyek yang akan dipugar itu diteliti pula terutama adalah tinggalan tersebut mempunyai nilai penting atau tidak untuk dipugar.

Tinggalan sejarah atau arkeologi yang dijadikan sasaran pemugaran yang tergolong peninggalan Islam itu ada yang berupa mesjid-mesjid kuno, keraton-keraton, rumah adat, benteng dan makam-makam. Tinggalan arkeologi atau kepurbakalaan islam yang telah dipugar sejak tahun 1974/1975 sampai 1994/1995 di seluruh Indonesia dari PELITA II sampai PELITA V di 25 propinsi ada 140 obyek terdiri dari mesjid-mesjid kuno

keraton/istana, makam-makam, benteng, rumah adat. Dari sejumlah obyek yang dipugar itu ada beberapa yang hasil studi kelayakan dan studi teknisnya belum ditemukan.

Perlu kami terangkan bahwa meskipun kami sejak tahun 1974/75 sampai 1990 bertugas sebagai Direktur Ditlinbinjarah karena sesuai dengan ilmu yang kami tekuni, maka kami masih terus menulis baik tentang sejarah Islam maupun Internasional. Demikian pula kami masih menulis masalah-masalah sejarah dan Arkeologi Islam sejak kami menjadi pengajar tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Kegiatan penelitian, survei, ekskavasi yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melalui Bidang Arkeologi Islam sejak PELITA II sampai PELITA V makin berkembang dan makin mantap baik mengenai jumlah daerah dan sarasannya maupun mengenai hasil-hasilnya yang dimuat dalam Berita Penelitian Arkeologi, Analisis Hasil Penelitian Arkeologi, Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (REHPA) bahkan dalam diskusi dan beberapa kali Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) yang diselenggarakan oleh Puslit Arkenas melalui Proyek Penelitian Purbakala, meskipun makalah-makalahnya tentang arkeologi Islam tidak hanya dari ahli-ahli di Puslit Arkenas saja juga dari lingkungan Universitas-universitas yang mempunyai Fakultas Sastra dengan Jurusan Arkeologi atau dari anggota-anggota dan pengurus IAAI.

Kegiatan penelitian Arkeologi Islam yang dilakukan dalam PELITA II dalam rangka studi masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia mempunyai sasaran yan berhubungan dengan masalah:

- 1) perkotaan kuno di indonesia;
- 2) gerabah dan keramik (porselin);
- 3) prasasti dan naskah kuno;
- 4) arsitektur bangunan dari masa Islam.

Wilayah penelitian arkeologi yang telah dijangkau selama PELITA II meliputi: 1) Aceh dengan sasaran survei perkotaan kuno di Banda Aceh dan Pasai, dan studi makam-makam kuno di Banda Aceh dan Pasai; 2) Sumatera Utara dengan sasaran ekskavasi di situs pelabuhan kuno Kota Cina dan studi makam-makam kuno di Barus; 3) Sumatera Selatan dengan sasaran survei pola perkotaan Palembang masa silam; 4) Jawa Barat dengan sasaran ekskavasi Kota Lama Banten, dan studi naskah di Cirebon dan Priangan; 5) Jawa Tengah dengan sasaran studi bangunan dan arsitektur di Demak dan Kudus, ekskavasi pelabuhan kuno Demak dan ekskavasi bangunan Menara Kudus dan Langgar Bubar, dan survei

pemukiman kuno di Situs Bengawan; 6) Kalimantan Barat dengan sasaran survei bangunan dan arsitektur di Sambas, Mempawah, Sanggau, Ngabang dan Pontianak; 7) Kalimantan Selatan dengan sasaran survei bangunan dan arsitektur makam kuno di Banjar, Martapura; 8) Nusa Tenggara Barat dengan sasaran survei bangunan, arsitektur, naskah, dan epigrafi di Lombok, Sumbawa, Dompu dan Bima; 9) Sulawesi Selatan dengan sasaran survei tentang pelabuhan kuno dan bekas Pusat Kerajaan Gowa-Tallo. Hasil-hasil penelitian, survei ekskavasi terhadap tinggalan arkeologi Islam dan studi naskah kuno di 9 provinsi tersebut di atas dijelaskan dalam *Laporan Kegiatan Penelitian Arkeologi Selama PELITA II* dari tahun 1975 - 1979 dan lebih khusus lagi dan rinci dimuat dalam *Berita Penelitian Arkeologi*.

Kegiatan penelitian Arkeologi Islam yang telah dilakukan oleh Puslit Arkenas melalui proyeknya diteruskan pada PELITA-PELITA III, IV, V. Jika jangkauan penelitian Arkeologi Islam selama PELITA II dirasakan belum dapat memberikan bahan untuk studi perbandingan pada setiap aspeknya maka pada PELITA III penelitian arkeologi Islam melalui sasaran masalah perkotaan, keramik, naskah-naskah, epigrafi dan arsitektur akan lebih ditingkatkan dan jangkauan daerahnya akan diperluas.

Survei yang dilaksanakan di Provinsi Riau yaitu Bintan dan Penyengat bertujuan melakukan pendataan pemukiman dan perkotaan kuno dari bekas Kerajaan Melayu kuno di kota lama Penyengat. Hasil penelitian makam-makam kuno di daerah Bintan, Riau telah ditulis oleh Lukman Nurhakim dalam *Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi I*. Penelitian di Provinsi Jawa Barat terutama dilakukan di Pantai Utara Jawa Barat terutama dilakukan di Pantai Utara Jawa Barat yaitu meliputi Kabupaten Krawang, Indramayu, Cirebon dan Kuningan. Tujuan penelitian di daerah-daerah ini ialah mengumpulkan data berkenaan dengan sistem penguburan Islam antara lain hubungan tokoh dengan penempatan ruangnya, tipologi dari keanekaragaman baik bentuk maupun hiasan nisan dalam kaitan dengan persebarannya, dan terhadap isi tulisan yang terdapat pada nisannya. Survei yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah khususnya di daerah Demak, Kudus dan Jepara sekitar tahun 1982. Tujuan antara lain menginventarisasikan makam-makam kuno; untuk mengetahui tata ruang penempatan makam tokoh pada kompleks makam; melakukan indentifikasi makam nisan tokoh Wali Sanga di Jawa Tengah berdasarkan tipologi; untuk mengetahui tata letak makam dalam kaitannya dengan status sosial tokoh yang dimakamkan.

Survei di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1981 dan 1983 diarahkan di Dukuh Karang Kaitan, Karang Genting, Karang Beling dan Pelabuhan Tuban. Temuan-temuan keramik di Situs Karang Beling, sedang di Pelabuhan Tuban telah ditemukan 540 keramik asing dan gerabah lokal 90 keramik asing banyaknya berasal dari periode Sung-Yuan abad 13 M. Survei yang dilakukan di wilayah pantai utara Jawa Timur yaitu di Kabupaten Tuban, lamongan, Gresik, Mojokerto, Kodya Surabaya dan Madura tahun 1982 untuk menginventarisasikan makam-makam kuno agar dapat diketahui populasinya dalam kaitan dengan Islamisasi di daerah Jawa Timur. Tiga kompleks makam di Tuban yaitu Sunan Bonang, Rujak beling dan Embah Modot ternyata mempunyai tiga nisan kubur Aceh dan Demak. Sedang tipe nisan kubur di Sendangduwur, Sunan Derajat dan Ibrahim Asmara menunjukkan tipe nisan Demak. Penelitian di daerah Troloyo nisan kubur dengan gambaran matahari diperkirakan dari abad ke 13 M - 14 M. Nisan kubur di makam di Pamekaran, Asta Tinggi di Sumenep dan makam di Sukawati mempunyai tipe-tipe nisan tipe Demak dan bentuk Gada.

Penelitian atau survei di daerah Kalimantan Selatan tahun 1982 meliputi daerah kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Banjar, Barito dan Kabupaten Pulau Laut. Sasaran memberikan bukti adanya tipe-tipe nisan kubur Jawa (Demak). Demikian pula bentuk mesjid kuno di daerah itu menunjukkan adanya unsur arsitektur Jawa. Hasil survei di daerah Kalimantan Selatan itu telah dibicarakan dan dilaporkan secara khusus oleh Suwedi Montana dalam *Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi II* tahun 1984. Penelitian yang berupa survei peninggalan arkeologi Islam dilaksanakan pula di Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama di Kabupaten Lombok Barat dengan hasil antara lain dicatat adanya kompleks Makam Sriwa sebagai tempat pemakaman raja-raja dan pemuka agama. Dapat diidentifikasi tokoh yang dimakamkan dan keletakan sesuai kedudukannya yaitu bahwa makam tokoh utama yagn dimakamkan terletak paling utara. Mengenai naskah-naskah dan lempengan tembaga yang ditemukan di Kampung Benoa, isinya tentang silsilah raja-raja Sapar disertai mantra-mantra.

Di Pulau Sumbawa survei yang dilakukan tahun 1982 dan 1983 meliputi wilayah Kabupaten Bima, dan Dompu. Penelitian di Sumbawa Besar telah dikemukakan dalam REHPA II, 1984 oleh Lukman Nurhakim dengan judul "Penelitian Tentang Peninggalan Masa Islam di Bima Nusa Tenggara Barat. Survei terhadap peninggalan Islam juga dilakukan di

Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama di Desa Warloka dan Desa Binea, Kabupaten Manggarai. Penelitian di daerah ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kegiatan manusia masa lalu yang menghuni daerah ini. Situs-situs banyak menunjukkan tradisi megalitik. Dari situs-situs itu ditemukan gerabah dan keramik dari 14 M - 17 M. Hasi penelitian di Situs Warloka telah diuraikan dalam *Berita Penelitian Arkeologi* No. 30, tahun 1984 oleh tim peneliti: Hasan Muarif Ambary, Naniek Harkantiningasih dan Rokhus Due Awe dengan judul "Penelitian di Warloka".

Disamping kegiatan penelitian berupa survei juga telah dilakukan ekskavasi-ekskavasi di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, di Jawa Barat dilakukan ekskavasi yang dipusatkan di bekas kota Banten Lama dalam enam tahap pertama dan kedua dipimpin oleh Drs. Hasan Muarif Ambary (tahun 1979 dan 1980), tahap ketiga sampai keenam dipimpin oleh Naniek Harkantiningasih yaitu tahun 1981 hingga 1983. Ekskavasi dilakukan terhadap Situs Jembatan Rante, Pacinan, Panjunan, dan Pamarican. Kegiatan penelitian dan ekskavasi di situs-situs Kota Banten Lama ini menghasilkan sejumlah tulisan atau makalah yang disampaikan pada REHPA, PIA dan bahkan untuk skripsi dan tesis S1 dan S2.

Di provinsi Jawa Tengah penelitian dan ekskavasi arkeologi Islam dilaksanakan terhadap Situs Pajang di Dukuh Sanggrahan, Desa Makam Haji, Kecamatan Lawiyan, Kabupaten Kartasura. Dari penelitian dan ekskavasi di situs tersebut dapat dikenali tipologi perkotaan Pajang untuk menjadi pembanding dengan tipologi kota-kota pesisir. Temuan Artefak ada kecenderungan dilokasi padat yaitu di Situs Sitinggil, Kauman dan Kidul Pasar.

Di Provinsi Jawa Timur penelitian dan ekskavasi yang dilakukan tahun 1982 dan 1983 diarahkan ke situs di Dukuh Biting (Benteng?) Kabupaten Lumajang. Melalui penelitian pertama ditemukan bekas tembok keliling. Ekskavasi berhasil melihatkan struktur bangunan yang berada di bagian dalam benteng. Pada penelitian dan ekskavasi kedua yaitu tahun 1983 berhasil menemukan tiga sisi bangunan di dalam benteng: sisi utara, sisi timur, dan sisi selatan. Dari penelitian dan ekskavasi di Situs Lumajang ini muncul tulisan atau karangan-karangan yang ditemukan dalam REHPA III, 1986.

Kegiatan penelitian dan ekskavasi dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di situs bekas kota Tallo, Kecamatan Tallo.

Kodya Ujung Pandang. Yang menghasilkan antara lain ditemukan struktur tembok Banten, bekas bangunan makam kuno, fragmen gerabah dan keramik serta tulang manusia. Di Provinsi Sulawesi Selatan kecuali di situs tersebut juga dilakukan penelitian dan ekskavasi di Pulau Selayar. Hasilnya diketahui persebaran situs menempati daerah pantai, lereng pegunungan dan puncak-puncak pegunungan. Konsentrasi situs ada di puncak atau punggung perbukitan. Di situs-situs tersebut tidak ditemukan tinggalan Hindu atau Budha. Banyak situs kubur Islam ditemukan dan menunjukkan bahwa intensitas hubungan atau kontak dengan luar pada masa pra-Islam sudah meningkat dibuktikan dengan temuan keramik asing yang berasal masa tersebut sampai abad 17, dan peralatan logam perunggu dan besi dalam konteks habitasi ataupun kuburan. Uraian hasil penelitian di Pulau Selayar itu telah ditulis dan disampaikan dalam REHPA II, 1984 oleh Chr. Sonny Wibisono dengan judul "Sebaran Situs Kubur Sebagai Studi Awal Pola Pemukiman di Pulau Selayar."

Dalam PELITA III Bidang Arkeologi Islam telah meneruskan kegiatan dalam studi naskah dan arsitektur yang juga pernah dilakukan dalam PELITA II. Naskah-naskah yang diteliti terdapat di daerah Provinsi Aceh terutama di Kotamadya Banda Aceh dan di Kabupaten Aceh Besar. Di Kodya Banda Aceh diarahkan kepada naskah-naskah yang disimpan dalam koleksi Museum Negeri Aceh; sedangkan yang ada di Kabupaten Aceh Besar terutama diarahkan kepada penelitian naskah-naskah di Tano Abee, Kecamatan Seulimeum. Dalam studi naskah itu dapat diketahui adanya naskah Sirataal Mustaqim yang dikarang oleh Nuruddin Ar Raniri dan kemudian disalin ke bahasa Melayu tahun 1044 H yang penyalinannya dilakukan oleh Lebai Aini. Naskah ketiga ditulis atas permintaan Sultan Syafiatuddin Syah, putra Iskandar Muda. Kitab ini berisi tentang hukum sebagai pegangan para Qadi. Di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Pesantren Tano Abee ditemukan sejumlah besar naskah Islam diperkirakan 3000 naskah yang sebagian telah dikategorikan oleh T.H. Dahlan, pimpinan Zawiyah Tano Abee. Isinya secara umum naskah-naskah tersebut agama, tauhid, fiqh, naskah umum tentang ilmu falak, dan naskah-naskah tentang tasawuf, hakekat dan tarekat.

Penelitian terhadap naskah-naskah kuno terutama yang Islami juga telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat yaitu yang terdapat di Kantor EFEO di Bandung, Kodya Bandung, di Garut, di Kuningan, di Majalengka, di Indramayu, di Ciamis. Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan sejumlah naskah agama, naskah yang berisi sejarah atau

babad daerah-daerah, naskah tafsir, Quran, fiqh, tarikat dan lainnya. Tulisannya ada yang Pegon dan berbahasa Jawa, dan berbahasa Sunda. Hasil-hasil studi naskah-naskah yang telah ditemukan di Jawa Barat itu telah dikemukakan dalam *REHPA II* tahun 1984 dan *PIA V*, tahun 1989. Tulisan tersebut berasal dari Ahmad Cholid Sodrie.

Bidang Arkeologi Islam dalam PELITA III itu telah mengadakan penelitian arsitektur di daerah Bali untuk mencari apakah ada unsur-unsur persamaan dengan bangunan di Jawa terutama masa perkembangan Islam. Menurut penelitian tersebut hal itu terdapat pada bangunan pola susunan rumah di Puri Karang Asem ada unsur persamaannya dengan di Keraton Kasepuhan. Kecuali itu menara tempat kulkul di Pura dasar Klungkung mempunyai persamaan dengan Menara Kudus di Jawa Tengah. Dalam penelitian arsitektur ternyata di mesjid jami Lolohan Timur, Kabupaten (?) kegiatan penelitian, survei, ekskavasi terhadap tinggalan arkeologi Islam khususnya yang dilakukan oleh Bidang Arkeologi Islam Puslit Arkenas selama PELITA IV dan V yaitu dari tahun 1984 - 1995 belum diterbitkan dalam bentuk buku seperti halnya Laporan Penelitian Arkeologi selama PELITA II dan PELITA III. Meskipun demikian kita dapat ketahui kegiatan-kegiatan dan sasaran penelitian arkeologi Islam dari Daftar Rencana Proyek Penelitian Purba-kala, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Mengenai kegiatan utama penelitian arkeologi Islam dalam PELITA IV hampir sama dengan kegiatan-kegiatan dalam PELITA III yaitu penelitian naskah dan epigrafi, penelitian arsitektur, penelitian pemukiman dan perkotaan, penelitian pelabuhan kuno dan bawah air.

Penelitian naskah epigrafi daerah Provinsi Jawa Barat ditekankan kepada katalogisasi naskah-naskah hasil penelitian dan menilik aspek-aspek keagamaan, kehidupan sosial abad ke-17 - 19 M. Penelitian naskah epigrafi di 8 daerah Aceh juga merupakan kelanjutan dari tahun-tahun yang sudah dan daerah sasaran terutama di Aceh Timur. Dari penelitian naskah-naskah inilah diharapkan memperoleh data sebagai perbandingan untuk mengenali latar belakang sejarah kesultanan di Aceh. Demikian pula pada PELITA IV bagian akhir penelitian naskah-naskah akan diarahkan ke Ternate, Maluku Utara, di daerah Kalimantan Barat, di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian arsitektur selama PELITA IV diarahkan ke daerah Sumatera Barat terutama ditekankan kepada inventarisasi. Penelitian arsitektur Islam juga dilakukan di daerah Barus, Sumatra Utara, di daerah Kalimantan Barat, di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dan di Provinsi Jawa Timur terutama di Ponorogo dan Pasuruan.

Penelitian pemukiman dan perkotaan masih meneruskan penelitian Situs Kota Banten Lama di Provinsi Jawa Barat, dan di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Kalimantan Timur. Penelitian Pelabuhan Kuno dan bawah air merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yaitu di Tuban, di Bintan Riau. Penelitian di bawah air tersebut pada PELITA IV ini dilakukan di daerah Jambi dan Bengkulu.

Selama PELITA V dari tahun 1991 sampai tahun 1995 - 1996 telah dilakukan penelitian arkeologi Islam di Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah, di Provinsi Jawa Timur yaitu di Situbondo, di DAS Way Sekampung di Provinsi Lampung, di Biting - Lumajang Provinsi Jawa Timur, pantai utara Jawa Timur, Mataram, Gunung Kidul, Alor NTT, Siak Indrapura Provinsi Riau, makam Islam di Sumatera Utara, Pulau Seram, Banten Jawa Barat, Mojokerto Jawa Timur, Indramayu Jawa Barat, Kartosuro Jawa Tengah, Seram-Halmahera, benteng Baros di Provinsi Sumatera Utara, Tenggarong Kalimantan Timur, Waigeo Sorong di daerah Irian Jaya.

Kegiatan-kegiatan penelitian Arkeologi Islam kecuali bersumber dari laporan-laporan PELITA juga dapat diketahui dari buku Kerangka Acuan Penelitian Arkeologi Tahun 1984 - 1985 mengenai arkeologi Islam dalam kaitan penelitian di Banten, di beberapa daerah sepanjang pantai utara Jawa Tengah yang meliputi 7 kabupaten: Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal dan Rembang telah dijabarkan lokasi, riwayat penelitian, maksud dan tujuan, metode penelitian, jadwal pelaksanaan sampai personalianya. Demikian pula tentang akan dilakukan penelitian dan ekskavasi Situs Banguntapan di D.I. Yogyakarta pada bulan Juni 1985.

Dalam proceedings *Analisis Hasil Penelitian Arkeologi* terdapat pula hasil penelitian Islam. Makalah-makalah yang dikemukakan menarik perhatian kita karena sudah diarahkan kepada konsep-konsep, tematis misalnya di kaitkan dengan religi dalam kaitannya dengan kematian, kehidupan ekonomi masa lampau berdasarkan data arkeologi, metalurgi dalam arkeologi. Contoh-contohnya antara lain makalah Nurhadi: "Arkeologi Kubur Islam di Indonesia", Cholik Nawawi Cs dalam tulisannya "Kubur Tumpang Salah Satu Aspek Penguburan dalam Islam yang dimuat dalam Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi I, Jilid I; makalah Achmad Cholid Sodrie "Tulisan Pada Nisan-nisan Makam di Indonesia". Makalah Lukman Nurhakim "Tinjauan Tipologi Nisan pada Makam Islam Kuno di Indonesia", makalah Sony Chr. Wibisono yang

dikaitkan dengan lingkungan dengan judul "Masalah Keletakan Kuburan dalam Sistem Pemukiman Studi Kasus dari Pulau Selayar". Ada makalah-makalah yang dikaitkan dengan kesinambungan aspek kematian dalam religi antara lain tulisan Suwedi Montana: "Tradisi Kemitian Setelah Agama Islam di Indonesia". M.Th. Naniek Harkantiningasih dalam tulisannya "Jenis dan Peletakan Bekal Kubur di Situs Semawang dan Selayar: Pola Kubur dari abad ke 14 - 19. Makalah-makalah tersebut di atas telah dimuat dalam *Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi I* Jilid II.

Makalah-makalah yang dikaitkan dengan organisasi ekonomi yang dimuat dalam *Proceedings Analisis Penelitian Arkeologi II*, jilid II antara lain dari Moh. Ali Fadillah berjudul "Pola Perdagangan di Bandar Pancoran pada abad 17 - 19". Demikian pula tulisan Nurhadi "Perang dan Krisis Pangan pada Masa Mataram Islam". Tulisan-tulisan yang kajiannya dihubungkan dengan agrikultur antara lain oleh Fadillah Arifin Aziz "Hipotesa Awal Tentang Tata Guna Lahan dan Potensi Budidaya Padi dan Sawah di Banten Lama". Lukman Nurhakim dan Moh. Ali Fadillah yang dikaitkan dengan organisasi sosial ekonomi dengan judul: "Lada": Politik Ekonomi Banten di Lampung". Abdul Cholik Nawawi dengan judul tulisannya "Negara (Baladun) dan Sumber Air Lahan Pertanian dalam Transisi Masa Hindu-Budha ke Masa Islam Sekitar Tahun 1400 Masehi (Kajian Arkeologis Berdasarkan Epigrafis dan Filologis)". Makalah-makalah tersebut dimuat dalam *Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi III*. Makalah-makalah yang dikaitkan dengan masalah metalurgi dalam arkeologi antara lain dari Vita dengan judul "Tinjauan Metalurgi Terhadap Artefak Logam yang Ditemukan di Situs Sukadiri Banten". Makalah Moh. Ali Fadillah berjudul "Industri Emas di Kotawaringin: Kasus Strategi Ekonomi". Makalah kedua mereka itu dimuat dalam *Proceedings Analisis Hasil penelitian Arkeologi IV*.

Hasil-hasil penelitian dan pemikiran tentang Arkeologi Islam juga telah dikemukakan melalui beberapa Pertemuan Ilmiah Arkeologi pada tahun 1977, ke I sampai ke VI tahun 1992, dengan jumlah makalah tentang arkeologi Islam ada 50 buah dengan perincian 5 pada *PIA I*, 3 pada *PIA II*, 11 pada *PIA III*, 19 pada *PIA IV*, 8 pada *PIA V*, dan 4 pada *PIA VI*. Makalah-makalah tersebut diarahkan kepada diskusi tentang masalah arkeologi yang dikaitkan dengan masyarakat: struktur sosial, fungsi sosial dan perubahan sosial. Mengenai pemukiman yang merupakan bentuk studi keruangan dalam skala dan konteks sosial dan budaya

Judul-judul makalah dan dibuat siapa-siapa rasanya tidak perlu dikemukakan semuanya. Belum lagi kita meninjau sejumlah naskah yang tidak didiskusikan di lingkungan ahli Arkeologi Indonesia yang diterbitkan dalam waktu-waktu tertentu dan diselenggarakan oleh IAAI sendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sejak tahun 1960-an pada Jurusan Arkeologi dan Sejarah Kuno Fakultas Sastra Indonesia dan Universitas Gajah Mada mulai diajarkan mata kuliah Arkeologi Islam di Indonesia. Setelah diamati, sejak tahun 1963 terutamanya tahun 1967 sampai kini sudah banyak mahasiswa yang untuk penyelesaian studinya mengajukan skripsi tentang Arkeologi Islam di Fakultas Sastra Universitas Indonesia sudah menghasilkan lebih dari 60. Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada sudah berhasil meluluskan 66 lebih skripsi yang berkaitan dengan Arkeologi Islam. Skripsi-skripsi tersebut di atas membicarakan berbagai topik mengenai mesjid, keraton, makam, ragam hias, pemuksiman, pintu gerbang, motif-motif binatang, pengaruh-pengaruh arsitektur asing pada mesjid-mesjid dan bangunan-bangunan lainnya. Tinjauan yang dipergunakan dalam skripsi-skripsi tersebut ada dari segi arsitektural, dan proses lainnya. Daerah kajian mereka tidak lagi terbatas terhadap obyek-obyek di Jawa saja tetapi juga di luarnya seperti mesjid-mesjid kuno dan bangunan lainnya yang terdapat di Sumatera Sulawesi dan tempat lainnya.

Sangat membanggakan bahwa di antara sejumlah besar ahli-ahli yang menekuni Arkeologi Islam Indonesia selama 35 tahunan yaitu sejak gelar doktor dengan mempertahankan tesisnya kader kami pertama yaitu Dr. Hasan Muarif Ambary. Tesisnya yang dipertahankan pada bulan Juni tahun 1984 di Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales di Paris seperti pernah disebutkan di bagian muka makalah ini yaitu berjudul "L'Art Funeraire Musulman En Indonesie Des Origines Au XIX e Siecle. Etude Epigraphique Et Typologique" di bawah pimpinan Prof. Dennys Lombard.

Dalam tesisnya Dr. Hasan Muarif Ambary membicarakan masalah dan sumber-sumbernya, meninjau masalah sejarah penyebaran Islam di Indonesia, kedatangan Islam ke Sumatera dan Jawa, pendirian kerajaan pertama Islam dan perkembangannya sampai abad ke-16 M, kebiasaan cara penguburan jenazah dalam Islam di Indonesia berdasarkan Babad Tanah Jawi, Nagarakertabumi, Purwaka Caruban Nagari, hikayat Banjar, Syair Kerajaan Bima; pelaksanaan kebiasaan penguburan atas dasar ethnografi, pemberian tanda-tanda pada kubur dan penguburan. Pada bagian kedua dibicarakan hasil-hasil studi regional di berbagai tempat

seperti Aceh, bahkan di Malaysia, di Jawa, Wonosobo-Lampung, di situs-situs penguburan Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Bima, di Kalimantan Selatan dan daerah lainnya. Diteliti secara sistematis bukti-bukti epigrafi pada nisan-nisan kubur, kronogram yang terdapat pada nisan-nisan kubur, dan nisan-nisan kubur yang mempunyai karakteristik seperti makam-makam di Binamu-Jeneponto, dan dari tempat lainnya.

Menurut pendapat kami bab yang penting dan merupakan sumbangan amat berharga ialah tentang distribusi atau penyebaran bentuk atau style nisan-nisan kubur dengan tinjauan tipologi, karena bab ini Dr. Hasan Muarif Ambary berhasil mengkategorikan tipe-tipe nisan kubur Aceh dalam tipe *bucrane-aile*, tipe campuran *bucrane-aile*, tipe *Cylindrique*. Tipe-tipe yang berbeda dari Demak Troloyo, tipe-tipe Bugis Makasar, Ternate dan berbagai tipe lokal. Setelah itu ia menempatkan lokalisasi kubur-kubur yang kuno secara tipologi yang berada di puncak-puncak bukit dan di daerah mesjid. Disertasi Dr. Hasan Muarif Ambary bagi orang yang akan mempelajari Arkeologi Islam khususnya tentang nisan-nisan kubur adalah merupakan keharusan untuk membacakannya, meskipun masih belum diterbitkan.

Kecuali tesis Dr. Hasan Muarif Ambaru ada juga tesis yang mengkaji nisan-nisan kubur Aceh oleh Dr. Othman Mohd. Yatim, meskipun lebih dipusatkan pada nisan-nisan kubur Aceh terutama tersebar di daerah Malaysia. Tesis Dr. Othman Mohd. Yatim dipertahankan di University of Durham pada Departemen of Antropology yang kemudian diterbitkan tahun 1988 oleh Museum Association of Malaysia dengan judul "Batu Aceh Early Islamic Gravestones In Peninsular Malaysia". Dalam tesis ini yang penting diketahui ialah tentang kajian tipologi nisan-nisan kubur yang disebut Batu Aceh yang dibagi dua bentuk pokok dengan pembagian sub tipe dengan istilah tipe Othman A sampai N dengan cirinya masing-masing. Kemudian ditelaah pula pertulisan-pertulisannya, dekorasinya, dan kemudian persebarannya masing-masing tipe tersebut. Tipe-tipe nisan itu ditempatkan pula dalam kronologinya.

Dalam bentang waktu sejak tahun 1960-an sampai tahun 1995 kegiatan penelitian Arkeologi Islam yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya atau oleh perorangan dan hasilnya dimuat dalam bentuk buku atau karangan dalam majalah di dalam dan luar negeri, kami kira tidak sedikit jumlahnya. Pada tahun-tahun 1961 Sutjipto Wirjosuparto telah menulis tentang sejarah bangunan mesjid dan sejarah menara Kudus. Soplichin

Salam telah menulis tentang Kudus dan kekunoan Islam tahun 1962. Mundardjito skripsi tentang peninggalan purbakala Islam di Tembayat. Uka Tjandrasasmita tahun 1974, 1981, 1984, 1985 dan tahun-tahun berikutnya telah menulis makalah-makalah yang berkaitan dengan Arkeologi Islam. Dr. Hasan Muarif Ambary kecuali telah menghasilkan tesis doktor juga telah banyak menulis hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian Arkeologi Islam.

Tulisan-tulisan tentang peninggalan Arkeologi Islam baik berupa bangunan mesjid maupun benda-benda lainnya hasil penelitian orang Indonesia atau orang asing masih belum dihimpun semuanya. Beberapa ahli Perancis seperti: Claude Guillot, J. Dumarcay, M. Bonnef, Henri Chambert-Loir, Denny Lombard telah menulis tentang mesjid-mesjid yang dimuat dalam archipel 30, tahun 1985. N.A. Baloch telah menerbitkan hasil penelitiannya di Indonesia dengan judul "Advent of Islam in Indonesia", yang diterbitkan tahun 1980. Di dalam buku itu data arkeologis dipergunakan untuk menyusun kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia.

Kami sadar bahwa di luar yang telah dibicarakan mungkin masih banyak sumber atau data yang belum dijangkau. Namun seperti yang telah kami kemukakan di bagian depan bahwa penyusunan penelitian Arkeologis Islam yang lebih rinci Insya Allah dapat dilakukan pada masa yang akan datang dengan waktu yang cukup. Meskipun dalam makalah ini kami baru dapat mengemukakan secara sepintas apa-apa yang telah dilakukan LPPN dan Puslit Arkenas dan Lembaga-lembaga lain di luarnya serta hasil-hasil perorangan, namun dapat diambil beberapa kesimpulan.

3. Kesimpulan

- 1) Kegiatan penelitian, survei dan kegiatan lainnya terhadap tinggalan Arkeologi Islam selama tahun 1960-an sampai 1995 memberikan perkembangan yang nyata dan pesat dibanding masa-masa sebelumnya yaitu dengan gambarannya pernah ditulis dalam 50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- 2) Perkembangan dan kemajuan tersebut bukan hanya mengenai jumlah obyek yang diteliti atau disurvei bahkan di studi kelayakan sudah mencakup beberapa obyek dan daerah di Indonesia berupa: bangunan, kubur-kubur dan artefak-artefak lainnya, situs pemukiman dan

perkotaan, naskah-naskah, tetapi juga mengenai intensitas dan sistematika penelitiannya.

- 3) Teori-teori dan metode penelitian ternyata makin mantap, karena konsep-konsep ilmu sosial dan eksakta telah dipergunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung oleh tinggalan Arkeologis Islam. Kenyataan bahwa banyak makalah atau tulisan yang telah terbit sebagai hasilnya menunjukkan arah penghubung antara arkeologi dengan kehidupan sosio ekonomi, sosio religius, status religius, status sosial dengan ruang dan lahan atau konsep lingkungan, dengan agrikultur, dengan teknologi dan lain sebagainya. Seperti halnya perkembangan studi sejarah studi arkeologi kini juga mempunyai kecenderungan untuk pemantapannya menggunakan konsep-konsep ilmu sosial, bedanya arkeologi ditambah dengan menggunakan atau menerapkan ternologi dari ilmu-ilmu eksakta.
- 4) Kemajuan kegiatan penelitian tersebut kini sudah banyak didukung oleh sarjana-sarjana arkeologi yang masih muda-muda yang merupakan sumber daya manusia harapan untuk lebih memacu kemajuan penelitian dan menghasilkan banyak tulisannya demi kemajuan ilmu arkeologi Indonesia

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL SIDANG KOMISI SUMBERDAYA MANUSIA

1. Sidang Komisi Sumberdaya Manusia Kongres IAAI ke-7 dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1996, mulai pukul 21.45 s.d. pukul 23.58, bertempat di Ruang Bali, Hotel Indo Alam, Cipanas. Sidang dihadiri oleh 35 orang anggota, dan dipandu oleh Surya Helmi. Komisi SDM ditugasi untuk merumuskan pengembangan sumberdaya manusia yang diharapkan dapat dijadikan salah satu program kerja Pengurus IAAI masa bakti 1996—9. Agar tidak simpang siur, pembicaraan dipusatkan untuk membahas makalah Pengembangan Sumberdaya Manusia IAAI yang berupa butir-butir pokok pikiran Ayatrohaedi.
2. Setelah membahas berbagai hal yang berkenaan dengan sumberdaya manusia itu lebih dari dua jam, Sidang bersepakat untuk memutuskan hasilnya sebagai berikut:

2.1. Dasar

- 2.1.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - a. Pasal-pasal berkenaan dengan keanggotaan
 - b. Pasal-pasal berkenaan dengan kepengurusan
 - c. Pasal-pasal berkenaan dengan tujuan dan usaha.
- 2.1.2 Etika Profesi
- 2.1.3 Program Kerja

2.2 Arah Pengembangan

- 2.2.1 Horisontal/Kuantitas
 - a. Penambahan anggota baru sesuai kriteria dan persyaratan AD/ART.
 - a) lulusan program studi arkeologi
 - b) lulusan program studi lain
 - c) pengalaman/pengabdian di bidang arkeologi
 - d) jasa bagi pengembangan arkeologi dan organisasi IAAI (anggota kehormatan)
 - b. Penambahan komisariat baru sesuai kriteria dan persyaratan AD/ART
 - a) daerah kerja
 - b) komunikasi/kerjasama
 - c) program kerja

2.2.2 Vertikal/Kualitas

- a. Peningkatan kemampuan ilmiah/profesional anggota
 - a) pendidikan jenjang lebih tinggi
 - b) pertemuan ilmiah
 - c) penelitian
 - d) perluasan wawasan dengan mendalami ilmu/bidang lain
 - e) pelatihan
- b. Peningkatan kemampuan teknis/terapan anggota
 - a) keaktifan keorganisasian
 - b) keaktifan layanan kemasyarakatan
 - (a) penyuluhan lisan dan tulis
 - (b) penataran
 - (c) pendidikan dan pengajaran
 - c) keaktifan kelembagaan
 - (a) Keterlibatan dalam kegiatan lembaga
 - (b) Pengemukakan gagasan/wawasan untuk peningkatan fungsi dan peranan lembaga.

2.3 Manfaat

2.3.1 Bagi anggota

- a. lebih 'dewasa'
- b. lebih dikenal

2.3.2 Bagi organisasi

- a. pengakuan akan peran, fungsi, dan kedudukan organisasi
 - (a) di dunia ilmiah
 - (b) di dunia birokrasi
 - (c) di masyarakat
- b. tumbuhnya kepercayaan akan kemampuan organisasi untuk
 - (a) menjaga dan memelihara citra
 - (b) membela dan memperjuangkan anggota

2.4 Pelaksana

2.4.1 Organisasi (IAAI)

- a. sendiri

b. kerjasama

2.4.2 Anggota sendiri

a. prakarsa sendiri

b. pelaksana ('pemborong, kontraktor')

2.5 Lain-lain

- a. Dalam rangka upaya 'mendunia' sebagaimana diamanatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kongres perlu mengeluarkan rekomendasi yang sesuai.
- b. Kurikulum di jurusan dan program studi Arkeologi perlu ditata ulang sehingga memberikan kemungkinan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat.
- c. Upaya menghilangkan citra IAAI sebagai 'organisasi pemerintah' perlu dilakukan dengan tindakan dan bukti nyata.
- d. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagai organisasi IAAI akan lebih mandiri.

Cipanas, 13 Maret 1996

Perumus,

Ayatrohaedi

Ingrid HE Pojoh

Surya Helmi

Wiwin Djuwita Ramelan

Kelompok Sumberdaya Manusia

1. Agus
2. Aryandini Novita
3. Ayatrohaedi
4. Budhy Sancoyo
5. Christophorus Wibisono
6. Dwi Yani Yuniawati
7. Eadhiey Laksito Hapsoro
8. Edi Sunarto
9. Ediyami Bondan Andoko
10. Eri Sudewo
11. H.S. Hardjasasmita
12. Haeruddin
13. Halina Budi Santoso Aziz
14. Haris Sukendar
15. Hendari Sofion
16. I.G.N. Adnyana
17. I.G.N. Anom
18. I Made Ayu Kusumawati
19. I Made Geria
20. I Nyoman Sumartika
21. I Wayan Redig
22. I Wayan Wardha
23. Inayati Adrisianti
24. Indah Asikin Nurani
25. Indra
26. Ingrid H.E. Pojoh
27. Irmawati Marwoto Johan
28. Ketut Wiradnyana
29. Kosasih S.A.
30. Kresno Yulianto Soekardi
31. Luh Kade Citha Yuliati
32. M. Dwi Cahyono
33. M. Habib Mustopo
34. M.M. Rini Supriatun
35. Ni Komang Aniek Purniti
36. Noerhadi Magetsari
37. Nurhadi
38. Oki Laksito
39. Prapto Saptono
40. Priyatno Hadi S.
41. Retno Purwanti
42. Rokhus Due Awe
43. Rr. Triwuryani
44. Rusmeijani Styorini
45. S. Astuti
46. S. Boeddhisampurno
47. Selarti Venetsia Saraswati
48. Sri Ediningsih
49. Sri Utami Ferdinandus
50. Sudarti Priyono
51. Sugeng Riyanto
52. Sumiati Atmosudiro
53. Surya Helmi
54. Tatiek Suyati Sukendar
55. Trigangga
56. Tubagus Najib
57. Tular Sudarmadi
58. Uka Tjandrasasmita
59. Wiwin Djuwita Ramelan
60. Zakaria Kasimin

LAPORAN SIDANG KOMISI ETIKA

Rapat Komisi Etika Profesi Arkeologi Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 1996, pukul 21.50 sampai pukul 23.30 di ruang Semeru, Hotel Indo Alam, Cipanas. Rapat dihadiri oleh 47 orang anggota IAAI. Rapat ini diadakan dengan mempertimbangkan perlunya disusun kode etik profesi arkeologi Indonesia yang sudah sejak lama didambakan.

Tujuan rapat adalah menjajagi kemungkinan penyusunan kode etik profesi arkeologi Indonesia dan menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dibutuhkan dalam penyusunan kode etik tersebut.

Dalam rapat Komisi Etika Profesi dibahas makalah dari Prof. Dr. Mundardjito dengan judul *Menuju Etika Profesi Arkeologi Indonesia*. Makalah tersebut merupakan bahan diskusi untuk membahas perlunya disusun kode etik profesi arkeologi Indonesia, karena pekerjaan arkeologi makin lama makin bervariasi dan menyentuh dan disentuh oleh aneka pekerjaan yang non-arkeologis, serta jumlah arkeolog yang makin lama makin banyak dengan latar belakang pendidikan yang tidak selalu sama dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula. Kode etik tersebut seyogyanya merupakan penjabaran dari mukadimah Anggaran Dasar IAAI yang pada intinya merupakan suatu bentuk tanggung jawab profesi. Pada makalah juga terlampir *Code of Ethics* dari *Society of Professional Archaeologist*, *Statements on Ethics: Principles of Professional Responsibility* dari *American Anthropological Association*, dan *Ethics for Archaeology* milik *Society for American Archaeology*. Lampiran-lampiran tentang kode etik tersebut dimaksudkan untuk bahan perbandingan dalam melakukan diskusi.

Hasil Rapat

Rapat menentukan :

1. Secara aklamasi peserta menganggap penting adanya kode etik profesi arkeologi Indonesia, dan menyetujui segera disusun kode etik tersebut.

2. Untuk melaksanakan penyusunan kode etik profesi arkeologi Indonesia, perlu dibentuk komisi khusus yang diberi mandat untuk menyusun kode etik tersebut secara lengkap. Komisi penyusunan kode etik profesi arkeologi Indonesia diharapkan dapat menampung dan mewakili keragaman pemikiran dan penerapan arkeologi di Indonesia.
3. Penyusunan kode etik profesi arkeologi Indonesia hendaknya didasarkan pada tanggungjawab ahli arkeologi sesuai dengan bidang terapan yang ada. Dalam hal ini arkeologi harus bertanggungjawab kepada disiplin ilmu, organisasi, lembaga tempat bekerja, masyarakat, dan sesama kerabat kerja. Adapun yang dimaksud dengan bidang terapan adalah penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan data arkeologi.
4. Rumusan kode etik profesi arkeologi hendaknya lebih ditekankan sebagai rambu-rambu moral, dan tidak menjurus pada pembakuan pedoman tatacara pelaksanaan kegiatan arkeologi dalam setiap bidang penerapannya. Apabila pedoman tatacara pelaksanaan kegiatan arkeologi dibutuhkan, dapat disusun secara tersendiri dan berfungsi sebagai rujukan bagi kode etik profesi arkeologi Indonesia. Di samping itu hendaknya kode etik profesi arkeologi secara jelas mencantumkan bahwa kode etik tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam penuntutan secara hukum, dan sebaliknya justru dapat dipakai sebagai perlindungan hukum bagi ahli arkeologi dalam batas-batas tertentu.
5. Untuk menjamin ditaatinya kode etik profesi arkeologi perlu ditetapkan sanksi-sanksi pada pelanggarnya berkenaan dengan dengan itu, perlu dibentuk suatu dewan yang bertugas untuk memantau dan menilai pelaksanaan kode etik dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi penyimpangan kode etik yang telah ditetapkan.
6. Kode etik diharapkan selesai sebelum Kongres IAAI VIII yang akan datang dan diberlakukan mulai Kongres VIII.

Ketua Sidang : Daud Aris Tanudirdjo
Pencatat : Agus Aris Munandar

Kelompok Etika

1. A Gde Agung
2. Abdul Cholig Nawawi
3. Abu Ridho
4. Achmad Cholid Sodrie
5. Agus Aris Munandar
6. Akin Duli
7. Ali Ambon
8. Andi M. Said
9. Anwar Falah
10. Baskoro Daru Tjahyono
11. Berthold D.H. Sinaulan
12. Blasius Suprpto
13. Budi Santoso Wibowo
14. Budianto Hakim
15. D.D. Bintarti
16. Daud Aris Tanudirdjo
17. Djoko Soekiman
18. Djulianto S
19. Eka Asih Putrina Taim
20. Etty Saringendiati
21. Fadhila Arifin Aziz
22. Hari Untoro Dradjat
23. Hariana Surjaningsih
24. Hasan Djafar
25. Heddy Surachman
26. I Ketut Kertayasa
27. I Made Purnawan
28. I Made Sutaba
29. I Nyoman Purusa Mahaviranata
30. I Wayan Ardika
31. I Wayan Gde Yadhnya T.
32. I Wayan Sepur Seriarsa
33. Ipak Fahriani
34. Julius Satrio Atmodjo
35. Karina Arifin
36. Lambang Babar Purnomo
37. Lutfi Yondri
38. M. Sjafik Siddik
39. Mindra Faizaliskandiar
40. Mohamad Chawari
41. Mundardjito
42. Nasruddin
43. Nurhadi Rangkuti
44. Putu Budiastira
45. R. Cecep Eka Permana
46. R. Soekmono
47. Ratna Suranti
48. Retno Handini
49. Ronny Siswandi
50. Rusmiati
51. Samidi
52. Siswanto
53. Soekanto Tw.
54. Sri Patmiarsi R.
55. Sri Supraptiningsih
56. T.M. Rita Istari
57. Tawalinuddin Haris
58. Timbul Haryono
59. Tjut Njak Kusmiati
60. Yusmaini Eriawati